

# Bahan Ajar Kelas X SMA

Memahami Macam-Macam Upaya  
Penegakan Hak Asasi Manusia  
Sebagai Bentuk Dari Penegakan  
Hukum Di Indonesia



# **Memahami Macam-Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia**

**Penulis:**

**Dian Wahyuni<sup>(1)</sup> Anita Trisiana<sup>(2)</sup> Amelia Febrian<sup>(3)</sup> Anisa**

**Fatmawati<sup>(4)</sup> Ester Ningsih<sup>(5)</sup> Islah Yulia<sup>(6)</sup>**

**Penerbit**



**Unisri Press © 2023**

**Judul Buku**

**Memahami Macam-Macam Upaya Penegakan Hak Asasi**

# **Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia**

## **Buku Bahan Ajar Untuk Kelas X SMA**

Penulis:

Dian Wahyuni<sup>(1)</sup> Anita Trisiana<sup>(2)</sup> Amelia Febrian<sup>(3)</sup> Anisa Fatmawati<sup>(4)</sup> Ester Ningsih<sup>(5)</sup> Islah Yulia<sup>(6)</sup>

**ISBN: 978-623-5859-43-9**

Editor: Roni Setyawan

Desain sampul dan tata letak:

Ester Ningsih

**Penerbit:**

**Unisri Press © 2023**

**Redaksi:**

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,

Banjarsari, Kota Surakarta

Press.unisri.ac.id

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Terbitan Pertama, 2023

**ISI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PENULIS**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai penulis, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Karunia-Nya, kami penulis dapat menyelesaikan Buku ini tepat pada waktunya. Judul Buku Bahan Ajar ini adalah “Memahami MacamMacam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai Bentuk dari Penegakan Hukum di Indonesia.”, yang dirancang agar dapat menjadi salah satu materi pelengkap bahan ajar, terutama bagi para siswa SMA kelas X.

Buku ini dibuat dengan menyesuaikan pada kepentingan materi siswa di tingkat SMA. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama para pelajar yang sedang mendalami materi penegakan hak asasi manusia sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia. Materi di dalamnya mengulas tentang pendalaman pengetahuan tentang bagaimana pelanggaran HAM di Indonesia, perlindungan HAM sebagai bentuk hukum penegakan hukum di Indonesia, dan upaya perlindungan HAM di Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang terlibat dalam pembuatan berbagai buku, jurnal, dan karya-karya terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan Buku

Bahan Ajar ini. Selain itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

**Tim Penulis**

**Surakarta, Januari 2023**

## ANALISIS PEMBELAJARAN



Dalam Buku Bahan Ajar untuk kelas X SMA yang berjudul “Memahami Macam-Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia”. Buku Bahan Ajar ini mengulas tentang Hak Asasi Manusia. Kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir di dunia, yang artinya setiap seseorang memiliki Hak didalam keseharian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Buku bahan ajar ini berisikan mulai mengenai pengertian, sejarah, pelanggaran dan penyebabnya, penegakan hukum, dan upaya

penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah diketahuinya mengenai macam penegakan hak asasi manusia dan upaya penegakannya diharapkan peserta didik menjadi lebih paham akan Hak Asasi Manusia dan bagaimana penegakannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
ANALISIS PEMBELAJARAN .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
TINJAUAN MATA PELAJARAN.....	vii
BAB 1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	1
1. 1.    Pendahuluan.....	1
A.    Deskripsi Singkat .....	3
B.    Relevansi.....	5
C.    Kompetensi / Tujuan .....	5
D.    Petunjuk Belajar.....	5
1. 2.    Penyajian.....	6
A.    Pengertian Hak Asasi Manusia .....	6
B.    Sejarah Berkembangnya Hak Asasi Manusia.....	13
C.    Macam-Macam Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	28
1. 3.    Penutup .....	45
A.    Rangkuman .....	45
B.    Tes Formatif.....	46



C.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	50
D.	Kunci Jawaban .....	50
BAB 2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....		51
2. 1.	Pendahuluan.....	51
A.	Deskripsi Singkat .....	53
B.	Relevansi.....	54
C.	Kompetensi/ Tujuan .....	54
D.	Petunjuk Belajar .....	55
2. 2.	Penyajian.....	55
A.	Memahami Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	55
B.	Macam Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia 63	
C.	Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia 82	
2. 3.	Penutup .....	91
A.	Rangkuman .....	91
B.	Tes Formatif.....	93
C.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	94
D.	Kunci Jawaban Tes Formatif.....	94
BAB 3 Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum di Indonesia .....		97

3. 1.	Pendahuluan.....	97
A.	Deskripsi Singkat.....	99
B.	Relevansi.....	103
C.	Capaian Pembelajaran (CP).....	104
D.	Petunjuk Belajar.....	105
3. 2.	Penyajian.....	105
A.	Kebijakan Hukum di Indonesia terkait Hak Asasi Manusia .	105
B.	Dasar Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia .	128
C.	Kedudukan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional.....	153
3. 3.	Penutup.....	167
A.	Rangkuman.....	167
B.	Tes Formatif.....	170
C.	Umpan Balik.....	172
D.	Tindak Lanjut.....	173
E.	Kunci Jawaban Tes Formatif.....	174
BAB 4 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA .....		175
4. 1.	Pendahuluan.....	175
A.	Deskripsi Singkat.....	176
B.	Relevansi.....	178
C.	Capaian Pembelajaran.....	178

D.	Petunjuk Belajar.....	179
4. 2.	Penyajian.....	180
A.	Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia .....	180
B.	Upaya Penegakan HAM di Lingkup Keluarga, Masyarakat, dan Sekolah.....	187
C.	Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan HAM... 205	
4. 3.	Penutup .....	232
A.	Rangkuman .....	232
B.	Tes Informatif.....	233
C.	Kunci Jawaban .....	235
	GLOSARIUM .....	236
	DAFTAR PUSTAKA .....	240
	BIOGRAFI PENULIS .....	243

## **TINJAUAN MATA PELAJARAN**

### **Deskripsi Singkat**

Buku ini menguraikan mengenai materi Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang dari awal yang merupakan hak dasar, dipraktikkan setiap saat, di maupun, dan kepada setiap orang. Pada buku ini akan membahas mengenai pengertian, sejarah, macam-macam, hak asasi manusia. Dan juga membahas pelanggaran dan penegakan hukum terhadap hak asasi manusia beserta upaya yang dapat dilakukan. Dengan demikian pembaca akan mengetahui lebih banyak wawasan mengenai hak asasi manusia dan bagaimana kaitannya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

### **Relevansi**

Relevansi buku bahan ajar ini dengan Pendidikan kewarganegaraan adalah sudah kita ketahui hak asasi manusia merupakan kaitannya dengan kewarganegaraan kita di Indonesia. Karena hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia untuk mengetahui serta mendapat hak nya sebagai warga negara Indonesia.

### **Capaian pembelajaran**

Kompetensi atau tujuan pembelajaran pada buku bahan ajar ini sebagai berikut :

1. Mengkaji sejarah, pengertian, dan macam HAM
2. Mengidentifikasi pelanggaran HAM di Indonesia

3. Mengkaji penegakan HAM dengan penegakan hukum di Indonesia
4. Menganalisis upaya penegakan HAM di Indonesia

### **Petunjuk Belajar**

Buku ini terdapat empat bagian yang akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia. Dimana tiap-tiap bagian terkandung beberapa unit pembelajaran, yang meliputi :

1. Pendahuluan; yang berisikan tentang deskripsi singkat, relevansi, kompetensi pembelajaran, petunjuk belajar.
2. Bab bagian; yang berisikan uraian contoh dan Latihan
3. Penutup; yang berisikan mengenai rangkuman pada bab bagian serta test formatif beserta kunci jawaban.

## **BAB I**

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

#### **1. 1. Pendahuluan**

Hak adalah elemen normatif yang melekat pada semua manusia dan kegunaannya terletak di dalam kerangka hak dan kebebasan yang sama dalam interaksi antar individu atau dengan otoritas. Anda juga perlu mendapatkan haknya. Masalah hak asasi manusia sering dibahas dan diperdebatkan, khususnya di generasi reformasi ini. Hak asasi manusia lebih dihargai dan dihargai dalam generasi reformasi daripada dalam generasi pra-reformasi. Dalam hal menggunakan hak kita, kita harus ingat bahwa kita tetap bersosialisasi dengan orang lain, tidak sendirian. janganlah kita mencurahkan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan manusia yang berbeda untuk dapat mencapai atau mewujudkan hak asasi manusia itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang dari awal, dipraktikkan setiap saat, di mana pun,

dan kepada setiap orang. Seluruh aspek yang terikat dengan HAM harus diterima serta secara mutlak setiap orang memilikinya terlepas dari variasinya. Perlu diingat, setiap manusia memiliki tujuan, khususnya pilihan untuk melakukan yang benar dan yang jahat. Jauh sekali pilihan untuk berbuat jahat yang berdampak pada pelanggaran HAM, yang meliputi pembunuhan, perampasan harta milik orang lain, penjarahan, dan lain sebagainya. Untuk mencegah keinginan untuk melakukan kejahatan, sangat penting untuk menerapkan dan menyelamatkan Anda. Dengan begitu, pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi.

Sebagai manusia, dia adalah makhluk Tuhan dengan martabat yang tinggi. Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada diri setiap orang. oleh karena itu biasa saja. Dengan kata lain, itu berlaku untuk semua orang di mana-mana dan tidak diambil oleh semua orang. lebih lanjut untuk melindungi martabat individu dan manusia, manusia membutuhkan landasan yang tepat dan etis ini untuk berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia.

## A. Deskripsi Singkat

Dalam masyarakat global ini, setiap laki-laki atau perempuan pasti memiliki hak dasar untuk hidup, dan hak-hak dasar tersebut telah ada sejak manusia lahir. Selain itu, hak-hak dasar ini umumnya didiagnosis. Hak asasi manusia (HAM) ini yang disebut hak-hak dasar. Dalam gaya hidup hak asasi manusia, setiap laki-laki atau perempuan memiliki perlindungan etis dan kriminal sehingga orang dapat dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perampasan, penganiayaan, dll.

Orang yang terlindungi dari segala bentuk merugikan diri sendiri (perampasan, penganiayaan, dll.) hidup lebih bebas dan merasa lebih sedikit tekanan. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa akan menjalani kehidupan yang lebih layak karena hak asasinya.

HAM sendiri diproklamirkan secara universal pada 10 Desember 1948, sekitar tiga tahun setelah kemerdekaan



Indonesia dari Amerika Serikat (PBB). Pengumuman hak asasi manusia secara publik (adat human rightsdeclaration) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak asasi manusia yang mendasar kepada setiap orang di bidang ini. Secara terpisah, Deklarasi Hak Asasi Manusia juga dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan kepada hak asasi manusia di antara masyarakat dunia setiap saat.

Deklarasi hak asasi manusia yang diproklamakan dan disepakati oleh tempat-tempat nasional internasional. detik. sebuah. Orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Amerika Serikat harus mengakui, menjunjung tinggi, dan menghormati hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus ditegakkan agar semua negara bersatu dapat memutuskan untuk mempromosikan gaya hidup manusiawi yang sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Singkatnya, HAM harus menjadi kewajiban bersama seluruh warga negara.

## **B. Relevansi**

Bab pertama ini berkaitan dengan topik PPKn kelas X. Saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah HAM di Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan topik HAM yang ada dan mata pelajaran Kewarganegaraan Kelas X ini.

## **C. Kompetensi / Tujuan**

1. Agar siswa dapat mengetahui pengertian hak asasi manusia
2. Agar siswa dapat memahami sejarah hak asasi manusia didunia dan di Indonesia
3. Agar siswa dapat mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia di Indonesia

## **D. Petunjuk Belajar**

Agar memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran ini, kami telah menyediakan beberapa petunjuk tentang cara menggunakannya.

1. Membaca dan memahami uraian materi yang disampaikan pada setiap kegiatan pembelajaran.
2. Selesaikan setiap kegiatan diskusi, latihan pertanyaan,

dan praktikkan pengetahuan konseptual dan perintah literasi lingkungan.

3. Untuk "kegiatan diskusi" termasuk kegiatan praktik, harap memperhatikan termasuk cara melakukan.
4. Setelah selesai, Anda dapat memeriksa kembali.

## **1. 2. Penyajian**

### **A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa hak asasi manusia, merupakan anugerah Tuhan kepada ciptaan, tidak dapat atau tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pribadi seseorang atau laki-laki atau perempuan. Hak asasi manusia tidak bisa dilaksanakan dengan kekerasan atau cara lain. Apabila hal itu terjadi maka akan berdampak pada manusia, dengan kata lain akan kehilangan harkat dan martabat manusia yang merupakan nilai hakiki manusia. Namun demikian, tidak berarti bahwa keyakinan terhadap HAM dapat dilakukan secara terbuka, karena bisa melanggar HAM orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang dari awal, dipraktikkan setiap saat, di mana pun, dan kepada setiap orang. Seluruh aspek yang terikat dengan HAM harus diterima serta secara mutlak setiap orang memilikinya terlepas dari variasinya. Perlu diingat, setiap manusia memiliki tujuan, khususnya pilihan untuk melakukan yang benar dan yang jahat. Jauh sekali pilihan untuk berbuat jahat yang berdampak pada pelanggaran HAM, yang meliputi pembunuhan, perampasan harta milik orang lain, penjarahan, dan lain sebagainya. Untuk mencegah keinginan untuk melakukan kejahatan, sangat penting untuk menerapkan dan menyelamatkan Anda. Dengan begitu, pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi.

Hak asasi manusia perlu dimuliakan dan dihormati karena HAM ialah dasar yang tertanam dalam diri manusia yang dapat dijunjung tinggi sepanjang masa. Akibatnya itu harus diselimuti, terkemuka, serta tidak boleh tercampakkan, mengecilkan / diambil bagi semua orang secara mutlak. Upaya penegakan HAM adalah segala cara yang

menyangkut maksud agar hak asasi manusia bereputasi dan diakui. Upaya penegakan hak dan kewajiban seseorang biasanya dilengkapi dengan perlindungan.

Penegakan HAM merupakan kewajiban dan tidak ada penekanan dari pihak yang melakukannya. Pembentukan negara serta bangsa pada umumnya bertujuan untuk menikmati hak asasi warganya. Dibutuhkan dorongan hati dan cita-cita yang sungguh-sungguh atas pihak penguasa, penegak regulasi, serta elite politik supaya penegakan hak asasi manusia terarah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan menjamin HAM warganya bisa terealisasi secara baik.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga dianggap mempunyai nilai yang sama. Nilai-nilai populer menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mengenal batas-batas wilayah dan waktu, dan nilai-nilai universal ini digunakan untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan melalui berbagai nilai kemanusiaan. Ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai produk kejahatan

negara nasional. Nilai yang meresap ini juga tercermin dalam instrumen global, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun fakta menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tradisional tidak lagi diterapkan secara seragam. Karena keberadaan hak asasi manusia menempel, mendukung dan melekat pada individu sejak manusia lahir, hak-hak dalam hak asasi manusia memiliki prinsip dan status atau tingkat pertama kehidupan sosial. Saat itu juga muncul kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Oleh bangsa-bangsa, ketetapan, penguasa dan semua umat manusia, demi kehormatan dan keamanan martabat manusia. Dalam hal ini, negara harus memiliki ketentuan hak asasi manusia untuk melindungi setiap laki-laki atau perempuan yang berhak mendapatkan kewarganegaraan. diri. . Berdiri dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh cara hidup manusia. besar.

Intinya, pemerintah vital adalah yang pertama bertanggung jawab atas kewajiban untuk menerapkan hak asasi manusia global di pedesaan. tindakan pemerintah

publik yang melanggar hukum. Di dalam masalah ini letak pemerintahan kelurahan karena perwakilan penguasa di tempat tersebut merupakan pelengkap pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia.

HAM sendiri diproklamirkan secara universal pada 10 Desember 1948, sekitar tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia dari Amerika Serikat (PBB). Pengumuman hak asasi manusia secara publik (adat human rightsdeclaration) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak asasi manusia yang mendasar kepada setiap orang di bidang ini. Secara terpisah, Deklarasi Hak Asasi Manusia juga dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan kepada hak asasi manusia di antara masyarakat dunia setiap saat.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak menurut Dzat Yang Maha Esa yang memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yang wajib pada jaga, pada hormati sabg siapapun terhadap

siapapun tidak melihat status sosial, kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Pada nyatanya hak ini adalah suatu hak yang memang sebagai hal yang berharga dalam diri manusia. Hak asasi manusia merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Selain itu, ada istilah pelanggaran HAM berat yang memiliki banyak arti, seperti pelanggaran berat dan sistematis, kejahatan paling serius, pelanggaran berat, pelanggaran berat.

Deklarasi hak asasi manusia yang diproklamirkan dan disepakati oleh tempat-tempat nasional internasional. detik. sebuah. Orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Amerika Serikat harus mengakui, menjunjung tinggi, dan menghormati hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus ditegakkan agar semua negara bersatu dapat memutuskan untuk mempromosikan gaya hidup manusiawi yang sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Singkatnya, HAM harus menjadi



kewajiban bersama seluruh warga negara.

Dalam hal menegakkan hak asasi manusia, dibentuklah organisasi bernama "KOMNAS HAM" di Indonesia. yang dimaksudkan sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat didalam pengendalian menegakkan hak asasi manusia serta sebagai sarana penelusuran jaringan agar tidak digunakan kekerasan untuk bertindak sewenang-wenang. perlunya penegakan hak asasi manusia sebagai upaya memberikan rasa aman bagi umat manusia dari kesewenang-wenangannya dalam ketenagalistrikan. Sebab hal tersebut, hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Penyangkalan terhadap jalan yang benar ini mengingkari martabat manusia. Pada hakekatnya, dalam kerangka cita-cita kemanusiaan, harkat dan martabat manusia sebenarnya mengandung unsur tanggung jawab manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang tentunya dapat merendahkan martabatnya. Derajat kemanusiaan ini sekaligus bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan sehingga gerakan apapun tidak dapat dibenarkan jika

berdampak pada kejatuhan umat manusia dengan menggunakan kepentingan atau tujuan apapun.

## **B. Sejarah Berkembangnya Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Perkembangan HAM di Indonesia pernah didokumentasikan dalam UUD 1945, namun kini tidak transparan. Dalam Amandemen I sampai IV UUD 1945, pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia diindeks dalam Pasal 28A sampai 28J. Berbagai partai politik kemudian menyelesaikan Piagam HAM 1945 melalui MPRS-nya di awal UUD 1945. , menyusun Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Hak dan Kewajiban Warga Negara. MPRS menyerahkan memorandum MPRS tentang pelaksanaan hak asasi manusia kepada Presiden dan DPR-nya. Lagi pula, banyak aspirasi politik saat itu tidak lagi dilaksanakan. Pada saat itu, Orde Baru mendominasi Konstitusi Hak Asasi Manusia, percaya bahwa masalah hak asasi manusia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pada Sidang

Istimewanya tanggal 11 November 1998, MPR mengesahkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, mendesak semua lembaga negara dan pemerintahan untuk menghormati, menjunjung tinggi dan menyebarluaskan pengetahuan tentang hak asasi manusia. Saya menginstruksikan Anda untuk membiarkan saya.

HAM adalah kebutuhan dasar manusia. Hak asasi manusia merupakan hak tumbuhan, pemberian dari Tuhan. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, dan tanpanya manusia tidak dapat hidup seperti manusia. Hak-hak ini diperoleh bersamaan dengan kelahiran dan partisipasi dalam kehidupan komunal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, lembaga, mandat undang-undang, atau lainnya. Akibatnya, tidak ada satu karakter atau faksi pun yang dapat menerimanya. Ini sepenuhnya didasarkan pada konsep bahwa memperjuangkan hak asasi manusia adalah tugas suci dan anugerah bagi umat manusia.

Pemerintah Indonesia melihat Indonesia sebagai

negara dengan nilai-nilainya sendiri dan melihat hak asasi manusia sebagai penemuan Barat. Di sisi lain, Indonesia memiliki banyak pengaruh politik dan kriminal karena ternyata menjadi anggota PBB. Akibatnya, Indonesia bertanggung jawab secara pidana untuk menyatakan hak asasi manusia.

### 1. Catatan Hak Asasi Manusia Global (HAM)

Western International (Eropa) adalah perusahaan pertama yang berbicara tentang hak asasi manusia, dengan Inggris menjadi suara terdepan dalam seruan tersebut, membangun sejarah hak asasi manusianya. Di Inggris ada para pencari kebenaran yang mengadvokasi ide-ide dan merumuskan hak-hak kodrati, seperti John Locke pada abad ke-17. Catatan perkembangan HAM di dunia Barat ditandai dengan tiga peristiwa besar: Magna Carta, pecahnya Revolusi Amerika,

dan Revolusi Perancis.

## 2. Liberium Piagam Magna Inggris (1215)

Sejarah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan kepada para bangsawan dan keturunannya bahwa mereka tidak akan memenjarakan mereka sebelum diadili. Sebagai imbalan membantu mengumpulkan dana, Kerajaan memberikan jaminan yang dikenal sebagai Magna Chart Liberium. Jaminan atau perjanjian yang dibuat pada masa pemerintahan Raja John pada tahun 1215 Masehi.

Setelah itu, para bangsawan meminta jaminan. Karena, sementara sebagian besar raja dalam sejarah melakukan apa yang mereka suka dan membuat hukum mereka sendiri, raja kebal terhadap peraturan. Hampir semua aturan dibuat atas kehendak raja. Sementara pengalaman menunjukkan bahwa Piagam Magna tidak berlaku untuk semua orang, dan hanya untuk aristokrasi, Piagam Magna merupakan tonggak awal dalam

meningkatkan hak asasi manusia di seluruh dunia. tidak dapat disangkal.

### 1. Revolusi Amerika (Bagian Sejarah HAM 1776)

Revolusi Yankee tahun 1776 adalah perjuangan orang Amerika melawan penjajah Inggris. Akibat revolusi ini, Amerika memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1776. Pada tahun yang sama, kami membuat sejarah dengan membela hak asasi manusia. Dengan kata lain, ia memasukkan kebijakan hak asasi manusia ke dalam hukum negara. Hak asasi manusia di Amerika Serikat lebih kompleks daripada hak asasi manusia di Inggris. Faktanya, hak asasi manusia masih dijunjung tinggi hingga saat ini baik oleh penguasa maupun masyarakat.

### 2. Revolusi Perancis (1789)

Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Yankee ketika Amerika melawan penjajah Inggris untuk memenangkan kemerdekaannya dan

memperoleh kemerdekaan dan hak. Berbeda dengan Revolusi Prancis, di mana rakyat berperang melawan raja pribadi, Louis XVI. Hal itu dilakukan oleh rakyat Prancis dengan maksud agar raja bertindak sembarangan dan bersikap mutlak terhadap rakyat. Revolusi Prancis setidaknya menciptakan pedoman hak-hak, terutama hak atas kebebasan, hak atas kesetaraan, dan hak atas persaudaraan.

a. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia (HAM)

Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral dan sangat baik dalam memperjuangkan dengan sepenuh hati dan menjaga eksistensi bangsa dan kerajaan. Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk kemanusiaan dalam hukum. bergabung dengan negara lain. Karena itu sangat mendasar. Pancasila sebagai inspirasi bangsa Indonesia sangat membantu dan mendukung pelaksanaan hak asasi manusia. Pada masa awal

kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Mohammad Hatta adalah salah satu pembela hak asasi manusia yang paling vokal. Indonesia harus melalui beberapa langkah untuk mendapatkan hak-hak nasional. Salah satunya adalah dia memulai bisnis. Organisasi yang dihasilkan mencakup banyak orang yang mengakui bahwa mereka memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dijalankan.

Perusahaan-perusahaan yang didirikan memperjuangkan hak asasi manusia dengan cara yang luar biasa, namun pada dasarnya bertujuan sama: pemberantasan penjajahan di bumi Indonesia. Agar rakyat Indonesia dapat memenuhi hak asasinya dan menjadi manusia yang mutlak.

b. Sejarah Penegakan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Tahun 1945-1950 adalah setelah Indonesia lepas dari Belanda dan menjadi adil secara hukum. Saat ini, Indonesia sedang memperjuangkan hak



asasi manusia terkait dengan isu kemerdekaan dan membatasi ekspresi dan pendapat publik. Tahun 1950-1959, ketika hak asasi manusia mulai dilaksanakan secara efektif, ditandai dengan banyaknya partai politik dengan ideologinya masing-masing, dan faksi-faksi bebas menampilkan statistik sirkular.

Dari tahun 1966 hingga tahun 1998, selama tiga puluh tahun masa jabatan Presiden Suharto, pihak berwenang menjadi begitu protektif di beberapa titik selama periode ini sehingga pers tidak lagi diberi ruang untuk bergerak. Saat ini banyak terjadi pelanggaran HAM. 1998 – Sekarang di era pasca Reformasi, jatuhnya rezim Suharto. Belha mencermati langkah-langkah yang diambil selama pembentukan Orde Baru untuk memastikan hal itu tidak terulang kembali. Sekalipun kolonialisme fisik hilang dari muka bumi, sejarah panjang penghormatan terhadap hak asasi manusia

tidak akan pernah berakhir. . Tentu saja, kita harus berjuang untuk membela hak asasi manusia. Kemudian orang dapat hidup dengan benar dan sepenuhnya. Sejarah HAM mengajarkan kepada kita bahwa kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan harus diperjuangkan. Tentu saja, kita dapat melakukan banyak penelitian dengan catatan hak asasi manusia. Kami optimis akan menjadi manusia seutuhnya.

Komunitas serikat sebagai kelompok pertama, Timor Timur (Cina, Indo-Arab) sebagai kelompok kedua, Irlandia sebagai kelompok 1/3. Perlakuan manusiawi yang sepenuhnya berdasarkan diskriminasi ini bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Dalam situasi seperti itu, sosok prajurit diminta untuk mengangkat satu jari.

Hak asasi manusia yang diabadikan dalam Konstitusi PBB. Sejak itu telah dimasukkan ke

dalam piagam dan hukum Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Negara Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai ketika para founding fathers ingin merumuskan gagasan kebangsaan. Mereka sepakat bahwa Amerika Serikat harus bertanggung jawab untuk menerapkan kemanusiaan yang sederhana dan beradab. Isi struktur hak asasi manusia dalam Piagam dan Peraturan Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Metode Pancasila

Seluruh perangkat peraturan Yayasan Pancasila menjelaskan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia warga negara Indonesia. Dikutip Prof.Dr.setelah Ismail Sunni. H. Superman Usman, S.H. Pancasila yang termuat dalam alinea ke-4 Piagam 1945 memuat pengakuan penuh terhadap hak asasi manusia.

2) UUD 1945

Dalam UUD 1945, muatan HAM terkandung dalam pembukaan dan teks.

3) TAP MPR No. II/MPR/1998

Isi HAM tertulis dalam Pasal 1

4) Dua pilihannya dalam Keppres No. 50 Tahun 1993 dan Keppres No. 181 Tahun 1998 merupakan dasar pidana pembentukan Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

5) UU No 9 Tahun 1998

Adapun pengesahan kemerdekaan secara resmi, dengan diundangkannya Ordonansi ini memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk menyatakan keinginan dan pendapatnya tentang keadaan sosial dan keadaan Negara Kerajaan Indonesia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. meningkat.

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konferensi Penyiksaan dan Penghukuman Kejam.

7) Keputusan No. 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini merupakan implementasi dari Ketetapan MPR dan diundangkannya undang-undang ini seperti jaminan tersendiri bagi warga.

- 8) Di Pengadilan HAM, putusan Pengadilan didasarkan terutama pada peraturan yang ada, khususnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam Teori Hukum Kodrat.

HAM dari Indonesia diperkenalkan di AS. Merumuskan dasar-dasar Kerajaan dan berkembang hingga saat ini. detik. sebuah. Hal itu dapat memberikan keadilan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. , periodisitas perubahan pedoman dan kebijakan hukum menggarisbawahi pentingnya mengeksplorasi opsi di semua bidang masalah hak asasi manusia. Dijamin dengan produk kejahatan yang diproduksinya. Sejarah perbaikan hak asasi manusia terkait dengan pelajaran dari regulasi. Negara yang sepenuhnya mengatur membutuhkan jaminan hak asasi manusia. Jaminan ini termasuk dalam Piagam Kerajaan Indonesia Di kalangan sarjana hukum, ada tiga teori utama

yang menjelaskan asal muasal munculnya gagasan tentang hak asasi manusia.

Yang dianggap paling otoritatif dalam mendefinisikan prinsip-prinsip dasar pengaturan alam adalah John Locke dan JJ Rousseau. John Locke menganjurkan gagasan bahwa setiap manusia secara alami dianugerahi hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan properti, yang menjadi miliknya dan tidak dapat diambil oleh negara. Perlindungan hak yang tidak dapat dialihkan dipercayakan kepada kerajaan melalui piagam atau anggaran dasar. Jika penguasa suatu bangsa mengabaikan kontrak sosial, rakyat bebas untuk menggulingkannya dan menggantikannya dengan otoritas pusat yang siap dikagumi. Sedikit berbeda dengan John Locke, J.J. Rousseau menekankan bahwa hak herba membentuk kedaulatan warga negara secara keseluruhan, bukan laki-laki atau perempuan. Semua hak yang berasal dari hukum kodrat dapat diberikan kepada warga negara sebagai satu kesatuan. Intinya, teori pengaturan alam melihat hak asasi manusia yang diberikan Tuhan sebagai

bagian dari sifat manusia. Ketika manusia lahir, mereka dikaitkan dengan hak asasi manusia, dan hak tidak dapat diganti atau dihilangkan, tanpa memandang latar belakang spiritual, etnis, keanggunan sosial, atau orientasi seksual.

### 1. Konsep positivism atau utilitarianisme

Menurut Jeremy Bentham, gaya hidup manusia ditentukan oleh sebab atau kegunaan agar dapat membahagiakan banyak orang. Hak maupun hukum perangkat lunak ditentukan oleh apakah hak atau hukum itu demi kepentingan terbaik umat manusia. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut dapat hilang ketika bertentangan dengan kesejahteraan berbagai jenis orang. Dengan kata lain, selera individu harus menjadi objek hiburan sosial. Karena pandangan ini berlaku bagi banyak orang, cara berpikir positifis juga dikenal sebagai konsep utilitarianisme.

### 2. Konsep Keadilan

Prinsip keadilan muncul dari kritik

terhadap teori positivis. Mereka yang mengobarkan prinsip keadilan adalah Ronald Drowkin dan John Rawls. Mendasari teori Drowkin adalah bahwa kerajaan memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara setara. Artinya, negara menggunakan nilai-nilai moral, kekuatan, dan landasan lainnya sebagai dalih untuk meniadakan hak asasi manusia, kecuali prinsip pemulihan yang sama. Di sisi lain, menurut Rawls, setiap tokoh memiliki hak serta kebebasan yang sama. Tetapi, hak dan kebebasan tersebut seringkali tidak dibagi. Misalnya, setiap orang berhak atas pendidikan, tetapi kenyataannya tidak ada yang menikmati hak tersebut karena kemiskinan. Untuk mengatasi kesulitan ini, Rawls memperkenalkan prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya yang tepat dalam masyarakat harus didahulukan.



### **C. Macam-Macam Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Semua orang Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok tertentu, memiliki hak asasi manusia yang sama. Martabat manusia pertama kali dibahas di Inggris pada tahun 1215 ketika Magna Carta disusun. Magna Carta sendiri dibentuk sebagai tanggapan atas kesewenang-wenangan Raja John dalam menetapkan tarif pajak. Sebuah RUU muncul pada tahun 1689, yang masih HAM, secara sewenang-wenang menggulingkan tirani kerajaan. Hak asasi manusia ada saat ini berkat Klaim Hak Asasi Manusia atau UDHR yang luas, yang perlu mencakup semua hak asasi manusia.

Deklarasi Hak Asasi Manusia pertama yang diketahui dibuat oleh Eleanor Roosevelt, Ibu Negara Britania Raya, pada tahun 1948. Maklumat hak asasi manusia yang biasa ini adalah jawaban atas kekejaman sisa-sisa Perjuangan Global 2, yang menimbulkan banyak korban, termasuk hilangnya nyawa dan trauma.

Dilihat dari catatannya, hak asasi manusia yang terus diulang-ulang oleh orang-orang terkini datang dari

Barat. Namun, banyak yang setuju bahwa konsep perlindungan martabat manusia, termasuk hak memeluk agama, berlaku di Indonesia. Menemukan keyakinan adalah kebebasan setiap warga negara. Artinya, pemahaman belum tentu diwariskan dari ibu dan bapak. Ada banyak jenis hak asasi manusia, tetapi semuanya terkait dengan tiga kriteria ini.

1. Hak adalah hal yang umum dan tidak dapat diambil dari kita semua. Namun hak kebebasan mudah dilanggar ketika seseorang melakukan kesalahan seperti mencuri.
2. Adanya saling ketergantungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Misalnya mereka yang berhak mengenyam pendidikan, mereka yang bisa bekerja setelah lulus, dll.
3. Tidak ada kasta dalam membela hak asasi manusia. Semua memiliki hak istimewa yang sama serta karena itu sama di depan hukum.

Seluruh Amerika Serikat harus mematuhi 3M

sebagai upaya melindungi hak asasi warga dinegaranya. M. memiliki keraguan dalam menghormati, membela dan menikmati berbagai institusi yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Misalnya, negara menyediakan jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan kritik terhadap pemerintah.

Dalam masyarakat, batas hak asasi manusia bagi setiap orang adalah kebebasan orang lain, yang berarti tidak saling mengganggu. Kebebasan berbicara, misalnya, harus mempertimbangkan kekuatannya untuk menjamin kehidupan yang aman bagi tetangganya. Saat ini, tidak jarang banyak orang mengkritik sesuatu atas nama hak asasi manusia, tetapi lupa apakah perkataannya merugikan orang. Semua manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, jadi ini harus diperhitungkan. Macam-Macam Hak Asasi Manusia dibagi ketiga konsepnya seperti yang sebelumnya disebutkan, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berikut beberapa contohnya.

## 1. Hak Pribadi

Hak individu meliputi hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk menganut agamanya, hak untuk mempraktikkan agamanya, dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki beberapa masalah pribadi.

- a) kehidupan.
- b) Hak untuk menyampaikan kritik khusus dalam forum diskusi. Tetapi hanya jika kritik itu diungkapkan tanpa menyakiti orang lain.
- c) Kebebasan memilih agama sesuai dengan cita-cita.

Dengan kata lain, ketika orang lain mengubah keyakinan Anda, diam, atau menekan Anda untuk berhenti hidup, Anda telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. , harus

memperhatikan hukuman sesuai dengan peraturan nasional.

## 2. Hak Politik

Politik adalah kewenangan semua orang, bukan hanya pejabat atau orang-orang dari partai politik tertentu. Komponen otoritas politik adalah:

- a) Kekuasaan untuk bertindak sebagai warga negara
- b) Otoritas untuk memilih atau dipilih.

Hanya satu contoh pemilihan 5 tahunnya di mana banyak pelamar untuk kampanye pemasaran mengundang kita sebagai warga negara untuk memilih. Namun ternyata pemilu bukanlah kewajiban dan merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan pemimpin yang memenuhi standar tertinggi.

## 3. Hak Ekonomi

Sistem keuangan adalah aspek kehidupan yang paling penting karena mendukung

kelangsungan hidup manusia di setiap kesempatan. Beberapa hak asasi manusia yang berhak mendapatkan perlindungan dalam otoritas disiplin keuangan, antara lain:

- a) Hak untuk memiliki, memperoleh, dan mengejar kekayaan tanpa menyakiti atau merugikan orang lain.
  - b) Bebas memilih tugas asalkan sesuai dengan kompetensi yang ada.
  - c) Memiliki kewenangan untuk menjual, membeli atau menyewakan barang atau jasa tertentu.
  - d) Tentu saja, sebagai individu, masalah keuangan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saya. Suka atau tidak suka, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk diberdayakan dari perspektif keuangan ini. berdiri di hadapan hukum
- Hak asasi manusia lainnya terkait dengan

hukum, satu-satunya pedoman adalah persamaan di depan hukum. Setiap warga negara seharusnya disamakan perlakuannya di mata hukum, tanpa memandang pekerjaan, agama atau suku.

Jika setiap orang bisa jujur, tidak akan ada cacat hukum dan tidak ada hukuman yang tidak adil bagi yang kaya dan yang miskin. Iri hati dihancurkan bersama dengan perintah penegakan hukum, dan kepatuhan orang menegakkan hukum dalam hidup mereka.

#### 4. Kehidupan Sosial dan Budaya

Akhirnya, berbagai jenis hak asasi manusia relevan dengan kehidupan sosial dan budaya. Isinya terkait dengan kehidupan sosial seperti:

- a) Hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya tertentu menurut kebiasaan.
- b) Melindungi karya berhak cipta,

termasuk memberlakukan undang-undang hak cipta untuk semua artis.

- c) Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan termasuk dalam bidang sosial budaya Indonesia. Setelah memahami pernyataan tersebut, Anda kini semakin memahami tentang definisi hak asasi manusia bagi manusia serta warga negara Indonesia. menjamin kelangsungan hidup

Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia  
Agar lebih dekat dalam mendalami mengenai hak asasi manusia, berikut adalah beberapa contoh menurut berbagai kategori.

#### 1) Dalam Dunia Pendidikan

Yang pertama menyangkut aspek pendidikan dimana setiap anak berhak mengikuti program wajib belajar sampai dengan usia 12 tahun



atau sekolah menengah atas. Institusi pendidikan, baik metropolitan maupun terpencil, tidak boleh dibeda-bedakan dengan alasan apapun.

## 2) Memeluk Agama

Contoh kedua tentang hak asasi manusia menyangkut kepercayaan atau agama. Misalnya, Aria lahir dari keluarga campuran, ibunya beragama Islam dan ayahnya beragama Kristen. Arya memiliki kebebasan untuk percaya pada salah satu agama atau memilih salah satu.

## 3) Hak dan Kewajiban

Selain hak asasi manusia, orang juga mengakui kewajiban mereka. Sementara itu, hak dan kewajiban harus hidup berdampingan dan tidak tumpang tindih. Misalnya, penyewa rumah berhak untuk hidup nyaman di semua fasilitas selama memenuhi kewajiban sewa/pembayarannya.

Hak Asasi Manusia dalam Pasal 27 sampai 34 UUD 1945  
Penghormatan terhadap hak asasi manusia tertuang dalam UUD

1945, yang terdiri dari Pasal 27 sampai dengan 34. Paling banyak Pasal 28 pembagiannya dimulai dengan Pasal 28A sampai dengan 28J yang masing-masing memuat definisi khusus tentang hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 29 memiliki alinea yang berbunyi Kebebasan bagi semua orang untuk menganut agamanya. Kebebasan ini berarti Anda tidak dipaksa untuk menganut agama tertentu karena latar belakang orang tua Anda.

Melanjutkan pasal 31 dst, bagian terakhir adalah bahwa hak hidup fakir miskin serta anak terlantar seharusnya dijamin melalui negara. Saya telah mengkonfirmasi itu

Nah, sebagai orang dewasa, kita semua perlu menyadari hal ini dan mempraktikkannya dalam hidup kita. Hak asasi manusia mutlak ada pada setiap manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa hak asasi manusia, merupakan anugerah Tuhan kepada ciptaan, tidak dapat atau tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pribadi seseorang atau laki-laki atau perempuan. Hak asasi manusia tidak bisa dilaksanakan dengan kekerasan atau cara lain.

Apabila hal itu terjadi maka akan berdampak pada manusia, dengan kata lain akan kehilangan harkat dan martabat manusia yang merupakan nilai hakiki manusia. Namun demikian, tidak berarti bahwa keyakinan terhadap HAM dapat dilakukan secara terbuka, karena bisa melanggar HAM orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga dianggap mempunyai nilai yang sama. Nilai-nilai populer menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mengenal batas-batas wilayah dan waktu, dan nilai-nilai universal ini digunakan untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan melalui berbagai nilai kemanusiaan. Ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai produk kejahatan negara nasional. Nilai yang meresap ini juga tercermin dalam instrumen global, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun fakta menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tradisional tidak lagi diterapkan secara seragam. Karena keberadaan hak asasi manusia menempel, mendukung dan melekat pada individu

sejak manusia lahir, hak-hak dalam hak asasi manusia memiliki prinsip dan status atau tingkat pertama kehidupan sosial. Saat itu juga muncul kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Oleh bangsa-bangsa, ketetapan, penguasa dan semua umat manusia, demi kehormatan dan keamanan martabat manusia. Dalam hal ini, negara harus memiliki ketentuan hak asasi manusia untuk melindungi setiap laki-laki atau perempuan yang berhak mendapatkan kewarganegaraan. diri. . Berdiri dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh cara hidup manusia. besar.

Hak adalah hak asasi manusia. dimiliki semua orang karena mereka adalah manusia. Kemanusiaan sekarang diberikan kepadanya dengan bantuan masyarakat atau sepenuhnya didasarkan pada pedoman yang baik, tetapi sepenuhnya didasarkan sepenuhnya pada martabatnya sebagai manusia. hak-hak ini bersifat reguler dan tambahan tidak dapat dikesampingkan. Teknik ini adalah bahwa tidak peduli seberapa buruk obat yang telah dibuat dengan bantuan penggunaan seseorang atau tidak peduli seberapa

kejam obatnya, seseorang tidak akan menyelamatkan Anda sebagai manusia dan akibatnya masih memenuhi hak-haknya. Hak itu terhubung dengannya sebagai individu. setiap orang memiliki kewajiban kepada komunitas di mana dia dapat membesarkan pria atau wanitanya secara penuh dan bebas dalam menjalankan kebebasan dan hak mereka, kita semua mungkin baik-baik saja mengingat kendala yang diputuskan dengan bantuan penggunaan aturan untuk satu-satunya alasan memastikan popularitas hak dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memuaskan keinginan sederhana dalam subjek elegan kesopanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam demokrasi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan kebebasan dan hak ini dengan cara yang ciri dan pemikiran negara-negara Amerika Serikat. Dapat dipahami bahwa di manapun seseorang hidup baik secara utuh maupun singkat dengan berbagai kemampuan, khususnya kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada disekitarnya dalam hal pelarangan hak-haknya sebagai

manusia seutuhnya. Dalam contoh ini, penekanannya adalah pada lingkup terdekat, bersamaan dengan etnisitas; adat istiadat dan nilai serta norma yang tidak tertulis.

Intinya, pemerintah vital adalah yang pertama bertanggung jawab atas kewajiban untuk menerapkan hak asasi manusia global di pedesaan. tindakan pemerintah publik yang melanggar hukum, termasuk yang dilakukan dengan bantuan pemerintah daerah, adalah kewajiban negara bahkan jika tindakan tersebut berada di luar otoritas pidana mereka atau bertentangan dengan undang-undang dan instruksi rumah tangga. Namun, pada saat yang sama sebagai otoritas kritis dengan tanggung jawab utama, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya daalam hal penegakan hak asasi manusia. Di dalam masalah ini letak pemerintahan kelurahan karena perwakilan penguasa di tempat tersebut merupakan pelengkap pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia.

HAM sendiri diproklamirkan secara universal pada

10 Desember 1948, sekitar tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia dari Amerika Serikat (PBB). Pengumuman hak asasi manusia secara publik (adat human rightsdeclaration) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak asasi manusia yang mendasar kepada setiap orang di bidang ini. Secara terpisah, Deklarasi Hak Asasi Manusia juga dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan kepada hak asasi manusia di antara masyarakat dunia setiap saat.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak menurut Dzat Yang Maha Esa yang memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yang wajib pada jaga, pada hormati sabg siapapun terhadap siapapun tidak melihat status sosial, kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Pada nyatanya hak ini adalah suatu hak yang memang sebagai hal yang berharga dalam diri manusia. Hak asasi manusia merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg

terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Selain itu, ada istilah pelanggaran HAM berat yang memiliki banyak arti, seperti pelanggaran berat dan sistematis, kejahatan paling serius, pelanggaran berat, pelanggaran berat.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak menurut Tuhan Yang Maha Esa yg memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yg wajib pada jaga, pada hormati sang siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang memang sebagai hal yg berharga dalam diri insan. Hak asasi insan merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Hak asai insan ini berlaku dimanapun, kapanpun, & sang siapapun. HAM ini, sangat penting untuk di junjung tinggi, dan di hargai keberadaan



nya. Hal ini karena, manusia mempunyai hak untuk hidup layaknya manusia yang lain tanpa batasan, dan sudah seharusnya manusia itu mempunyai hak untuk tidak di perlakukan semena mena oleh manusia lainnya. Ini mengapa, hak asasi manusia perlu di sadari keberadaannya, dan di lindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUUXIII/2015 menegaskan, di satu sisi, pentingnya upaya penegakan HAM yang tegas sebagai perkara pidana dengan ciri khusus yang memerlukan penanganan yang tepat, dengan demikian juga mengikutsertakan kepentingan masyarakat luas (keadilan sosial).

## **Latihan**

1. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai HAM!
2. Dalam UUD 1945 HAM diatur didalam pasal berapa?jelaskan dan sebutkan!
3. Bagaimanakah sejarah HAM di Indonesia?
4. Sebutkan macam-macam HAM!
5. Apakah yang dimaksud hak pribadi?

## 1. 3. Penutup

### A. Rangkuman

Hak adalah hak asasi manusia. dimiliki semua orang karena mereka adalah manusia. Kemanusiaan sekarang diberikan kepadanya dengan bantuan masyarakat atau sepenuhnya didasarkan pada pedoman yang baik, tetapi sepenuhnya didasarkan sepenuhnya pada martabatnya sebagai manusia. hak-hak ini bersifat reguler dan tambahan tidak dapat dikesampingkan. Teknik ini adalah bahwa tidak peduli seberapa buruk obat yang telah dibuat dengan bantuan penggunaan seseorang atau tidak peduli seberapa kejam obatnya, seseorang tidak akan menyelamatkan Anda sebagai manusia dan akibatnya masih memenuhi hak-haknya. Hak itu terhubung dengannya sebagai individu. setiap orang memiliki kewajiban kepada komunitas di mana dia dapat membesarkan pria atau wanitanya secara penuh dan bebas dalam menjalankan kebebasan dan hak mereka, kita semua mungkin baik-baik saja mengingat kendala yang diputuskan dengan bantuan penggunaan aturan untuk satu-

satunya alasan memastikan popularitas hak dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memuaskan keinginan sederhana dalam subjek elegan kesopanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam demokrasi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan kebebasan dan hak ini dengan cara yang ciri dan pemikiran negara-negara Amerika Serikat. Dapat dipahami bahwa di manapun seseorang hidup baik secara utuh maupun singkat dengan berbagai kemampuan, khususnya kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada disekitarnya dalam hal pelarangan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Dalam contoh ini, penekanannya adalah pada lingkup terdekat, bersamaan dengan etnisitas; adat istiadat dan nilai serta norma yang tidak tertulis.

## **B. Tes Formatif**

1. Hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah...
  - a. Hak Alam

- b. Hak warga negara
  - c. Hak asasi manusia
  - d. Hak penduduk
  - e. Hak dan kewajiban mendasar
2. Secara hukum mengurangi, merintang, membatasi dan/atau meniadakan, baik sengaja atau lalai, oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk otoritas Negara, hak asasi manusia yang dijamin secara hukum dari seseorang atau sekelompok orang; tindakan. Menerima, atau takut menerima, kesepakatan pencapaian hukum yang adil dan akurat berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku adalah pentingnya...
- a. Pelanggaran hak asasi manusia
  - b. Kelalaian hak asasi manusia
  - c. Pelanggaran hukum
  - d. Perbuatan hukum

e. Peristiwa hukum

3. Hak asasi manusia dalam UUD 1945...

a. 24 ayat 1

b. 25A

c. 26 ayat 2

d. 27 ayat 3

e. 28 A-J

4. Perhatikan data berikut:

i. Sikap egois

ii. Penyalahgunaan kekuasaan

iii. Rendahnya kesadaran HAM

iv. Intoleransi

v. Penyalahgunaan teknologi

Dari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM adalah...

- a. 1), 2), 3)
- b. 1), 2), 4)
- c. 1), 3), 4)
- d. 2), 3), 5)
- e. 3), 4), 5)

5. Langkah-langkah berikut belum diambil oleh pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia ...

- a. Pembentukan komisi nasional HAM
- b. Pembentukan undang-undang HAM
- c. Pembentukan peradilan HAM
- d. Membentuk mahkamah HAM

## e. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional

### C. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sesudah tes formatif, bandingkanlah jawaban saudara dengan jawaban diakhir bab ini. Apabila saudara mendapatkan jawab minimal 80% soal tes formatif dengan benar, saudara dinyatakan lulus. Namun jika tingkat akurasinya kurang dari 80%, silahkan cek penjelasan pada bab sebelumnya dan centang bagian yang belum saudara kuasai dengan benar.

### D. Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. E
4. C
5. D

## BAB 2

### Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia

#### 2. 1. Pendahuluan

Hak asasi insan merupakan suatu hak menurut Tuhan Yang Maha Esa yg memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yg wajib pada jaga, pada hormati sang siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Hak asasi insan merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Hak asai insan ini berlaku dimanapun, kapanpun, & sang siapapun. Sehingga hak asasi insan ini pada sebut menjadi Hak yg Universal. Pelanggaran HAM berat mengacu pada dua konsep utama:

Pertama, pelanggaran prinsip non-transferable rights



atau pelanggaran norma-norma yang ditaati oleh suatu negara atau lembaga negara kepada warga negaranya. Hak yang dimiliki manusia tidak dapat diambil, terdapat dalam hak apapun termasuk hak berpolitik. Bangsa-bangsa di seluruh masyarakat internasional dan tidak boleh dilanggar atau dikurangi, jika lebih banyak bangsa di dunia yang setuju Itu adalah norma yang hanya dapat diubah oleh Terima dan akui berbagai norma yang Anda ikuti. Kedua, pelanggaran HAM berat terjadi ketika negara mengizinkan atau benar-benar melakukan kejahatan berat. (Serious crime) atau kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yg sudah disepakati menjadi tindak kejahatan internasional (international crimes), & atau negara tadi gagal atau nir mau menuntut pertanggungjawaban berdasarkan aparat pelaku tindak kejahatan tadi. Padahal mengadili para pelaku kejahatan internasional adalah keharusan absolut bagi warga dunia (obligatio erga omnes) lantaran para pelaku tadi adalah musuh beserta manusia. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor

eksternal. Suatu negara dianggap gagal melindungi hak asasi manusia ketika hak asasi manusia dilanggar. Menurut Human Rights Careers, ketika pejabat pemerintah tidak mengambil tindakan untuk melindungi individu dan kelompok yang rentan, mereka terlibat dalam pelanggaran hak. Menurut aturan Indonesia sendiri.

### **A. Deskripsi Singkat**

Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Akan di jelaskan terkait dengan makna dari hak asasi manusia itu sendiri, makna dari pelanggaran hak asasi manusia, macam macam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan faktor faktor penyebab hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang yg wajib pada jaga, pada hormati sang siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia adalah suatu bentuk pelanggaran yang mana mengancam daripada hak yang seharusnya manusia

dapatkan ketika dia hidup di Dunia, seperti hak untuk hidup, hak dalam kemasyarakatan, dll nya. Semuanya akan kita bahas, dalam Bab 2 Buku ini yaitu, Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

## **B. Relevansi**

Pada bab 2 ini, memiliki relevansi pada mata pelajaran PPKn kelas X. Yang mana membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yang tentunya sangat berhubungan dengan materi Hak Asasi Manusia dalam mata pelajaran PPKn kelas X ini. Membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang pastinya siswa kelas X harus mendapatkan pengetahuan tersebut.

## **C. Kompetensi/ Tujuan**

1. Agar siswa dapat memahami makna pelanggaran hak asasi manusia
2. Agar siswa dapat mengetahui macam macam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
3. Agar siswa dapat mengidentifikasi faktor faktor

yang melatarbelakangi tumbuhnya pelanggaran HAM di Indonesia.

#### **D. Petunjuk Belajar**

1. Sub bab A Materi Memahami Pelanggaran Hak Asasi Manusia
2. Sub bab B Materi Macam Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
3. Sub bab C Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia
4. Soal latihan kelas X
5. Contoh Soal
6. Latihan Soal
7. Rangkuman
8. Tes Formatif
9. Kunci Jawaban Tes Formatif

## **2. 2. Penyajian**

### **A. Memahami Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) juga dianggap mempunyai nilai yang sama. Nilai-nilai populer

menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mengenal batas-batas wilayah dan waktu, dan nilai-nilai universal ini digunakan untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan melalui berbagai nilai kemanusiaan. Ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai produk kejahatan negara nasional. Nilai yang meresap ini juga tercermin dalam instrumen global, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun fakta menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tradisional tidak lagi diterapkan secara seragam. Karena keberadaan hak asasi manusia menempel, mendukung dan melekat pada individu sejak manusia lahir, hak-hak dalam hak asasi manusia memiliki prinsip dan status atau tingkat pertama kehidupan sosial. Saat itu juga muncul kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Oleh bangsa-bangsa, ketetapan, penguasa dan semua umat manusia, demi kehormatan dan keamanan martabat manusia. Dalam hal ini, negara harus memiliki ketentuan hak asasi manusia untuk melindungi setiap laki-laki atau perempuan yang

berhak mendapatkan kewarganegaraan. diri. . Berdiri dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh cara hidup manusia. besar.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak menurut Dzat Yang Maha Esa yang memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yang wajib pada jaga, pada hormati sabg siapapun terhadap siapapun tidak melihat status sosial, kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Pada nyatanya hak ini adalah suatu hak yang memang sebagai hal yang berharga dalam diri manusia. Hak asasi manusia merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Selain itu, ada istilah pelanggaran HAM berat yang memiliki banyak arti, seperti pelanggaran berat dan sistematis, kejahatan paling serius, pelanggaran berat, pelanggaran berat. Istilah pelanggaran HAM berat mengacu pada dua konsep utama:

Pertama, pelanggaran prinsip non-transferable rights atau pelanggaran norma-norma yang ditatti oleh suatu negara atau Lembaga negara kepada warga negaranya. Hak yang tidak dapat dicabut adalah hak yang utuh termasuk dalam sipil maupun politik. Bangsa-bangsa di seluruh masyarakat internasional dan tidak boleh dilanggar atau dikurangi, jika lebih banyak bangsa di dunia yang setuju Itu adalah norma yang hanya dapat diubah oleh Terima dan akui berbagai norma yang Anda ikuti. Kedua, pelanggaran HAM berat terjadi ketika negara mengizinkan atau benar-benar melakukan kejahatan berat. Padahal mengadili para pelaku kejahatan internasional adalah keharusan absolut bagi warga dunia (*obligatio erga ormes*) lantaran para pelaku tadi adalah musuh beserta manusia. Selain konsep pelanggaran hak asasi insan berat misalnya yg disebutkan pada atas, pada global internasional jua timbul konsep pelanggaran hak asasi insan berat yg asal berdasarkan putusanputusan pengadilan hak asasi insan. Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nuremburg, Tokyo,

Yugoslavia, & Rwanda sudah membangun kebiasaan-kebiasaan yg diakui sang warga internasional. Selain itu Statuta Roma jua sebagai asal krusial pada perkembangan & pengaturan mengenai pelanggaran hak asasi insan berat pada global internasional. Putusan Pengadilan Nuremberg contohnya melahirkan suatu kebiasaan mengenai tanggung jawab individual pada masalah pelanggaran hak asasi insan berat.

Dalam banyak peristiwa yang menyebabkan pelanggaran HAM, manusia Indonesia (jaringan, perangkat negara, aparat penegak hukum) memahami apa yang secara jelas tersirat dalam HAM mereka (terdiri dari tanggung jawab dasar mereka). menunjukkan bahwa peraturan dan pedoman Hak Asasi Manusia tidak lengkap dan tepat, tetapi paling berharga bila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pedoman perundang-undangan harus dan harus dilaksanakan dan ditegakkan. Sistem hukum yang tidak memihak yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang sesuai, dan



mengikuti taktik kriminal yang ideal. Hak asasi manusia berjalan dengan baik Ketika setiap manusia atau warga negara mengingat tanggung jawabnya dan aktivitas fisik haknya. Hak asasi manusia bekerja dengan sangat baik ketika semua orang mengakui bahwa ada manusia berbeda yang memiliki hak yang sama dengan mereka. Sederhananya, hak asasi manusia itu efektif sementara hak asasi kita dilanggar melalui hak orang lain. Hukum merupakan alat penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia Indonesia. Hak orang dapat melukis lebih tinggi atau lebih baik ditegakkan dalam kehidupan demokrasi, karena demokrasi biasanya menetapkan pedoman hukum dalam praktek negara dan terus menghormati hak-hak warga negaranya. Bangsa dan warga mengambil bagian dalam membentuk kebijakan publik.

Pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran hak asasi insan nir dimintakan pada individu. Meskipun demikian si individu tadi nir tanggung berdasarkan tanggung jawab (al-Rahab, 2016:23). Artinya individu permanen

bisa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukannya & nir mampu berlindung lantaran menjalankan perintah negara. Dengan demikian siapapun individu yang melakukan pelanggaran wajib diproses sinkron menggunakan prosedur aturan nasional ataupun aturan internasional. Pasal 16 yang ada di UUD memberikan kejelasan yaitu bahwa pelanggaran HAM merupakan suatu bentuk dari kelalian berbagai macam pihak yang melanggar HAM. Untuk mencapai penegakan oleh pengadilan hak asasi manusia harus diupayakan melalui jalur pro-justicia. Hal ini tertuanh dalam pasal 104 (1) yang berbunyi :

“Dalam peradilan, diadakan pembentukan pengadilan HAM sebagai upaya untuk memberikan keadilan pelanggaran tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUUXIII/2015 menegaskan, di satu sisi, pentingnya upaya penegakan HAM yang tegas sebagai perkara pidana dengan ciri khusus yang memerlukan penanganan yang tepat, dengan demikian juga

mengikutsertakan kepentingan masyarakat luas (keadilan sosial) [Kristen, 2018:239]. Indonesia, memiliki peraturan pemerintah untuk melindungi korban pelanggaran HAM berat. Adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat. Pasal 4 menyebutkan bahwa ada tiga model perlindungan korban dan saksi. Kerahasiaan identitas korban dan saksi. Memberikan keterangan dengan sengaja tanpa tatap muka selama pemeriksaan di pengadilan.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Pemulihan dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat. Para pihak bertemu dan memulihkannya. Kedua perintah pemerintah ini menunjukkan bahwa upaya hukum untuk melindungi korban tetap dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Tidak jelas dalam kategori mana kewajiban itu

jatuh. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan setelah keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau pada saat penyelidikan dan penyidikan telah dimulai. Di sisi lain, undang-undang Indonesia yang agresif kurang jelas tentang apa yang bukan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

## **B. Macam Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

### **Pelanggaran HAM Ringan**

Kategori pelanggaran HAM ringan adalah yang tidak mengancam nyawa manusia tetapi merugikan orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia kecil ini dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar dalam keluarga, pasangan, persahabatan atau di tempat lain. Contoh:

- a. Orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Misalnya memaksa seorang anak untuk mengambil jurusan tertentu dalam suatu kuliah meskipun itu tidak sesuai dengan kemampuan anak tersebut.

- b. Pengadilan Penyalahgunaan.
- c. Tidak ada pendidikan dan kesehatan yang setara.
- d. Kurangnya keadilan sosial di masyarakat.

## **Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

### **Apa itu Pelanggaran HAM Berat?**

Suatu pelanggaran HAM yang sudah mengarah pada kejahatan besar yang dapat mengancam manusia lain baik secara fisik, maupun psikisnya.

### **Apa aja aturan yg melindungi kita menurut pelanggaran HAM berat?**

Terkait dengan perlindungan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, terdapat pada perjanjian nasional, yang disebut statute roma. Di Indonesia terdapat Peraturan Perundang-Undangan yaitu Nomor 26 Tahun 2000. Selain itu, juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

### **Apa aja masalah pelanggaran HAM berat pada**

## **Indonesia yg belum selesai?**

### **1. Peristiwa 1965-1966**

Setelah upaya kudeta pada tanggal 30 September 1965, militer Indonesia, yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto, secara sistematis menyerang kelompok komunis yang dicurigai dan banyak kelompok sayap kiri lainnya, melancarkan serangan yang kuat. Pihak berwenang Indonesia meninggalkan jutaan korban dan keluarga mereka dalam salah satu genosida terburuk Tahun 1965 dan 1966.

### **2. Tragedi Tanjung Priok (1984)**

Prajurit memasuki Masjid Asada di Tanjung Priok tanpa melepas sepatu dan melepas pamphlet serta spanduk yang berisi kritikan terhadap pemerintah. Empat warga ditangkap setelah bentrokan antara warga dengan polisi. Puluhan orang tewas saat warga menuntut pembebasan

tahanan dalam bentrokan antara polisi dan Jemaah al-Saada di Tanjung Priok.

Pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama memutuskan para terdakwa bersalah atas pelanggaran HAM. Namun, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang membebaskannya. Pembebasan itu juga menanggukkan kewajiban negara untuk membayar ganti rugi dan keringanan.

### **3. Penembakan Misteri 1982-1985**

Penembakan ini terjadi pada Tahun 1982-1985 yaitu terjadi pembunuhan di luar proses hukum, dan penyiksaan secara paksa. Kasus ini terjadi pada Yosep Adi Prasetya.

### **4. Trisakti, Semanggi I, Semanggi II Peristiwa 1998 dan 1999**

Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti ditembak mati dalam

demonstrasi menuntut pengunduran diri Suharto.

Peristiwa Semanggi terjadi dua kali, yaitu pada peristiwa Semanggi 1 yang menewaskan warga sipil, dan peristiwa Semanggi 2 menewaskan mahasiswa.

Ada cukup bukti awal untuk menetapkan bahwa ketiga kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ada 4.444 kasus pembunuhan berencana, sistematis dan meluas, penyiksaan, penghilangan paksa, perampasan kebebasan dan kebebasan fisik.

## **5. Insiden Simpang KKA 1999**

Peristiwa Simpang KKA terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 di Kabupaten Dewantara, Provinsi Aceh Utara. Pasukan melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang berdemonstrasi menentang insiden pelecahan di Kot Murong, Loksumawe pada 30 April. Sedikitnya 23 warga sipil



tewas setelah dugaan penembakan militer. Sedikitnya 30 warga sipil juga disiksa oleh pihak berwenang.

### **Hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia :**

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak sederhana, anugerah dari Tuhan, yang dapat diperoleh sejak awal dengan bantuan manusia. Berdasarkan sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pengertian HAM mendefinisikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Klausul hak asasi manusia diindeks dalam Pasal 28A sampai 28J. Selanjutnya, peristiwa menjelang penyelesaian UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia oleh MPRS-nya di awal Orde Baru menyebabkan penyusunan UUD tentang Hak Asasi Manusia dan Hak dan Kewajiban. Warga Negara AS. MPRS menyerahkan memorandum MPRS tentang pelaksanaan hak asasi manusia kepada Presiden dan DPR-nya. Berbagai kepentingan politik saat itu akhirnya tak terbebani. Saat itu, para penguasa Orde Baru mengincar

konstitusi hak asasi manusia, percaya bahwa masalah hak asasi manusia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 11 November 1998, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dalam permusyawaratannya sendiri. Keputusan ini mewajibkan badan-badan negara yang lebih tinggi dan semua badan yang berwenang untuk memuji, menyebarluaskan dan menegakkan informasi mengenai hak asasi manusia terhadap semua orang.

### **Hak atas Kebenaran**

Dalam hal ini, keluarga korban, masyarakat umum, harus mendapatkan didikan terkait dengan HAM yang seharusnya dipatuhi, dan dijunjung tinggi.

### **Hak atas Keadilan**

Siapapun yang menjadi korban kasus pelanggaran HAM, hendaknya mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan bentuk dari keadilan ini sebanding dengan kerugian yang mereka

rasakan.

### **Hak atas Ganti Kerugian yang Diderita**

Negara harus bertanggung jawab atas kerugian seperti hilangnya kesempatan kerja, Pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologis, dengan demikian menyelesaikan situasi yang ada sebelum pelanggaran hak asasi manusia kita wajib berusaha untuk sembuh. Hak untuk mendapatkan ganti rugi mencakup tindakan-tindakan selain kompensasi moneter.

Sebaiknya Negara memberikan informasi pada masyarakat umum terutama kepada korban yang serius, tentang hak-hak mereka dan pemulihan untuk semua layanan media, psikologis, sosial, administrative dan lainnya yang menjadi hak mereka.

### **Bagaimana mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius?**

Prosedur pelaporan berdasarkan Perjanjian Internasional :

## Komunikasi Individu :

Korban dapat menghubungi badan perjanjian dan anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Negara harus meratifikasi konvensi Internasional tentang cedera yang diderita oleh orang-orang mereka pengaduan antarnegara: kasus oleh satu Negara pihak terhadap Negara pihak lainnya yang menyatakan ketidakpatuhan terhadap kewajibannya berdasarkan konvensi. Negara yang mengajukan keluhan harus memberikan tanggapan.

## **Mengapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat sulit diselesaikan?**

Kurangnya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan kasus; sistem hukum dan proses politik yang mencari keuntungan menjadi kendala utama penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Hubungan kekuasaan antara partai politik yang berkuasa seringkali begitu kuat sehingga kepentingan politik lebih diutamakan

daripada kepentingan kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut, yang mengakibatkan penderitaan korban yang semakin banyak.

Pemerintah: melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dengan membuat kebijakan, Undang-Undang, peraturan dan sistem peradilan yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menyelaraskan sistem penjara dengan hak asasi manusia dia harus melakukan reformasi karena dia adalah manusia. Hak asasi manusia sering disingkat HAM.

### **Peristiwa Tanjung Priok**

Peristiwa Tanjung Priok adalah salah satu contoh pelanggaran HAM yang paling menonjol di Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1984 antara pihak berwenang dan penduduk setempat. Pemicu insiden tersebut terjadi karena isu rasial dan faktor politik. Warga setempat berdemonstrasi menentang penolakan pemerintah untuk memindahkan makam suci Mbah Priok. Hal ini

menyebabkan bentrokan antara warga dengan polisi dan anggota TNI. Ratusan korban diperkirakan tewas akibat kekerasan dan tembakan dalam bentrokan tersebut. Masyarakat Aceh telah menyaksikan banyak aksi kekerasan. Beberapa kasus pembunuhan, penculikan dan penyiksaan telah terungkap.

### **Pembunuhan Marsinah**

Pembunuhan Marsinah terjadi 3-4 Mei 1993. Berawal dari pemogokan Marsina dan pekerja lainnya menuntut keselamatan dari perusahaan yang mereka pecat tanpa alasan. Marsina, yang menjadi aktivis buruh pasca demonstrasi, ditemukan tewas lima hari kemudian. Ia meninggal dalam keadaan mengenaskan di kawasan hutan Wirangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kasus pelanggaran HAM masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Perorangan/Masyarakat Sipil:

Menyerukan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mengusut persoalan pelanggaran

HAM sehingga hukum baik dapat terwujud. Dukung korban dan keluarganya melalui solidaritas, aksi dan pesan-pesan lainnya serta memberikan bantuan.

### **Tragedi Trisakti dan Semanghi**

Tragedi Trisakti dimulai pada tahun 1998. Akibat krisis mata uang Asia, perekonomian Indonesia mengalami stagnasi. Akibatnya, harga melonjak. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut stabilitas ekonomi. Yang terbesar adalah Jakarta. Demonstrasi tersebut kemudian berujung pada pengunduran diri Presiden Suharto. Sedikitnya belasan orang, baik anggota masyarakat sipil maupun mahasiswa, tewas dalam insiden tersebut. Rentetan peristiwa pada tahun 1998 merupakan salah satu peristiwa kekerasan terburuk dalam sejarah Indonesia. Setahun kemudian, pada 23 September 1999, terjadi tragedi Semanggi II, saat mahasiswa berdemonstrasi menentang Undang-Undang Pengelolaan Kondisi Tidak Aman (UUPKB). Tragedi ini juga menyebabkan hilangnya nyawa

mahasiswa.

### **Kasus Pembunuhan Munir**

Munir adalah aktivis yang menegakkan HAM, meninggal di alam pesawat Garuda. Penyebab kematiannya tidak diketahui, tetapi banyak laporan mengatakan dia diracun. Sejauh ini, belum ada konsensus yang dicapai tentang pembunuhan Munir.

### **Insiden Aceh**

Terjadi dari Tahun 1990 hingga 1998 ketika DOM diberlakukan. Kasus pelanggaran HAM di latarbelakangi sebab hal-hal yang berbau politik dari partai politik berharap Aceh bangkit dan merdeka. Rakyat Aceh menyaksikan banyak aksi kekerasan. Beberapa kasus pembunuhan, penculikan dan penyiksaan telah terungkap.

### **Kurung Manusia di Rumah Bupati Langkat**

Bulan Januari 2002, di temukan kurung manusia i rumah Bupati Langkat. Setelah penemuan ini, polisi juga



mengunjungi tempat kejadian dan mendapat informasi bahwa kandang manusia tersebut pernah menjadi tempat rehabilitasi narkoba. Namun, tidak ada izin untuk rehabilitasi narkoba di rumah. Komnath Ham yang juga melakukan penelitian menemukan setidaknya ada 26 bentuk penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan terhadap narapidana di dalam kurungan. Beberapa warga dipukul, ditendang, digantung di kandang seperti kera, dan tangan dan kaki mereka dicambuk dengan selang. Temuan Komnas HAM juga menunjukkan bahwa aparat TNI Polri terlibat dalam penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan penghuni kandang. Enam orang telah meninggal di kandang selama pendiriannya sejak 2012. Kasus dugaan aktivitas kriminal di kandang manusia masih menunggu di pengadilan hari ini. Delapan tersangka sedang diadili. Pada kasus ini, beberapa kasus tidak diselediki. Beberapa pendapat umum mengenai pelecehan mengarah pada organisasi yang tumbuh di masyarakat.

Kekerasan Polisi di Wadas Pada tanggal 8

Februari 2022, di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, aparat kepolisian melakukan penyerangan terhadap warga desa. Tengah kericuhan tersebut, Komnas HAM menemukan banyak warga yang ditendang dan dipukuli. Selain itu, puluhan warga ditangkap dan diamankan polisi. Warga mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, beberapa orang bersembunyi di hutan karena takut bahkan tidak bisa pulang.

### **Pembunuhan Sewenang-Wenang Dan Pembunuhan Tidak Sesuai Hukum Atau Bermotif Politik**

Tuduhan bahwa pemerintah atau agen-agensya melakukan pembunuhan sewenang-wenang atau diluar hukum termasuk penggunaan personel keamanan yang berlebihan dalam operasi melawan kelompok pemberontak bersenjata di Papua termasuk laporan media yang mengklaim penggunaan kekuatan yang mengakibatkan kematian. Sulit untuk mengidentifikasi organisasi atau pihak yang terlibat. Penyelidikan internal dapat dilakukan dalam kasus-kasus tingkat tinggi oleh unit-unit yang

dituduh melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu atau diluar hukum, atau oleh tim yang dikirim oleh polisi. Pada 13 April, pasukan keamanan menembak mati dua siswa didekat tambang Glasberg di Mimika, Papua. Mereka secara keliru menduga bahwa dua siswa yang dilaporkan sedang memancing pada saat itu adalah anggota kelompok ekstremis separatis. Militer dan polisi meluncurkan penyelidikan Bersama atau kasus tersebut, yang hingga Oktober masih belum meyakinkan, yang menyebabkan keluarga korban menyerukan penyelidikan independent atas kasus tersebut.

### **Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat**

Hukum menegaskan larang terkait hal itu. Tidak di perbolehkan bertindak diluar ketentuan termasuk menggunakan kekerasan untuk dihormati. Petugas polisi menghadapi hukuman empat tahun penjara karena penggunaan kekuatan atau penggunaan kekuatan yang melanggar hukum. Tidak ada undang-undang yang secara

khusus mengkriminalisasi percobaan penyiksaan, tetapi undang-undang lain, seperti Perlindungan Saksi dan Korban, memuat ketentuan yang melarang penyiksaan. Pihak LSM mengungkapkan sikap polisi yang melakukan penyiksaan terhadap mereka yang ditahan. LSM melaporkan polisi memukuli tersangka dengan jeruji besi dan helm, menutupi kepala mereka dengan kantong plastik, dan memaksa mereka untuk mengaku.

Di Aceh, Hukuman bersifat publik dan berlangsung dalam kelompok ketika lebih dari satu orang dihukum. Impunitas aparat keamanan tetap menjadi masalah. Banyak tentara tingkat rendah dan menengah diadili di pengadilan militer karena percobaan pelecehan terhadap warga sipil atau tuduhan di luar tugas. Dalam kasus ini, gendarmerie melakukan penyelidikan dan menyerahkan temuan kepada gendarmerie, yang kemudian memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan. Penuntut militer bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung dan militer untuk penerapan hukum. Pada bulan September,

Brigadir Jenderal Dadan Hendrida dan Julius Silvanus didakwa (dan menjalani hukuman penjara karena) terlibat dalam penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan tim Mawar Kopas pada tahun 1999. diangkat sebagai ketua. Mahasiswa 1997-98 Pada bulan Januari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengangkat Ketua Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan, mantan komandan Tim Mawar, sebagai ajudan.

### **Kondisi Lapas**

Kondisi di 525 Lapas di Indonesia umumnya keras dan terkadang mengancam jiwa, sebagian besar karena kepadatan penjara.

Kepadatan adalah masalah serius, termasuk di penjara imigrasi. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Januari 2018, 293.583 tahanan dan narapidana ditahan di penjara dan pusat investigasi yang dirancang untuk menampung hingga 133.931. Kepadatan menyebabkan masalah kebersihan dan ventilasi, yang

bervariasi menurut fasilitas. Penjara dengan keamanan minimum dan menengah seringkali paling padat penduduknya. Penanggung jawab lapas memberikan informasi yaitu kepadatan menjadi sebab masalah dalam sel di Sumut Februari kemarin. Sekitar 40.000 narapidana telah dibebaskan secara nasional karena kekhawatiran tentang penyebaran COVID-19 di penjara. Menurut undang-undang, penjara adalah untuk terdakwa, dan pusat penahanan adalah tempat tinggal bagi terdakwa yang menunggu persidangan. Laporan pengaduan akan diserahkan ke Departemen Hukum, Keamanan dan Keamanan, yang akan menyelidiki laporan tersebut dan menjalani tinjauan hukum independen.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Aturan ini diterapkan oleh negara yang ada di Dunia. Secara rinci dalam peraturan negara sesuai dengan kebiasaan dan budaya yang berlaku. UDHR yang diratifikasi oleh PBB 1948 lalu. Memuat 30 aturan HAM yang harus dijunjung tinggi, dilindungi, dihormati dan tidak dilanggar. Yang menjadi sebab pelanggaran dapat dilakukan siapa saja. Pelanggaran HAM juga diatur oleh UUD. UDHR dibentuk untuk alat dalam upaya menghadapi kenyataan kejamnya perang dunia. Menurut Ahli, ketika pejabat pemerintah tidak mengambil tindakan untuk melindungi individu dan kelompok yang rentan, mereka terlibat dalam pelanggaran hak.

#### **Faktor Internal:**

##### **1. Kurangnya Kesadaran HAM**

Penyebab nomor satu dari pelanggaran HAM internal adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan HAM. Untuk itu, penting untuk

mempelajari dan memahami HAM sejak dini.

## 2. Intoleransi Perbedaan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa dan keyakinan agama. Kita harus toleran karena ada begitu banyak perbedaan. Kegagalan untuk mentolerir perbedaan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Intoleransi adalah ketidakmampuan untuk menghormati atau mendiskriminasi orang lain.

## 3. Keinginan untuk membalas dendam

Keinginan untuk membalas dendam, Sikap ini dapat menimbulkan berbagai kegiatan kriminal. Balas dendam membuat seseorang rela melakukan tindakan yang keterlaluan, seperti penyiksaan dan pembunuhan, yang merupakan contoh pelanggaran HAM.

## 4. Kurangnya Empati



Empati adalah emosi yang menimbulkan keinginan untuk membantu orang lain. Tanpa empati, kita bisa membangun fondasi bagi faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Karena kurang empati, orang tega menyakiti orang lain dan melakukan perbuatan keji.

#### 5. Kondisi Mental

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pelanggaran HAM internal adalah kondisi mental yang tidak sehat. Seseorang dengan kondisi mental yang tidak stabil dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi mental seseorang sering dipertanyakan di pengadilan. Untuk memastikan bahwa orang tersebut memiliki kapasitas hukum untuk membuat penilaian.

#### 6. Situasi Keuangan

Faktor terakhir yang menyebabkan pelanggaran HAM internal adalah karena masalah

keuangan atau ekonomi. Ketika seseorang merasa miskin secara finansial dan menjadi gila, dia mungkin Seperti membunuh korban dan mencuri uang.

### **Faktor Eksternal:**

#### 1. Penyalahgunaan Kekuasaan

Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sudah umum di dunia kerja dan pemerintahan. Contohnya termasuk korupsi, lembur yang tidak dibayar oleh pekerja, dan kekerasan terhadap anak baru.

#### 2. Stuktur politik dan social

Faktor berikutnya dalam pelanggaran HAM eksternal adalah adanya kesenjangan politik dan sosial dalam negeri. Contoh ketidaksetaraan politik dan sosial di negara ini adalah tata kelola yang buruk dan kesan acuh tak acuh terhadap

semua kompleksitas sosial.

### 3. Sistem hukum yang lemah

Penyebab meningkatnya pelanggaran HAM adalah lemahnya sistem hukum. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan pernah dihormati kecuali pemerintah secara konsisten menegakkan aturan. Mereka bahkan mungkin memiliki keberanian untuk melanjutkan kegiatan kriminal mereka dan mengklaim lebih banyak korban.

### 4. Ketimpangan Ekonomi

Faktor berikutnya dalam pelanggaran hak asasi manusia eksternal adalah keadaan ketimpangan ekonomi di lingkungan tempat mereka tinggal. Negara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, jika pelaku merasa dipermalukan oleh situasi keuangannya, mereka

dapat melakukan kejahatan seperti pemerasan, pencurian, korupsi, atau bahkan membunuh korban yang menindas mereka sejak awal.

#### 5. Penyalahgunaan Teknologi

Dengan berkembangnya dunia digital, banyak orang yang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan pelanggaran HAM. Ada banyak contoh pelanggaran data pribadi, pelanggaran media sosial, penghinaan media sosial, penyebaran data pribadi orang lain, dan banyak lagi.

#### 6. Kurangnya Sosialisasi Hak Asasi Manusia

Faktor terakhir yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM eksternal adalah kurangnya sosialisasi HAM. Tidak semua orang memahami detail hak asasi manusia karena pendidikan tidak merata di semua wilayah negara. Akibatnya, terjadi pelanggaran karena kurangnya

pengetahuan tentang hak asasi manusia oleh pemerintah.

**Contoh Soal :**

- 1. Setelah membaca materi di atas, apa yang anda ketahui tentang pengertian hak asasi manusia ?**

**Jawaban :** HAM yaitu hak menurut Tuhan YME yang memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak manusia merupakan suatu hak yang wajib di jaga, di hormati oleh siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. HAM merupakan suatu hak yg memang sebagai hal yg berharga dalam diri manusia.

- 2. Setelah membaca materi di atas, sebutkan 2 konsep pelanggaran hak asasi manusia!**

**Jawaban :** Pertama, pelanggaran prinsip non-transferable rights atau pelanggaran norma-norma

yang ditaati oleh suatu negara atau lembaga negara kepada warga negaranya. Hak yang tidak dapat dicabut adalah hak yang memang dimiliki manusia, terdapat dalam hak berpolitik dll nya. Bangsa-bangsa di seluruh masyarakat internasional dan tidak boleh dilanggar atau dikurangi, jika lebih banyak bangsa di dunia yang setuju Itu adalah norma yang hanya dapat diubah oleh Terima dan akui berbagai norma yang Anda ikuti. Kedua, pelanggaran HAM berat terjadi ketika negara mengizinkan atau benar-benar melakukan kejahatan berat.(Serious crime) atau kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yg sudah disepakati menjadi tindak kejahatan internasional (international crimes), & atau negara tadi gagal atau nir mau menuntut pertanggungjawaban berdasarkan aparat pelaku tindak kejahatan tadi. Padahal mengadili para pelaku kejahatan internasional adalah keharusan absolut bagi warga

dunia (obligatio erga omnes) lantaran para pelaku tadi adalah musuh beserta manusia.

**3. Pernyataan bahwa “Negara berkewajiban melindungi dan menghormati keberadaan hak asasi manusia” terdapat dalam peraturan apa ?**

**Jawaban :** Pernyataan “Negara berkewajiban melindungi dan menghormati keberadaan hak asasi manusia” seperti kesesuaian yang tegas pada UUD NKRI, namun terhadap korban yang diatur dalam UUD.

**Latihan Soal Kelas X**

**Jawablah pertanyaan di bawah ini, dengan benar !!**

1. Berdasarkan materi, sebutkan sumber hukum terkait penegakan kasus pelanggaran HAM !
2. Berdasar pada materi tersebut, sebutka hak yang di peroleh korban pelanggaran HAM !
3. Apa isi dari Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 ?

4. Sebutkan 3 bentuk pelanggaran HAM yang kamu ketahui!
5. Sebutkan 3 yang melatarbelakangi terjadinya adanya kasus pelanggaran HAM!

## 2. 3. Penutup

### A. Rangkuman

Hak asasi manusia merupakan suatu hak menurut Tuhan Yang Maha Esa yg memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yg wajib pada jaga, pada hormati sang siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang memang sebagai hal yg berharga dalam diri insan. Hak asasi insan merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Hak asai insan ini berlaku dimanapun, kapanpun, & sang siapapun. HAM ini, sangat



penting untuk di junjung tinggi, dan di hargai keberadaannya. Hal ini karena, manusia mempunyai hak untuk hidup layaknya manusia yang lain tanpa batasan, dan sudah seharusnya manusia itu mempunyai hak untuk tidak diperlakukan semena mena oleh manusia lainnya. Ini mengapa, hak asasi manusia perlu di sadari keberadaannya, dan di lindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUUXIII/2015 menegaskan, di satu sisi, pentingnya upaya penegakan HAM yang tegas sebagai perkara pidana dengan ciri khusus yang memerlukan penanganan yang tepat, dengan demikian juga mengikutsertakan kepentingan masyarakat luas (keadilan sosial). (Kristen, 2018:239). Bentuk dari pelanggaran HAM yaitu kasus pembunuhan marsinah, tragedi Trisakti, kasus pembunuhan Brigadir jhoshua oleh Irjen ferdy sambo. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu ada sebab dari luar dan dalam. Faktor dari dalam diri manusia itu sendiri meliputi, kurangnya empati, kondisi mental dll nya. Kemudian faktor eksternal meliputi sistem

hukum yang lemah, ketimpangan sosial dll nya. Dengan adanya faktor internal maupun eksternal ini, mengakibatkan kasus pelanggaran HAM di Indonesia tak kunjung selesai, dan selalui terjadi di setiap tahunnya. Namun, sejatinya pemerintah tidak tinggal diam, melihat kejadian kejadian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini. Berbagai upaya telah dilakukan dengan harapan, agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

## **B. Tes Formatif**

**Jawablah Soal di bawah ini dengan benar !!**

1. Pelanggaran HAM di bagi menjadi berapa ?  
Sebutkan!
2. Sebutkan bentuk pelanggaran HAM berat !  
Jelaskan.
3. Apa yang semestinya pemerintah lakukan sebagai upaya pencegahan terulangnya pelanggaran HAM berat ?
4. Hal apa saja yang menjadi sebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia !

5. Sebutkan contoh bentuk kasus pelanggaran HAM yang belum selesai!

### **C. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Dalam sub bab ini, terutama dalam contoh soal, dan latihan soal kelas X, akan memberikan timbal balik pada siswa terkait dengan kemampuan proses pemahaman mereka. Ini dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat lebih memahami materi tersebut.

Tindak lanjut dari sub bab ini adalah, bagaimana dalam bab ini telah memberikan pengetahuan tentang pelanggaran hak asasi manusia, macam macam kasusnya, dan faktor penyebabnya. Selanjutnya, setelah siswa mengerjakan soal latihan ataupun tes formatif yang diberikan, siswa di harapkan dapat lebih memahami materi tersebut, dan bisa melanjutkan untuk belajar bab selanjutnya pada Buku ini.

### **D. Kunci Jawaban Tes Formatif**

1. Pelanggaran HAM di bagi menjadi dua yaitu, pelanggaran HAM ringan, dan pelanggaran HAM

berat.

2. Kasus Pembunuhan Brigadir J Oleh Irjen Ferdy Sambo Karena, dalam kasus ini terdapat kasus penganiayaan, dan pembunuhan di luar jalur hukum.
3. Pemerintah: Menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dengan membuat kebijakan, undang-undang, peraturan dan sistem peradilan yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menyelaraskan sistem penjara dengan hak asasi manusia. Dia harus melakukan reformasi karena dia adalah manusia. Hak Asasi Manusia sering disingkat HAM.
4. Faktor Internal :
  - Kurangnya kesadaran tentang HAM
  - Intoleransi perbedaan
  - Keinginan untuk membalas dendam
  - Kurangnya empati

- Kondisi mental
- Situasi keuangan

Faktor Eksternal :

- Penyalahgunaan kekuasaan
- Struktur politik, dan social
- Sistem hukum yang lemah
- Ketimpangan ekonomi
- Penyalahgunaan teknologi
- Kurangnya sosialisasi hak asasi manusia

5. a. Peristiwa 1965-1966
- b. Tragedi tanjung priok 1984
- c. Peristiwa Tarangsari 1989

## **BAB 3**

### **Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum di Indonesia**

#### **3. 1. Pendahuluan**

Dalam masyarakat global ini, setiap laki-laki atau perempuan pasti memiliki hak dasar untuk hidup, dan hak-hak dasar tersebut telah ada sejak manusia lahir. Selain itu, hak-hak dasar ini umumnya didiagnosis. Hak asasi manusia (HAM) ini yang disebut hak-hak dasar. Dalam gaya hidup hak asasi manusia, setiap laki-laki atau perempuan memiliki perlindungan etis dan kriminal sehingga orang dapat dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perampasan, penganiayaan, dll. Orang yang terlindungi dari segala bentuk merugikan diri sendiri (perampasan, penganiayaan, dll.) hidup lebih bebas dan merasa lebih sedikit tekanan. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa akan menjalani kehidupan yang lebih layak karena hak asasinya.

Dalam banyak peristiwa yang menyebabkan pelanggaran HAM, manusia Indonesia (jaringan, perangkat negara, aparat penegak hukum) memahami apa yang secara jelas tersirat dalam HAM mereka (terdiri dari tanggung jawab dasar mereka). menunjukkan bahwa peraturan dan pedoman Hak Asasi Manusia tidak lengkap dan tepat, tetapi paling berharga bila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem hukum yang tidak memihak yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang sesuai, dan mengikuti taktik kriminal yang ideal. Hak asasi manusia berjalan dengan baik Ketika setiap manusia atau warga negara mengingat tanggung jawabnya dan aktivitas fisik haknya. Hak asasi manusia bekerja dengan sangat baik ketika semua orang mengakui bahwa ada manusia berbeda yang memiliki hak yang sama dengan mereka. Sederhananya, hak asasi manusia itu efektif sementara hak asasi kita dilanggar melalui hak orang lain. Hukum merupakan alat penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia Indonesia. Hak orang dapat melukis lebih tinggi atau lebih baik ditegakkan dalam

kehidupan demokrasi, karena demokrasi biasanya menetapkan pedoman hukum dalam praktek negara dan terus menghormati hak-hak warga negaranya. Bangsa dan warga mengambil bagian dalam membentuk kebijakan publik.

### **A. Deskripsi Singkat**

Pokok bahasan Penegakan Regulasi demikian juga Hak Asasi Manusia inspirasi untuk membela dan membuat hak asasi manusia ilegal. Hak asasi manusia harus dilaksanakan melalui orang, komunitas dan lembaga pemerintah untuk memandu gerakan mereka. Tantangan tersebut antara lain: munculnya overlay aturan pidana Indonesia tentang HAM, landasan pidana perlindungan HAM di Indonesia, dan posisi pembela HAM dalam hukum domestik dan internasional.

Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Regulasi Penegakan hukum di Indonesia kebijakan legislasi HAM di Indonesia Definisi cakupan kejahatan dan atau pedoman hukum Hak Asasi Manusia, khususnya yang dilakukan atau ditegakkan oleh pemerintah di



tingkat nasional, melibatkan pengetahuan tentang bagaimana regulasi berpengaruh terhadap hukum dengan cara mempertimbangkan komposisi tenaga di belakang pengenalan dan penegakan hukum akan meningkat. Hak adalah faktor normatif yang melekat pada semua manusia dan perangkat lunaknya terletak dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan dalam hubungan antar individu atau institusi. Untuk keberhasilan hak, kita harus memperhitungkan bahwa kita tidak lagi sendirian, tetapi bersosialisasi dengan orang lain. Gagasan tentang regulasi hak asasi manusia di Amerika Serikat yang patuh pada peraturan. Konsep Rechtsstaat merupakan terjemahan dari dua frase luar biasa: Rechtsstaat dan Rechtsstaat. Marutsuki menilai A. V. Dicey menjelaskan bahwa berikut adalah isi dari setiap konsep Negara hukum, dan negara hukum memiliki tiga makna sebagai berikut: Absolutisme hukum (supremasi hukum yang absolut) untuk memerangi dampak kesewenang-wenangan listrik singkirkan kesewenang-wenangan

pemerintahan yang luas. *rule of thumb of law* memiliki empat faktor: perlindungan hak asasi manusia.

Elemen-elemen ini harus utuh dalam konstitusi pedesaan peraturan. yaitu, hak asasi manusia harus dimasukkan dalam aturan hukum. Hubungan Antara Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum Sri Soemantri mendefinisikan bahwa konstitusi sebagai muse negara paling tidak meliputi 3 hal. Pertama, keamanan hak orang dan warga Negara. Konstitusi menjadikan keselamatan hak orang sebagai filosofi aturan main hukum. Dengan kata lain, pedoman hukum perlu menjaga hak orang. Pengamanan hak asasi manusia dalam sistem hukum berada dalam wujud aturan dan peraturan serta dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan sebagai pelaksana keadilan. Peradilan dalam negara hukum, sebaliknya, merupakan kekuatan yang longgar dan tidak memihak, terlepas dari pengaruh kekuatan pemerintah.

Dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa hubungan antara hak asasi manusia dan supremasi hukum

tidak hanya bersifat formal formal, tetapi juga bersifat material. Hubungan formal dalam hal pembelaan hak asasi manusia merupakan ciri utama dari konsep pedoman regulasi. menyatakan bahwa mosi tersebut ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia. Peradilan yang mandiri, bebas, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, juga merupakan bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hukum. Hak orang dalam Piagam Republik Indonesia Piagam ini menjalankan fungsi vital di negara Amerika Serikat mana pun. Dengan kata lain, piagam itu masih dalam pengertian sosiologis atau politik, bukan lagi peraturan. Piagam tersebut disebut sebagai *rechversfasuung* hanya setelah faktor-faktor hukum tata negara yang hidup dalam masyarakat disebut kesatuan bangsa yang melakukan kejahatan. Kemudian orang memposisikannya di dalam teks sebagai peraturan terbaik yang berlaku di ini. Peraturan perundang-undangan Indonesia sekurang-kurangnya memiliki satu bentuk

peraturan tertulis yang memuat keprihatinan dengan hak asasi manusia sisi lain, titik rawannya adalah bahwa apa yang diatur dengan bantuan piagam namun paling efektif terdiri dari pedoman dunia, termasuk Klausul Kebebasan dasar dalam Konstitusi Republik Indonesia yang tetap bersifat internasional. Sebagai alternatif, pedoman hukum yang melanggar hak asasi manusia dan perintah pemerintah menjadi masalah bagi perubahan yang sering terjadi.

## **B. Relevansi**

HAM dan hubungan antara pedoman peraturan begitu erat dan saling terkait sehingga tidak dapat dipisahkan karena peraturan ada untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Selain itu, semua tindakan manusia di pedesaan terus-menerus bertentangan dengan hukum. Semua hak dijamin melalui hukum, dan ada bukti bahwa hukum mengikat mereka.

### C. Capaian Pembelajaran (CP)

- 1) Melalui pemahaman tentang kepedulian terhadap regulasi HAM, diharapkan para sarjana dapat mengetahui pengetahuan utama tentang masalah hukum dan HAM, cakupan hukum di Indonesia yang terkait dengan landasan hukum, hak asasi manusia untuk menegakkan kebebasan bersama. HAM dalam bahasa Indonesia penempatan penegakan HAM dalam hukum nasional dan internasional yang mencakup dialog kasus-kasus HAM aktual di Indonesia Mampu menyimpulkan secara rasional bahwa revitalisasi Pancasila merupakan strategi dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.
- 2) Memahami filosofi dasar hak asasi manusia di Indonesia (Pancasila).
- 3) Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan dan masalah secara kritis HAM di Indonesia.

- 4) Mampu menyimpulkan secara rasional bahwa revitalisasi Pancasila merupakan strategi dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

#### **D. Petunjuk Belajar**

Untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari penggunaan bahan ini, kami telah menyediakan beberapa petunjuk tentang cara menggunakannya.

- 1) Membaca dan memahami uraian materi yang disampaikan pada setiap kegiatan pembelajaran.
- 2) Selesaikan setiap kegiatan diskusi, latihan pertanyaan, dan praktikkan pengetahuan konseptual dan perintah literasi lingkungan.
- 3) Untuk "kegiatan diskusi" termasuk kegiatan praktik, harap memperhatikan termasuk cara melakukan.
- 4) Setelah selesai, Anda dapat memeriksa kembali.

### **3. 2. Penyajian**

#### **A. Kebijakan Hukum di Indonesia terkait Hak Asasi Manusia**

- a. Pengertian Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Hukum

Aturan pidana, yaitu yang diterapkan atau ditegakkan dengan menggunakan pemerintah pada tingkat nasional, melibatkan pengetahuan bagaimana pedoman mempengaruhi peraturan dengan memikirkan komposisi listrik di belakang pembuatan dan penegakan peraturan. Baik adalah elemen normatif yang melekat pada semua manusia dan perangkat lunaknya terletak pada kerangka hak dan kebebasan yang sama dalam hal interaksi antara orang atau institusi. Anda perlu mendapatkan hak juga. sulitnya hak asasi manusia sering didiskusikan dan diperdebatkan, terutama di generasi reformasi ini. Hak asasi manusia lebih dihargai dan dihormati di era reformasi daripada di teknologi pra-reformasi. Untuk pemenuhan hak, kita harus ingat bahwa kita tidak lagi hidup sendiri, tetapi bergaul dengan orang lain Jangan menggunakan pelanggaran hak asasi manusia untuk mempelajari atau memahami hak-hak Anda sendiri. Gagasan di balik hukum hak asasi manusia dalam hukum yang harus kita ikuti.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak menurut Tuhan Yang Maha Esa yg memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yg wajib pada jaga, pada hormati sang siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang memang sebagai hal yg berharga dalam diri insan. Hak asasi insan merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Hak asai insan ini berlaku dimanapun, kapanpun, & sang siapapun. HAM ini, sangat penting untuk di junjung tinggi, dan di hargai keberadaannya. Hal ini karena, manusia mempunyai hak untuk hidup layaknya manusia yang lain tanpa batasan, dan sudah seharusnya manusia itu mempunyai hak untuk tidak di perlakukan semena mena oleh manusia lainnya. Ini



mengapa, hak asasi manusia perlu di sadari keberadaannya, dan di lindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUUXIII/2015 menegaskan, di satu sisi, pentingnya upaya penegakan HAM yang tegas sebagai perkara pidana dengan ciri khusus yang memerlukan penanganan yang tepat, dengan demikian juga mengikutsertakan kepentingan masyarakat luas (keadilan sosial). (Kristen, 2018:239). Bentuk dari pelanggaran HAM yaitu kasus pembunuhan marsinah, tragedi Trisakti, kasus pembunuhan Brigadir jhoshua oleh Irjen ferdy sambo. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu ada sebab dari luar dan dalam. Faktor dari dalam diri manusia itu sendiri meliputi, kurangnya empati, kondisi mental dll nya. Kemudian faktor eksternal meliputi sistem hukum yang lemah, ketimpangan sosial dll nya. Dengan adanya faktor internal maupun eksternal ini, mengakibatkan kasus pelanggaran HAM di Indonesia tak kunjung selesai, dan selalu terjadi di setiap tahunnya. Namun,

sejatinya pemerintah tidak tinggal diam, melihat kejadian kejadian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini. Berbagai upaya telah dilakukan dengan harapan, agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

Gagasan Rechtsstaat merupakan terjemahan dari istilah eksklusif: Rechtsstaat dan Rechtsstaat. kedua frasa tersebut berasal dari sejarah politik yang unik. Di masa depan, informasi kami tentang pedoman hukum dapat didasarkan pada perangkat Anglo-Saxon atau sistem common law, dan pedoman peraturan di perangkat hukum perdata Eropa Kontinental. Marutsuki menuntut A.V. Dicey menjelaskan bahwa isi dari setiap konsep rule of regulation adalah sebagai berikut, dan rule of law memiliki 3 pengertian sebagai berikut:

1. Absolutisme hukum (mutlak supremasi peraturan) untuk melawan pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang dan menghapus kesewenang-

wenangan otoritas luas.

2. Kesetaraan hukum untuk semua.
3. Konstitusi bukanlah sumber informasi; sebaliknya, pengadilan mengikat dan menegakkan hak-hak pribadi.

Aturan regulasi memiliki empat unsur:

1. Keamanan untuk Hak Asasi Manusia.
2. Berbagi atau pemisahan kekuasaan menjadi hak praktis.
3. Hukum yang sepenuhnya berdasarkan pemerintah.
4. Yurisdiksi Administratif dalam Sengketa.

Unsur-unsur ini harus utuh dalam piagam kerajaan yang sah. Untuk mengkaji lebih jauh tentang peraturan perundang-undangan negara ini, ada baiknya terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang pentingnya piagam tersebut. Konstitusi, menurut Sri Soemantri, merupakan perangkat pemerintahan nasional sekaligus dasar negara. Ia

menyebutkan, telah minimal 3 elemen utama ingatan. Pertama, memastikan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Pembentukan bentuk negara yang sederhana. Dan distribusi dan dilema mandat konstitusional, yang juga penting. Seperti disebutkan di atas, faktor piagam harus ada dan pada saat yang sama berkembang menjadi tujuan nasional. Konstitusi tidak lagi mengizinkan pemerintah untuk memanipulasi urusan kerajaan secara sewenang-wenang. Piagam tersebut menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai filosofi aturan regulasi. Artinya, hak asasi manusia harus dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Perilaku upaya penegakan hak asasi manusia yang terbentuk dalam masyarakat, jelas, apabila dilakukan secara lembut tetapi secara virtual akan menciptakan rasa damai, tentran, serta aman hingga gerakan-gerakan yang menyimpang dari kenyataan tidak akan bangkit. saling mendukung alias saling membantu akan diperlukan disini apabila terdapat kenalan disekitar yang mengalami

kesusahan ataupun tertimpa musibah kami akan bantu menghibur mereka serta mengurangi beban mereka melalui tangan kanan kita, dari mata mereka bantuan dari kita tidak banyak tapi akan ternilai serta kebersamaan disini mungkin terikat dengan hangat, tangguh, dan puas. Guna menciptakan lingkup jaringan yang aman serta tanpa kekerasan, dimungkinkan untuk mengatur aplikasi siskamling dan dapat melestarikan olahraga pembersihan jalan di dalam jaringan.

Semakin erat kebersamaan maka secara otomatis persatuan akan semakin kuat tertancap. Sebab peru diketahui, energi tidak akan muncul apabila dari individu, tapi melalui semangat yang satu, dapat menolong orang lain dan menjaga tali silaturahmi agar tetap baik. Setiap orang juga harus mengenal masing-masing, karena kita menyadari bahwa seseorang adalah siap dengan hak asasi manusia dan kami berkewajiban untuk mencapai itu. Mengagumi dan mengakuinya karena hak ini tentu telah diberikan melalui Tuhan YME.

Maka dari itu, posisi kita sangat diharapkan dalam upaya penegakan HAM. Partisipasi di kehidupan yang normal untuk mewujudkan atau melakukan HAM yang baik dapat dicapai dalam lingkungan keluarga sendiri, lingkungan sekolah, atau lingkungan jaringan. Partisipasi dalam penegakan hak asasi manusia sangat penting dan harus siap dengan keberanian dan kesopanan.

b. Hubungan antara Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Soemantri mendefinisikan bahwa konstitusi sebagai muse negara memuat minimal 3 hal. Pertama, keamanan hak asasi manusia dan warga negara. pembentukan bentuk dasar kerajaan. departemen dan hambatan mandat konstitusional fundamental. Gaya hidup piagam bahwa penguasa tidak bisa seenaknya mengurus urusan negara. Konstitusi menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai filosofi aturan regulasi. Dengan kata lain, rule of thumb of law harus membela hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi

semakin terintegrasi ke dalam sistem politik. kejahatan yang demokratis. Gaya hidup berkonstitusi berarti bahwa pemerintah tidak dapat seenaknya menyelenggarakan urusan negara. Piagam tersebut menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai cara berpikir tentang aturan untuk pengaturan. Dengan kata lain, hak asasi manusia harus dilindungi oleh peraturan dan hukum. Hak asasi manusia semakin terintegrasi ke dalam sistem politik dan hukum yang demokratis.

Perlindungan hak bagi orang-orang di suatu legislasi negara berbentuk pedoman perintah yang sah dan ditegakkan melalui lembaga peradilan sebagai pelaksana keadilan. Peradilan dalam kerajaan peraturan regulasi, bagaimanapun, adalah energi bebas dan tidak memihak, selain pengaruh energi pemerintah. Hakim administratif, legislatif, dan pengawas langsung tidak memiliki kekuatan untuk mengarahkan kehendak mereka atas pilihan yang mengadili kasus tersebut. Dari

penjelasan tersebut akan menjadi jelas bahwa hubungan antara HAM dan rule of thumb of law tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat fabric. Anggota formal keluarga dalam hal membela hak asasi manusia merupakan fungsi kunci dari konsep negara hukum. Meskipun penanggalan ini dijelaskan secara material, aturan hukum harus berpedoman pada prinsip legalitas dalam semua tindakan pengelolaan negara. menunjukkan bahwa gerakan diarahkan untuk melindungi kebebasan bersama. Bentuk perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam pedoman hukum juga merupakan peradilan yang longgar, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh paksaan.

- c. Konstitusi Republik Indonesia memuat Hak Asasi Manusia

Konstitusi memainkan peran penting di setiap negara bersatu. dalam pengalaman bahwa sekelompok kebijakan tertulis dan tidak tertulis mengikat dan mengatur cara otoritas dikelola. Konstitusi



menampilkan keberadaan politik masyarakat sebagai kenyataan, bukan piagam dalam arti penjara. Dengan kata lain, piagam tersebut tetap berada dalam pengalaman sosiologis atau politik, bukan sebuah regulasi. Konstitusi disebut *rechversfasuung* hanya setelah faktor-faktor pengaturan ketatanegaraan yang hidup dalam masyarakat disebut kesatuan bangsa pidana. Kemudian manusia menempatkannya dalam tekstual sebagai hukum terbaik yang berlaku di Amerika Serikat ini. Piagam itu harus terus dan terus hidup (konstitusi yang hidup) sesuai dengan realita dan tantangan zaman, serta *zeitgeist*. UUD 1945 bukan sekedar catatan ideal atau catatan negara, namun juga menjawab berbagai persoalan publik. Kasus aborsi, penganiayaan anak, penyiksaan, diskriminasi, isu SARA, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, ketidakberdayaan hukum, kemiskinan, isu minoritas, dan lain-lain.

Peraturan Indonesia sekurang-kurangnya memiliki satu dokumen hukum yang berisi ketentuan hak asasi manusia.

konstitusi pertama (piagam negara). Ketetapan MPR (Tap MPR) adalah yang kedua. dalam aturan. Keempat, dalam hal pelaksanaan undang-undang dan kebijakan bersama pedoman kewenangan, peraturan presiden dan kebijakan administrasi yang berbeda. Manfaat mengatur Pencantuman hak asasi manusia dalam piagam memberikan jaminan yang sangat kokoh sebagai akibat amandemen dan/atau pencabutan pasal-pasal konstitusi melalui proses yang sangat sulit dan panjang. amandemen, seperti halnya dengan piagam Indonesia. namun faktor lemahnya adalah yang diatur melalui konstitusi namun yang paling efektif adalah regulasi global, termasuk Klausul Konstitusi Republik Indonesia memuat hak asasi manusia yang masih bersifat internasional. Kebijakan hak asasi manusia, di sisi lain, rentan terhadap undang-undang dan perintah pemerintah sulit untuk sering diubah.

Berkembangnya konsep HAM:

- a) Grup Awal berpendapat bahwa pertanyaan hak asasi manusia paling baik dipusatkan di penjara dan domain politik. Titik fokus pertanyaan hak asasi

manusia generasi pertama tentang regulasi dan politik distimulasi melalui konsekuensi dan contoh konflik global II, totalitarianisme dan keputusan untuk mendirikan negara netral baru tatanan penjara baru.

- b) Ideologi hak asasi manusia era kedua membutuhkan tidak hanya hak pidana, tetapi juga hak sosial, keuangan, politik dan budaya. Oleh karena itu, teknologi pertanyaan HAM yang kedua adalah difusi informasi tentang gagasan dan ruang lingkup HAM. pada teknologi kedua, hak-hak kriminal tidak lagi ditekankan, menumbuhkan ketimpangan dengan hak atas uang, budaya, dan politik.
- c) Teknologi ketiga sebagai respon terhadap teknologi dan kedua sebagai ideologi hak asasi manusia. Hak pembangunan merupakan kumpulan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum yang dijanjikan kepada generasi mendatang. dalam memprioritaskan keuntungan finansial atas hak-hak

lain, pelanggaran banyak hak asasi manusia, dan hak-hak ekonomi. Telah dirugikan dalam pelaksanaannya, dalam arti telah menyebabkan penderita dari teknologi ke-4.

- d) Teknologi keempat mengkritisi peran bangsa yang sangat dominan dalam metode pembangunan, kesadaran akan peningkatan moneter, dan berdampak buruk seperti: Mengabaikan aspek kesejahteraan manusia. apalagi, paket-paket perbaikan yang diterapkan tidak diarahkan pada keinginan masyarakat secara keseluruhan, tetapi pada keinginan elit organisasi. Generasi keempat dari pertanyaan hak asasi manusia Negara-negara Asia adalah pelopornya, dan pada tahun 1983, Deklarasi Hak Asasi Manusia, juga dikenal sebagai "pengumuman tanggung jawab penting Rakyat dan Pemerintah Asia".

Sebuah pemerintahan konstitusional memiliki tiga elemen:

- a. Manajemen adalah kepentingan umum.

- b. Otoritas diatur melalui peraturan yang sepenuhnya didasarkan pada ketentuan modern sebagai pengganti undang-undang yang acak mengesampingkan perjanjian dan struktur.
- c. Negara konstitusional cara kekuasaan yang dikendalikan melalui keinginan manusia, tekanan yang dilakukan oleh penguasa yang lalim (penguasa), bukan dalam bentuk paksaan.

Aturan main aturan dalam perkembangannya biasanya dipastikan melalui piagam negara, khususnya dalam hal hukum dan penegasan batas-batas energi negara untuk menjamin kebebasan dan hak istimewa penting dari rakyat dan perlindungan mereka. Hakikat Hak asasi manusia dilindungi oleh aturan hukum. Konsekuensinya, eksistensi piagam di pedesaan merupakan kondisi gelombang sinus (mutlak).

Preseden kejahatan: mungkin ada pengakuan normatif dan empiris dari kerajaan aturan regulasi bahwa semua masalah diselesaikan melalui

regulasi sebagai prinsip panduan tertinggi. Dari sudut rule of thumb of law, kepala negara yang terbaik pada hakekatnya bukan lagi seorang manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang terbaik.

Kesetaraan dalam pengaturan: Secara normatif disebutkan dan disadari secara empiris bahwa mungkin ada persamaan bagi semua orang dalam posisi kriminal dan di dalam negara. dalam kerangka sila kesetaraan ini, setiap mentalitas, dan perilaku diskriminasi dalam bentuk apapun dan ekspresinya didiagnosa sebagai sikap dan perilaku dilarang. Ini menargetkan kelompok sosial tertentu, mengejar mereka, dan mengembangkannya agar mereka mencapai tingkat perkembangan yang sama dan mengejar ketinggalan dengan dunia umum dari lembaga sosial yang mungkin jauh di muka.

Asas legalitas: Di semua negara hukum, asas legalitas harus diterapkan di semua dokumennya (metode kriminal normal). Statuta Tertulis. Peraturan penjara harus ada tulisan dan dipraktikkan sebelum atau

sesudah sebelum tindakan atau mosi yang terhormat. akibatnya, gerakan administrasi harus terutama didasarkan pada kebijakan dan metode.

Kelemahan listrik: Kekuasaan dan institusi  
Prinsip pemisahan kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal membatasi negara. Menurut aturan besi kekuatan, kekuatan harus cenderung tumbuh sembarangan, seperti yang dikatakan Lord Acton, kekuatan cenderung rusak, listrik absolut rusak secara virtual. dan terkendali dengan menggunakan keseimbangan dan pengendalian satu sama lain.

Kerangka eksekutif yang tidak memihak:  
Untuk membatasi kekuatan ini, lembaga negara yang tidak memihak termasuk lembaga keuangan utama, unit angkatan laut, polisi dan peradilan telah dikembangkan dalam teknologi hadiah. Selain itu, ada badan-badan baru bersama dengan Ombudsman, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Komisi Penyiaran. Perusahaan-perusahaan, badan-badan, atau badan-badan kita ini, yang

dulu dianggap memiliki kekuasaan pemerintahan penuh, kini telah berkembang menjadi mandiri dan memiliki kekuatan untuk memutuskan pengangkatan atau pemberhentian kepengimpinannya bukanlah hak luar biasa dari CEO.

Pengadilan Tata Usaha Negara: sekalipun ruang sidang Selain itu, administrasi negara mempersoalkan sila keadilan dewasa ini yang bebas dan tidak memihak, fungsi haknya sebagai pilar asas petunjuk perundang-undangan kontemporer tetap ingin ditekankan satu demi satu. Dalam setiap peraturan perundang-undangan, setiap warga negara berkeinginan untuk membuka kemungkinan zaman modern tugas ultra-modern memilih seorang raja yang dapat dipercaya dan menegakkan pilihan seorang hakim administrasi kerajaan (pengadilan tata usaha negara) melalui seorang raja yang berurusan dengan dapat diandalkan.

Agenda Mahkamah Konstitusi: selain format pengadilan tata usaha kerajaan yang canggih yang



diharapkan dapat menjamin tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, kerajaan penjara juga tidak biasa untuk melaksanakan gagasan pengorganisasian konstitusi terbaru ruang sidang di perangkat kerajaannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi kontemporer adalah memperkuat perangkat evaluasi dan stabilitas di antara cabang-cabang energi kontemporer yang sengaja dipisahkan untuk menciptakan demokrasi yang positif. Misalnya, pengadilan ini diberikan fitur untuk mempelajari konstitusionalitas saat ini petunjuk kejahatan yang mungkin muncul sebagai objek legislatif, dan untuk memutuskan banyak perselisihan baru-baru ini di antara bisnis pemerintah yang mereplikasi cabang-cabang terpisah di balik kekuasaan kerajaan.

Keselamatan Hak Asasi Manusia modern: ada keamanan konstitusional hak asasi manusia yang canggih dengan penjara memastikan kebutuhan untuk menegakkannya melalui proses yang tulus. perlindungan hak asasi manusia saat ini adalah fungsi penting regulasi demokrasi modern. setiap pria atau wanita mengingat fakta

bahwa pada awalnya memiliki hak dan tanggung jawab yang tidak memihak dan mendasar. Pembentukan negara modern dan pelaksanaan kekuasaan kerajaan baru tidak perlu mengurangi signifikansi atau signifikansi hak asasi manusia dan kebebasan. Akibatnya, kerajaan regulasi, atau perlindungan dan reputasi hak asasi manusia modern, merupakan pilar penting di setiap bangsa.

Demokratis: gagasan demokrasi atau kedaulatan dianut dan dipraktikkan yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses-proses pemilihan negara, sehingga setiap pedoman hukum dan kebijakan tersebut terjalin dan ditegakkan menunjukkan rasa keadilan yang bersemayam dalam masyarakat. Rekomendasi dan Pedoman Pemasarakatan yang berlaku sekarang tidak perlu lagi ditentukan dan dilakukan secara sepihak dengan strategi atau semata-mata untuk hiburan para penguasa yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi. dimaksudkan untuk menjamin tidak hanya kesenangan segelintir penguasa tetapi juga kenyamanan rasa keadilan bagi setiap

orang.

Berfungsi sebagai alat untuk menentukan tujuan negara: Peraturan adalah alat untuk mencapai tujuan. ideal di lingkungan yang tidak biasa. Pengertian hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui konsep kerajaan yang demokratis maupun tidak lagi melalui konsep negara pengatur (nomokrasi), dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Manipulasi sosial dan transparansi: Untuk membuat dan menegakkan kebijakan, ada keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan sosial dengan segala cara. Hal ini memungkinkan untuk mengisi celah dalam mekanisme kelembagaan yang andal. melalui partisipasi publik langsung yang akan memastikan keadilan dan fakta.

Perilaku upaya penegakan hak asasi manusia yang terbentuk dalam masyarakat, jelas, apabila dilakukan secara lembut tetapi secara virtual akan menciptakan rasa damai, tentran, serta aman hingga gerakan-gerakan yang

menyimpang dari kenyataan tidak akan bangkit. saling mendukung alias saling membantu akan diperlukan disini apabila terdapat kenalan disekitar yang mengalami kesusahan ataupun tertimpa musibah kami akan bantu menghibur mereka serta mengurangi beban mereka melalui tangan kanan kita, dari mata mereka bantuan dari kita tidak banyak tapi akan ternilai serta kebersamaan disini mungkin terikat dengan hangat, tangguh, dan puas. Guna menciptakan lingkup jaringan yang aman serta tanpa kekerasan, dimungkinkan untuk mengatur aplikasi siskamling dan dapat melestarikan olahraga pembersihan jalan di dalam jaringan.

Semakin erat kebersamaan maka secara otomatis persatuan akan semakin kuat tertancap. Sebab peru diketahui, energi tidak akan muncul apabila dari individu, tapi melalui semangat yang satu, dapat menolong orang lain dan menjaga tali silaturahmi agar tetap baik. Setiap orang juga harus mengenal masing-masing, karena kita menyadari bahwa seseorang adalah siap dengan hak asasi manusia dan

kami berkewajiban untuk mencapai itu. Mengagumi dan mengakuinya karena hak ini tentu telah diberikan melalui Tuhan YME.

## **B. Dasar Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

### **a. Penegakan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Penuntutan pidana, terutama tentang hak asasi manusia, masih belum ada di Indonesia. Pada dasarnya, juga di pengadilan agama memutuskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, yang khusus, dikaitkan dengan perjanjian internasional. Melihat hubungan penuntutan kriminal sekarang ini, kebanyakan orang akan melihat beberapa pengaturan perkara yang belum mulai tuntas diselesaikan. Seperti yang sering kita perhatikan, metode pemikat bisa memakan waktu lama jika ada kasus pengadilan, yang terdiri dari masalah tuduhan mafia peradilan dan suap yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pengadilan terus memiliki motif

rutin. secara formal melanggar hukum karena diputuskan sesuai dengan metode kejahatan yang berlaku. Perbedaan antara pengadilan dan lembaga lainnya adalah bahwa pengadilan selalu energik dan aktif mengamati dan menerapkan ketentuan pidana yang berbeda yang berlaku di AS dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Penegasan Pancasila menyangkut hak asasi manusia mengandung konsepsi orang itu diciptakan melalui Tuhan maha kuasa, dan memiliki dua dimensi: ukuran individu (pribadi) dan ukuran sosial (masyarakat). Karena itu, semua kebebasan manusia dibatasi oleh hak manusia lainnya. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki wajib untuk memahami mengakui hak orang lain. Kewajiban ini juga berlaku untuk perusahaan dengan berbagai ukuran, khususnya provinsi dan pemerintah, khususnya provinsi Indonesia. oleh karena itu, negara dan penguasa berkewajiban untuk mengakui, melindungi, melindungi, dan

menjunjung tinggi hak-hak rakyat semua penduduk dan bisnis tanpa keberatan. Ir. Menurut keterangan Soekarno, falsafah Pancasila dibangun atas dasar kekeluargaan. kali disampaikan kepada masyarakat karena dasar filosofis negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan.

Hidup manusia pada dasarnya berpijak pada falsafah Pancasila, sehingga orang Indonesia memandangnya sebagai kehidupan kerabat. Pembukaan membahas kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Piagam 1945 yang menghidupkan setiap pasal dalam isi teksnya, khususnya yang mengenai persamaan hak hukum dan politik dari lukisan tempat tinggal yang terhormat, serta kebebasan rekan, berkembang dan berhak untuk mengumpulkan, mengungkapkan pikiran secara lisan dan tulisan, bebas untuk mewujudkan suatu agama dan berperilaku sesuai dengan agama atau persepsinya sendiri, selain untuk dididik dan diajari. politik penjara yang mungkin terlihat dari abad yang

lalu hingga yang berlaku. Hukum hak asasi manusia yang sederhana:

1. Pancasila
  - a) Kepopuleran kelayakan dan status manusia sebagai makhluk yang diberikan Tuhan.
  - b) Menghormati sesama, memahami tanggung jawab dan hak yang sama tanpa memandang keturunan, kepercayaan, ideologi, jenis kelamin, etnis, warna kulit, dan status sosial atau kebangsaan.
  - c) Bekerja menuju cinta timbal balik terhadap orang lain, toleransi, dan pola pikir tidak hanya berdasarkan penampilan.
  - d) Terus bekerja sama, menghargai, terus dicoba membantu orang lain.
  - e) Adil dan berani juga tulus dalam melindungi kebenaran dan keadilan.
  - f) Dengan mengakui bahwa manusia adalah sama, orang Indonesia merasa bahwa mereka adalah bagi setiap orang.



## 2. Pembukaan Piagam

Piagam 1945 menyatakan bahwa "kemerdekaan" adalah milik semua bangsa, yang mengarah ke penjajahan global. bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan dan harus dihapuskan. Itu adalah deklarasi resmi karena semua negara menginginkan kemerdekaan. Bahkan, di Amerika Serikat yang netral, ada yang ingin lepas dari penindasan penguasa, bisnis, dan lain-lain, serta ingin tidak memihak.

## 3. Sesuai dengan UUD 1945

- a) Partisipasi yang setara dari rakyat dalam pemerintahan dan hukum (ayat 1 Pasal 27).
- b) Hak untuk bekerja dan tempat tinggal yang layak (ayat 1 pasal 27).
- c) Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
- d) Hak atas pikiran tertentu secara lisan atau tertulis (pasal 28).

- e) Kebebasan menjalankan keyakinan dan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya (ayat 2 pasal 29).
  - f) Hak atas pendidikan dan pertumbuhan (ayat 1 Pasal 31).
  - g) Hak Asasi Manusia Dalam Kepailitan XA, Pasal 28 a sd 28 j.
4. UU Hak Asasi Manusia Tahun 1999, Peraturan No.39
- a. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab utama untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai imbalannya dimunculkan oleh hak asasi setiap individu.
  - b. Dalam melaksanakan kebebasan dan haknya, semua orang wajib menyesuaikan diri dengan batasan-batasan yang ditetapkan dengan menggunakan peraturan.
5. Ruang Sidang HAM merupakan subjek UU No. 26 Tahun 2000

Untuk mengambil bagian dalam jaga perdamaian internasional dan memastikan pelaksanaannya hak asasi manusia bersama dengan memberikan keselamatan, keadilan, kepastian, dan keamanan bagi umat manusia, maka penting untuk segera membangun ruang sidang HAM untuk menyelesaikan pelanggaran berat.pelanggaran hak.

6. Peraturan Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi secara global dengan bantuan Republik Indonesia

- i. Peraturan Republik Indonesia
- ii. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan telah diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1984.
- iii. Hak asasi manusia diakui oleh dunia pada tahun 1948 (proklamasi hak asasi manusia dalam skala global).

b. Penerapan pada Pelanggaran HAM

Pancasila telah ditetapkan sebagai pedoman sederhana bangsa Indonesia, maka ada pedoman

tentang hak asasi manusia, meskipun secara implisit. Pertama, keyakinan pelanggaran HAM adalah segalanya suatu perbuatan, baik disengaja maupun tidak, dengan bantuan seseorang atau lembaga manusia, termasuk lembaga negara, yang berkurang secara illegal, menghambat, membatasi, atau meniadakan hak individu. ini adalah majikan yang termasuk dalam hukum. khawatir tidak menerima atau menerima perjanjian kejahatan atas dasar mekanisme hukum yang adil dan benar relevan. melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Ia mengatakan itu akan. Keempat, Pasal 104 mendefinisikan pengadilan HAM sebagai berikut: pengadilan hak. menurut ayat (2) ruang sidang berwenang mengadili.

Manusia ditugaskan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya kejahatan genosida, khususnya perusakan atau pemberantasan semua atau sebagian dari negara, etnis, ras pendirian non-sekuler dengan bantuan

penggunaan tindakan membunuh individu yang ditunjuk. menyebabkan konflik tubuh dan intelektual yang penting bagi anggota kelompok. mengembangkan situasi keberadaan yang diarahkan untuk memusnahkan organisasi. Pengenaan tindakan yang disengaja tentang lahir di dalam institusi. pemindahan anak muda secara paksa antar organisasi.

Pelanggaran hak asasi manusia meluas, khususnya di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan diremehkan, keadilan disalahgunakan, dan kebenaran serta kejujuran tampak jauh dari kenyataan. Pelanggaran hak asasi manusia muncul setiap hari, dan kehidupan warga tidak terjamin hak asasinya ditegakkan melalui pemerintah. Perdagangan laki-laki dan perempuan merupakan salah satu pelanggaran HAM di Indonesia. Para penderita jual beli manusia merupakan subjek kelas atas karena sering menikmati perlakuan sangat tidak baik. Jual beli manusia adalah latihan kejahatan yang harus dihentikan dan dihilangkan

di planet ini. karena manusia sebagai makhluk yang bermartabat tidak lagi harus direndahkan, dilecehkan, dipermalukan, atau dipermalukan. dalam konteks ini, Pasal 100 peraturan Hak Asasi Manusia mengakui secara mutlak hak setiap orang, organisasi, perusahaan politik, badan jaringan, partisipasi organisasi non-pemerintah atau jaringan bisnis lainnya dalam pemajuan, perlindungan, dan penjualan hak asasi manusia. Ia mengatakan itu akan. Dipicu oleh tragedi Reformasi 1998, diperlukan penyesuaian terhadap mesin politik Indonesia saat itu dengan menggunakan aparat kepolisian untuk benar-benar melakukan klarifikasi di luar kasus dan mendukung sistem keuangan. Sebagaimana diketahui, pada era Orde Baru telah terjadi berbagai pelanggaran HAM baik secara vertikal (kejahatan terhadap warga melalui penguasa negara) maupun horizontal (kejahatan antarwarga), dengan jumlah yang sangat besar tergolong (kejahatan HAM berat). pelanggaran). ini direnungkan dalam insiden

penangkapan ilegal, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, serta penyerangan terhadap pemuka agama dan keluarganya serta pembakaran rumah dan tempat ibadah. Selain itu, dapat pula Penyelenggara negara dan pejabat publik yang seharusnya menegakkan peraturan dan melindungi warga negara malah mengintimidasi, melecehkan, menghilangkan paksa, atau membunuh orang. Ini adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan lainnya telah menjadi hal yang biasa di sepanjang generasi Orde Baru. Untuk mempertahankan kekuasaannya, para penguasa Orde Baru menggunakan kekerasan untuk membungkam oposisi, menegakkan aturan ekonomi, dan mempertahankan kekuasaan. Serangkaian aksi kekerasan menyusul, dimulai dengan penumpasan gerakan kiri pada pertengahan 1960-an dan menyebar ke bagian lain dari masyarakat: Soekarno didukung oleh

gerakan nasionalis, umat Islam yang menolak satu sila Pancasila, aksi mahasiswa, pemburu aktivis, petani dan sebagainya. atau nanti perang untuk integrasi di Timor Leste.

Dalam hukum negara luas mungkin ada perbedaan antara tanggung jawab hukum perdata (bangsa) dan pidana (karakter) yang terutama didasarkan pada tindakan yang disengaja atau kelalaian atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum. penjahat dan tanggung jawab perdata, kedua jenis tugas Meskipun memiliki kemampuan yang sama, ini berbeda satu sama lain. niat yang sama. tugas pidana mempunyai fungsi pidana preventif, khususnya pencegahan, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan takdirnya. Tanggung jawab perdata, sekali lagi, memiliki fitur yang sama, tetapi lebih menekankan pada hobi penderita. misalnya, untuk memberikan kompensasi kepada korban, pola kompensasi dapat berwujud atau tidak berwujud. Tanggung jawab hukum



perdata muncul ketika negara gagal untuk menghormati hak asasi manusia dengan menggunakan pelanggaran hak orang melalui hukum atau perpindahan rumah, atau dengan cara menolak untuk mengadili penjahat.

c. Institusi yang mampu menginvestigasi HAM

Negara hukum adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, tidak ada aturan, kekuasaan, atau kegiatan ilegal yang dilarang yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan faktor-faktor kehidupan negara di Indonesia ini. Peradilan Indonesia merupakan bagian dari ciri peradilan sebagaimana diatur dalam piagam. Gaya hidup ruang sidang adalah wadah penegakan hukum di amerika serikat ini. Peradilan adalah suatu kerangka yang bertugas menilai dan melaksanakan norma-norma pidana berlaku bagi negara suatu Negara menjalankan ciri-ciri peradilan sebagai tempat menuai rangkaian ekuitas itu tidak sewenang-wenang. Di sekitarnya kejahatan di Indonesia, permasalahan HAM

saat ini banyak disinggung dan seringkali menjadi bahan perbincangan dan perdebatan tidak hanya dalam seminar, diskusi dan lokakarya, tetapi juga di kalangan pelaku kejahatan. Hak asasi manusia telah berkembang sejak lama. tetapi, hak asasi manusia pada saat ini merupakan masalah yang mendunia.

Namun, pada praktiknya, aturan dan hukum yang mengaturnya belum mampu menjawab semua permasalahan HAM. yang dapat timbul sebagai akibat dari globalisasi dan peradaban manusia. Dalam pengadilan yang kekuasaannya tidak lagi bergantung pada pengaruh pemerintahan pemerintah, penempatan hakim perlu dijamin secara hukum.

Ada empat badan yang bisa mengadili pelanggaran HAM di Indonesia secara hukum.

- 1) Pengadilan.
- 2) Pengadilan militer
- 3) Pengadilan agama
- 4) Sidang pengadilan perdagangan

Di lokasi 4 pengadilan tersebut, pelanggar HAM dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM sesuai dengan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia, tentu saja berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas. Pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM. pilih kasih. Itu merupakan pelanggaran hukum yang serius yang membutuhkan segera ditindak agar masyarakat tidak mudah melanggar aturan tersebut. Pelanggaran HAM, khususnya di Indonesia, mengobati “trauma” manusia lain. Kegunaan pengadilan HAM *advert hoc* merupakan hal baru bagi pengadilan Indonesia dan telah menarik perhatian domestik dan internasional. Demi kredibilitas, identifikasi yang berwibawa dan jujur dari pengadilan HAM Indonesia. Sejumlah besar spesialis dan mahasiswa yang membaca instrumen HAM internasional, termasuk implementasi global pengadilan HAM *ad hoc* Indonesia, sangat berharga.

Hak adalah hak asasi manusia. dimiliki semua orang karena mereka adalah manusia. Kemanusiaan sekarang diberikan kepadanya dengan bantuan masyarakat

atau sepenuhnya didasarkan pada pedoman yang baik, tetapi sepenuhnya didasarkan sepenuhnya pada martabatnya sebagai manusia. hak-hak ini bersifat reguler dan tambahan tidak dapat dikesampingkan. Teknik ini adalah bahwa tidak peduli seberapa buruk obat yang telah dibuat dengan bantuan penggunaan seseorang atau tidak peduli seberapa kejam obatnya, seseorang tidak akan menyelamatkan Anda sebagai manusia dan akibatnya masih memenuhi hak-haknya. Hak itu terhubung dengannya sebagai individu. setiap orang memiliki kewajiban kepada komunitas di mana dia dapat membesarkan pria atau wanitanya secara penuh dan bebas dalam menjalankan kebebasan dan hak mereka, kita semua mungkin baik-baik saja mengingat kendala yang diputuskan dengan bantuan penggunaan aturan untuk satu-satunya alasan memastikan popularitas hak dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memuaskan keinginan sederhana dalam subjek elegan kesopanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam demokrasi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan kebebasan

dan hak ini dengan cara yang ciri dan pemikiran negara-negara Amerika Serikat. Dapat dipahami bahwa di manapun seseorang hidup baik secara utuh maupun singkat dengan berbagai kemampuan, khususnya kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada disekitarnya dalam hal pelarangan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Dalam contoh ini, penekanannya adalah pada lingkup terdekat, bersamaan dengan etnisitas; adat istiadat dan nilai serta norma yang tidak tertulis.

#### d. Penegakan Hak Asasi Manusia

Pemolisian merupakan kemampuan penting dalam memutuskan pelaksanaan yang efektif dari berbagai strategi keamanan kebebasan dasar di bidang kebebasan bersama, politik, moneter, dan sosial-sosial. Akan sulit untuk mencapai situasi di mana hak asasi manusia diakui dan dihormati dengan baik tanpa hukum penegakan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak asasi manusia terutama menitikberatkan pada pemeliharaan hubungan kekeluargaan yang serasi, seimbang, dan serasi antara

penduduk dengan warga negara dan pemerintah, menurut asumsi normatif tradisional. Dalam konteks sikap masyarakat Indonesia terhadap corak pergaulan, contoh-contoh kriminalisasi pelanggaran HAM seharusnya tidak hanya diarahkan pada aparat itu sendiri, tetapi terlebih lagi pada hubungan antar warga negara dari berbagai suku bangsa. Hasil penting dari proliferasi hak-hak asasi manusia oleh pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengontrol gerak-gerik masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat mengantisipasi realitas pemasyarakatan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan sosial dan perlindungan kriminal adalah dua bagian dari jenis hukum ini yang melayani tujuan yang sama: jaminan sosial. Tujuan ini berlangsung dari Kongres Amerika Serikat ke-4 di Pencegahan Kejahatan dan Perawatan Pelanggar yang diadakan di Tokyo pada tahun 1970 hingga Kongres

Negara-negara Serikat keenam. Diartikulasikan pada konferensi lokasi internasional United di Caracas pada tahun 1980, itu membuat spesialisasi pembangunan budaya, politik, sosial dan keuangan. kesimpulan utama dari dua konferensi terakhir dalam konteks penegakan perjanjian hak asasi manusia adalah bahwa masing-masing peraturan sosial dan pidana harus juga mengingat elemen politik, sosial, budaya, dan ekonomi berlaku. kebutuhan internasional. Secara konseptual, istilah “tindak pidana” mencakup cakupan yang luas dan mencakup tidak hanya prosedur peradilan tetapi juga situasi hukum, prosedur penjara, dan pengaturan. di mana peraturan itu diterapkan. Keadaan kejahatan yang dimaksud menyangkut sistem pembentukan hukum yang berkaitan dengan bentuk energi yang dominan. tentang hak asasi manusia, karena pelatihan kemerdekaan melalui BPUPKI, pedoman konstitusi negara Republik Indonesia dimulai, dan berbagai undang-undang dan kebijakan tentang hak asasi manusia dipertimbangkan dan disusun.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa skenario kejahatan di Indonesia terkait dengan praktik berbagai hukum dan peraturan hak asasi manusia berkembang pesat, bahkan menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat kesadaran dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, tentunya salah satu masalah kriminal terbesar di Indonesia adalah kerumitan dalam memaksakan atau menerapkan undang-undang tentang hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi berbagai perangkat hak asasi manusia, melampaui sejumlah kebijakan dan hukum tentang hak asasi manusia, dan mengubah konstitusi yang memuat konsep-konsep hak asasi manusia, namun kebijakan tersebut masih bersifat normatif. Hak asasi manusia diwujudkan melalui aturan, sikap, gaya hidup, pandangan dan penegakan hukum untuk memperoleh situasi dimana manusia hidup damai, menghormati perbedaan orang lain dan mengalami realitas manusia. harus mengatakan. Setidaknya ada batasan-batasan penting dalam implementasi HAM di Indonesia. khususnya, memastikan



perlindungan hak asasi manusia normatif dan memastikan keamanan yang masuk akal. Karena jaminan konstitusional dalam Sebuah negara yang mengklaim memiliki negara hukum yang demokratis harus menjadi jaminan. terbaik, pencantuman standar hak asasi manusia dalam piagam harus menjadi jaminan mutlak hak asasi manusia dalam sistem menjadi kerajaan.

Hak asasi insan merupakan suatu hak menurut Tuhan Yang Maha Esa yg memang telah terdapat atau pada berikan semenjak insan lahir, atau bahkan ketika masih berada pada kandungan. Hak insan merupakan suatu hak yg wajib pada jaga, pada hormati sang siapapun terhadap siapapun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, ras, agama, dll nya. Hak asasi insan merupakan aturan normatif yg mengungkapkan bahwa insan itu mempunyai hak, yg terdapat dalam dirinya, lantaran Ia merupakan seseorang insan. Hak asai insan ini berlaku dimanapun, kapanpun, & sang siapapun. Sehingga hak asasi insan ini pada sebut menjadi Hak yg Universal. Pelanggaran HAM berat mengacu

pada dua konsep utama:

Pertama, pelanggaran prinsip non-transferable rights atau pelanggaran norma-norma yang ditaati oleh suatu negara atau lembaga negara kepada warga negaranya. Hak yang dimiliki manusia tidak dapat diambil, terdapat dalam hak apapun termasuk hak berpolitik. Bangsa-bangsa di seluruh masyarakat internasional dan tidak boleh dilanggar atau dikurangi, jika lebih banyak bangsa di dunia yang setuju Itu adalah norma yang hanya dapat diubah oleh Terima dan akui berbagai norma yang Anda ikuti. Kedua, pelanggaran HAM berat terjadi ketika negara mengizinkan atau benar-benar melakukan kejahatan berat. Padahal mengadili para pelaku kejahatan internasional adalah keharusan absolut bagi warga dunia (*obligatio erga omnes*) lantaran para pelaku tadi adalah musuh beserta manusia. Menurut Human Rights Careers, ketika pejabat pemerintah tidak mengambil tindakan untuk melindungi individu dan kelompok yang rentan, mereka terlibat dalam pelanggaran hak. Menurut aturan Indonesia sendiri.

Piagam adalah gagasan tentang peraturan dan pemerintahan negara dan sumber peraturan dan politik. Namun, praktik menunjukkan bahwa jaminan konstitusional Hal ini masih jauh dari harapan. Masih banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur hal tersebut jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. pada akhirnya, jaminan konstitusional Karena belum ditegakkan dengan baik, seringkali hanya berlaku di atas kertas. Secara tangkas, kepolisian dalam perkara pidana adalah penyidik, penyidik umum, dan hakim. Hakim dan pihak yang berperkara adalah penuntut dalam perkara perdata, seperti pengadilan agama. Hakim, jaksa , dan penyelenggara negara berfungsi sebagai petugas penegak hukum dalam kasus-kasus administrasi negara. Pengacara menegakkan hukum dalam setiap kasus tersebut. juga bisa terlibat sebagai pelaku. Departemen pemerintah negara bagian juga memiliki hobi dalam penuntutan kriminal. Ini terdiri dari petugas bea cukai, petugas imigrasi dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum di

lingkungan pemerintahan. akibatnya, masalah penegakan peraturan harus menjadi perhatian semua lembaga penegak hukum, bukan hanya peradilan. Perspektif yang paling efektif dapat diharapkan untuk mencapai termasuk penegakan peraturan yang menjamin keadilan di semua mata pelajaran dan untuk semua orang yang mencarinya. Demikian pula dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia, terdapat banyak lembaga kebebasan bersama baik di tingkat dunia maupun publik. Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat.

Di daerah kosong, penegak hukum tidak merebut wilayah, tetapi mengambil tempat di masyarakat, dan juga dapat diilhami melalui konteks dan situasi interaksi antara orang-orang dalam masyarakat. Dalam masyarakat dengan struktur hak istimewa berdasarkan status atau yang menciptakan perbedaan bersih antara si kaya dan si miskin, atau dalam masyarakat miskin, atau dalam lingkungan otokratis, terbuka dan egaliter hukum yang berfluktuasi dalam masyarakat menjadi jelas. Ada dua faktor budaya dan

sosial ekonomi yang dapat menghambat hipotesis penegakan hukum. Pertama, dilatarbelakangi oleh kurangnya kepedulian terhadap masyarakat dan sekitarnya serta ketakutan. Hal ini dapat terjadi karena komposisi masyarakat mewujudkan kehendak penguasa, atau karena mesin menindas mereka, menyangkal keinginan atau keberanian mereka untuk membela atau melawan sarana itu. perhatian tertuju pada berbagai macam tekanan publik yang sering dibesar-besarkan dalam penegakan hukum, terutama karena teknologi Reformasi. Pendapat dan opini publik sangat penting untuk menyelamatkan Anda dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan dalam penegakan hukum. namun kami harus memastikan bahwa ulasan dan pandangan kami tidak menimbulkan tekanan yang memalukan atau kekhawatiran penuntutan. masalah-masalah di lingkungan penegakan hukum juga terampil dengan bantuan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Banyak pelanggaran melestarikan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat selain lembaga penegak

peraturan. lembaga masyarakat yang mewakili usaha massa untuk melakukan gerakan main hakim sendiri dengan memanfaatkan hak milik manusia lain berupa gedung, perusahaan, mobil, dan lain-lain, selain menegakkan hak asasi manusia yang menghargai rasa keadilan manusia. Demikian pula tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan yang berlebihan merupakan persoalan yang masih belum terselesaikan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi pelaksanaan hak asasi manusia.

### **C. Kedudukan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**

- a. Instrumen hukum penegakan hak asasi manusia sesuai dengan hukum nasional di Indonesia

Isu HAM saat ini bukan sekadar masalah rumah tangga, tetapi juga masalah dunia. Gaya hidup hak asasi manusia memanifestasikan dirinya dalam banyak hal, bersama dengan efek gaya hidup kewajiban manusia. tugas tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah atau bersamaan. mempertahankan HAM dewasa ini di

Indonesia menghadapi banyak tantangan serius. sebagai contoh, di bidang keuangan, orang Indonesia biasanya hidup di garis kemiskinan dan kebanyakan dari mereka melakukan pelanggaran HAM karena alasan keuangan. Dalam situasi ini, usulan strategi untuk mengatasi masalah penegakan HAM di Indonesia harus ditempuh melalui restrukturisasi perangkat hukum rumahan Indonesia melalui restrukturisasi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sangat diharapkan perangkat hukum dalam negeri dapat direorganisasi dan perangkat penegakan HAM dapat dimajukan secara berarti. Perangkat musik adalah peralatan dan bahan dasar. Sejalan dengan Mochtar Kusumaatmadja, gagasan regulasi adalah cara aturan dan prinsip digunakan mengubah kekayaan hidup tatanan kehidupan bermasyarakat, dan perlu mencakup pranata atau pranata dan taktik yang diinginkan untuk pembentukan hukum. berkas perkara pidana dalam contoh ini harus diartikan sebagai dokumen atau yayasan dan bukan

sebagai pedoman hukum. Sebaliknya, hak asasi manusia dijelaskan melalui hak-hak yang benar-benar dimiliki orang karena fakta bahwa mereka adalah manusia dan karena mereka mungkin terutama didasarkan pada martabat manusia. bukan karena masyarakat menyediakannya atau karena hukum positif membantu memberi mereka hak asasi manusia.

Banyaknya kejadian dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi saat ini membuktikan bahwa baik manusia Indonesia, polisi maupun aparat penegak hukum sama-sama mengakui dan tidak mengakui hak asasi manusia dan kewajibannya sebagai manusia. pertumbuhan. Hak asasi manusia dapat bersifat dan berkarakter secara mutlak jika semua orang dalam masyarakat tidak melupakan, melaksanakan dan mengakui tanggung jawabnya dengan menggunakan haknya. Lebih dari Akibatnya, hak asasi manusia dapat tetap ada dan berfungsi secara efektif sementara setiap orang mengakui bahwa haknya sendiri dibatasi oleh hak



orang lain. Menurut saya, setiap orang memiliki hak yang sama yang perlu dihormati. Peraturan, dalam hal ini kapasitas sebagai instrumen hukum untuk menegakkan hak asasi manusia Indonesia. Dengan kata lain, perlu diikuti, ditegakkan, dan ditegakkan agar berfungsi sebagai alat untuk menegakkan peraturan. mekanisme peradilan yang tidak mendiskriminasi dan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak yang bertanggung jawab atas dasar peradilan pidana, dan dicapai sesuai dengan mekanisme hukum yang benar.

- b. Fungsi regulasi internasional dalam penegakan hak asasi manusia

Perilaku gaya hidup sosial pada dasarnya membutuhkan pedoman antara satu hobi dan hobi lainnya setidaknya untuk diminimalkan dan dihindari agar tidak terjadi. Masyarakat sebagai kesulitan hukum merupakan bagian penting dari suatu negara yang disebut subjek regulasi global. namun, peraturan dan undang-undang yang ada biasanya tidak bisa

seungguhnya melupakan kepentingan kita semua. Hal ini membutuhkan pengetahuan tentang peraturan yang mengatur hak karakter. apa yang mungkin terjadi di seluruh dunia masih dianggap baru mengenai hak asasi manusia, manusia dan hukum orang di seluruh dunia. kita menyadari situasi di dalam dunia internasional di mana manusia tidak bertanggung jawab secara langsung, namun harus ada aturan yang membatasi otoritas manusia dalam manajemen publik. Ini tentu saja bukan kewajiban beberapa individu, atau bahkan beberapa kekuatan penting. namun semua negara harus memperlakukan masalah global sebagai tugas bersama untuk menciptakan planet yang lebih aman bagi generasi mendatang untuk tetap hidup.

Hukum relevan dengan hak asasi manusia. global memiliki sifat kembar yaitu menciptakan hambatan untuk jaminan kebebasan dasar yang kuat menawarkan metode untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Tidak, karena aktivitas mereka tunduk pada

berbagai pembatasan di bawah hukum internasional. karena semua Negara sama-sama berdaulat, tidak ada negara yang diwajibkan untuk mematuhi keputusan pengadilan internasional kecuali negara tersebut sebelumnya telah setuju untuk melakukannya. Ketika hak asasi manusia menjadi bagian dari peraturan internasional sebagai lawan dari peraturan rumah, negara-negara yang terlibat tidak dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia secara inheren merupakan bagian dari yurisdiksi mereka.

c. Gadget Hak Asasi Manusia sebagai Hukum Global

Peraturan di seluruh dunia biasanya didefinisikan sebagai seperangkat pedoman dan aturan yang mengikat dan menyesuaikan anggota keluarga antara negara dan entitas kejahatan lainnya dalam keberadaan jaringan global. Persepsi hukum internasional oleh para ahli hukum terkemuka Itu sebelumnya terbatas pada negara sebagai sistem penjara. Namun, dengan perkembangan pesat abad ini, ke-20,

khususnya dengan meningkatnya kerja sama dan saling ketergantungan antar lokasi internasional, proliferasi organisasi internasional telah memperluas cakupan regulasi global. terlebih lagi, hukum internasional sekarang mengatur tidak hanya anggota keluarga di antara negara-negara, tetapi juga subjek kriminal yang berbeda bersama dengan organisasi dunia, perusahaan supranasional, dan gerakan pembebasan nasional. peraturan di seluruh dunia juga berlaku untuk orang yang berbisnis dengan Negara. peraturan global karena alasan ini dapat dirumuskan sebagai norma atau pedoman yang mengatur hak dan kewajiban subjek. kejahatan di seluruh dunia: Negara, organisasi dan organisasi internasional, dan dalam beberapa kasus individu. hukum dunia saat ini tidak hanya mengatur masalah yang terkait dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga mengendalikan politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan dekolonisasi hak asasi manusia untuk memperoleh kemakmuran, kerukunan dan mata

pencabaran antar negara.

Sejalan dengan JG Starke, sumber materi penjara global adalah zat-zat yang pada kenyataannya digunakan oleh pro penjara di seluruh dunia untuk menentukan hukum yang berlaku pada benda atau scenario yakin. materi pidana Ini dicirikan menjadi 5 laporan, yang bea cukai, perjanjian kesepakatan, pilihan ruang sidang atau karya, badan arbitrase, atau pengajaran keputusan atau hukum keputusan lembaga global. Statuta Pengadilan Dunia, Pasal 38 (1), tidak mencakup pemilihan yang dilakukan oleh badan kami melalui jatuh tempo dalam arbitrase internasional melaksanakan persetujuan perselisihan arbitrase badan kami adalah pilihan hukum yang paling efektif dan penyelesaian peristiwa-peristiwa dalam perjanjian tersebut . Dalam kesepakatan global, sebagaimana tercatat dalam Pasal 38 (1) Keputusan Ruang Sidang Resmi Sedunia (ICJ) disebutkan:

"sumber utama hukum hak asasi manusia

global adalah konvensi (perjanjian) sedunia yang dapat dibakukan dan sesuai, menetapkan norma-norma kriminal yang didiagnosis dengan bantuan negara-negara yang berpartisipasi." Pasal 38(1) ICJ juga mendefinisikan kebiasaan internasional sebagai kegiatan yang dapat menjadi rutin dan terpanggil peraturan, asalkan setidaknya 2 faktor terpenuhi, yaitu detail kain dalam bentuk latihan tindakan berulang, sehingga dapat disahkan sebagai kebiasaan dan detail mental tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum yang disebut yurisprudensi *sive necessitatis* dan tidak selalu terkandung dalam norma tertulis Sebagai sumber hukum hak asasi manusia global, Pasal 38 (1) ICJ juga memuat seluruh peraturan konsep yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keseluruhan pemikiran tentang regulasi merupakan pedoman penting yang harus dijaga tercakup dalam tatanan pidana Keadilan di antara orang-orang. Ajaran trendi Ia juga dikenal sebagai dengan ius

cogens, yang menyatakan bahwa peraturan yang dianut tidak boleh lagi menyimpang dari konsep umum peraturan. pilihan pengadilan Selain itu, aset hukum termasuk bimbingan yang diberikan oleh para profesional hukum. hak asasi manusia di seluruh dunia oleh Pasal 38(1) ICJ. dalam pengaturan ini, pilihan global court of Justice (ICJ) memiliki lokasi unik sebagai sumber regulasi global.

Norma dan persyaratan hak asasi manusia berasal dari aturan global. aset reset peraturan global sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat 1 piagam pengadilan sedunia mencakup 3 aset reset utama dan 2 aset tambahan. Properti reset hukum adalah:

1) Regulasi Perjanjian Dunia :

Kesepakatan global adalah kesepakatan yang dibuat melalui kontributor jaringan global termasuk Negara-negara, yang bertujuan untuk membuat peraturan agar

memiliki konsekuensi pidana. Bentuknya bisa berupa perjanjian, konvensi, kesepakatan, dan lainnya.

2) Peraturan Global yang Lazim :

Kebiasaan di seluruh dunia (hukum kebiasaan global) adalah kebiasaan internasional di beberapa lokasi internasional di dunia, latihan yang saat ini menjadi mode, kemungkinan besar disukai.

3) Prinsip Hukum Biasa :

Konsep hukum biasa adalah gagasan kriminal saat ini yang ada dan diamati di dalam rekomendasi pidana nasional negar-negara di sekitar arena. Prinsip ini mendasari perangkat peraturan penghasil uang dan lembaga kriminal di dunia internasional.

4) Keputusan Juri:



Pemilihan map ruang sidang internasional merupakan pasokan lebih lanjut dari peraturan untuk 3 pengaturan ulang utama peraturan di atas. Pemilihan berkas perkara di ruang sidang ini paling efektif mengikat peristiwa yang disengketakan. Namun pemilihan pilihan dapat digunakan untuk menunjukkan kehidupan peraturan pidana global tentang suatu kasus, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada 3 aset utama peraturan di atas.

5) Pendapat para profesional kriminal global:

Tinjauan para profesional kriminal global utama adalah konsekuensi dari studi dari pos umum digunakan untuk saran untuk menemukan apa adanya dimaksud dengan regulasi global. Namun, pendapat ini bukanlah sebuah peraturan.

Instrumen Hukum Nasional Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia, seperti yang kita semua tahu, adalah hak fundamental. semua orang. orang di mana pun memiliki martabat dan nilai yang sama. itu pada dasarnya sama apakah Anda berkulit baik putih atau hitam, atau tumbuh. perbedaan penampilan dan tahap perkembangan negara bukanlah halangan bagi hak identik untuk manusia. Hak orang bukanlah hadiah Amerika Serikat atau perayaan ulang tahun manapun, tetapi dari Pencipta umat manusia, Tuhan Yang Maha Esa. Sudah lama diproklamasikan oleh para pemikir (filsuf) dan berbagai negara di dunia internasional bahwa HAM itu sangat penting. Plato, seorang filsuf yang hidup antara 428 dan 348 SM di Yunani, memberi tahu orang-orang yang tinggal di polisnya, atau negara kota, bahwa kemakmuran bersama hanya bisa ada jika semua warga negara memenuhi tanggung jawab dan hak mereka. masing-masing. telah dilakukan. Aristoteles (384 SM-322 SM) semakin sering menasihati para berpendapat bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang selalu memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan warganya. Inggris dan Amerika Serikat adalah dua contoh dari beberapa negara yang telah lama mendeklarasikan jaminan hak asasi manusia, dan Prancis. Perang hak orang-orang di

Inggris dipimpin aristokrasi, dan pada tahun 1215 Raja mengumumkan konstitusi Liberty, yang melarang pemenjaraan, hukuman dan penyitaan aset secara sewenang-wenang. Sebuah surat perintah pada tahun 1679, habeas corpus mencakup ketentuan itu seseorang dipenjarakan ditambahkan sebelum keputusan dalam seminggu dan membebaskan biaya terhadapnya. Undang-undang Hak tahun 1689 mengharuskan Raja William untuk mengambil hak parlementer, Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki konstitusi modern.

### **Latihan**

1. Apa yang harus dilakukan penguasa untuk memastikan keberhasilan penegakan HAM di Indonesia?
2. Mengapa sekarang bukan kewajiban pemerintah untuk membela hak asasi manusia?
3. Siapa yang bertanggung jawab ketika seseorang melanggar hak asasi manusia?
4. Bagaimana menjawab banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia saat ini?
5. Upaya apa yang telah dilakukan di Indonesia untuk

menghormati dan meningkatkan hak asasi manusia?

### **3. 3. Penutup**

#### **A. Rangkuman**

Definisi cakupan kejahatan dan kebijakan hukum HAM, khususnya yang diterapkan atau ditegakkan melalui otoritas di tingkat nasional, melibatkan know-how bagaimana kebijakan mempengaruhi regulasi dengan cara berpikir tentang komposisi kekuatan di balik munculnya hukum dan penegakan regulasi. Sementara itu, pengertian HAM adalah kebebasan dan hak. hakiki bagi setiap orang, terlepas dari ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, dan kebangsaan, kepercayaan, linguistik atau reputasi lainnya. Penerapan hak terletak dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan dalam interaksi antar manusia atau antar kelompok manusia. Hak merupakan faktor normatif yang melekat pada semua orang lembaga. Untuk pemenuhan hak, kita harus ingat bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi bersosialisasi

dengan orang lain. Konsep hukum hak asasi manusia di negara amerika serikat yang taat hukum Marutsuki menuntut A. V. Dicey menjelaskan bahwa isi dari setiap gagasan negara hukum adalah sebagai berikut, dan suatu peraturan perundang-undangan memiliki 3 pengertian sebagai berikut: Absolutisme hukum (supremasi mutlak regulasi) untuk memerangi dampak kesewenang-wenangan listrik sewenang-wenang dan menghilangkan kesewenang-wenangan pemerintah besar-besaran. Piagam tidak selalu menjadi sumber informasi, tetapi seperangkat hak orang yang dipasang dan ditegakkan melalui pengadilan. faktor-faktor tersebut harus seluruhnya ada dalam konstitusi negara kriminal. Untuk mengetahui Lebih lanjut tentang sistem hukum negara: pertama, itu bagus. memberikan penjelasan tentang arti penting konstitusi. Konstitusi tidak lagi mengizinkan pemerintah untuk mengatur urusan kerajaan secara sewenang-wenang. Piagam tersebut menjadikan keselamatan kebebasan dasar sebagai cara berpikir

pengaturan yang mengarahkan. Untuk situasi ini, kebebasan dasar harus diingat untuk hukum dan ketertiban.

Piagam tersebut menjadikan keselamatan hak asasi manusia sebagai filosofi aturan main hukum. Dengan kata lain, negara hukum harus melindungi hak-hak rakyat Dalam negara hukum, hukum dan peraturan digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. dan ditegakkan dengan bantuan lembaga peradilan sebagai pelaksana keadilan. Dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa hubungan antara hak asasi manusia dengan pedoman peraturan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat material. Hubungan formal dalam kerangka melindungi Hak asasi manusia adalah aspek penting dari dari pedoman gagasan hukum. menyatakan bahwa mosi tersebut ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia. Peradilan yang mandiri, bebas, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, juga merupakan bentuk keamanan dan pengakuan hak asasi manusia dalam aturan hukum.

## **B. Tes Formatif**

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM ....
  - a. Semua warga dijamin di Kerajaan
  - b. Hukum dan Peraturan Hak Asasi Manusia
  - c. Hak Asasi Manusia harus dihormati dalam semua tindakan
  - d. Kesetaraan di bidang politik, bisnis, masyarakat, dan budaya
  - e. Setiap orang diperlakukan sama dipenjara
2. Kurangnya kepastian hukum bagi para pelanggar HAM merupakan salah satu hambatan upaya HAM, dan akarnya....
  - a. Eksternal
  - b. Internasional
  - c. Di dalam
  - d. Domestik
  - e. Instansi Pemerintah
3. Tiga Bangsa, khususnya penguasa, memiliki kewajiban untuk menjaga, memajukan, menegakkan, dan menjaga HAM Piagam nada 1945....

- a. 28
  - b. 28A
  - c. Paragraf 1 dari 28C
  - d. 28D paragraf 1
  - e. 28I Bagian 4
4. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam membela hak asasi manusia adalah “Kejahatan terhadap kemanusiaan tetap ada”...
- a. Paksa kelompok tertentu untuk pindah
  - b. Bunuh anggota kelompok tertentu
  - c. Pemindahan paksa penduduk
  - d. Menimpa kelompok tertentu
  - e. Berperilaku kasar
5. Pemerintah Indonesia memandang pelaksanaan hak asasi manusia sebagai bentuk kehati-hatian dari...
- a. Mengembangkan kebebasan pers
  - b. Pembentukan Pengadilan HAM dengan Komnas HAM
  - c. Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke



dalam sekolah

- d. Menggunakan kekuatan untuk menahan pengunjuk rasa
- e. Pilih Jaksa Agung yang Berani

### **C. Umpan Balik**

1. Mintalah siswa untuk memberikan pendapatnya selama diskusi. Ini sangat mudah saat berkomunikasi melalui konferensi video atau obrolan kelas tradisional. Misalnya, beberapa siswa lebih suka bekerja dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Tanyakan preferensi pengguna lain sehingga Anda dapat mengatur pekerjaan Anda dengan lebih baik. Kemudian, subtopik dijelaskan, tanyakan ke siswa, misalnya, "Apakah semuanya jelas di sini?".
2. Jika siswa merasa terlalu banyak teori dan terlalu sedikit praktik, saya hanya akan mengajar mereka setelah kelas selesai. Dan penting untuk mempertimbangkannya untuk pengalaman belajar yang lebih baik.

3. Mendorong lebih banyak upaya, motivasi, atau komitmen untuk mempersempit kesenjangan antara pencapaian saat ini dan tujuan yang ingin dicapai siswa.
4. Memberikan informasi alternatif strategi untuk memahami materi yang dipelajari.
5. Akui kepada siswa apakah mereka benar atau salah atau seberapa baik mereka memahami pelajaran yang diajarkan.
6. Membimbing siswa tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar mereka.
7. Memberikan pedoman untuk memahami rekonstruksi.
8. Berikan umpan balik tentang kekuatan dan manfaat siswa terkait kegiatan pembelajaran.

#### **D. Tindak Lanjut**

1. Mengkaji konsekuensi dari sistem pembinaan dan pembelajaran.
2. Mengerjakan tugas dan kegiatan olah raga di luar kelas.
3. Menawarkan motivasi dan petunjuk belajar.

4. Menawarkan alternatif pembelajaran olahraga yang dapat dilakukan oleh para sarjana di luar kelas.
5. Berdasarkan hasil ujian belajar siswa, penting untuk menawarkan program latihan karakter atau sekolah kepada siswa untuk melakukan aplikasi penguatan dan / atau pengembangan yang dilakukan di luar jam kelas.

**E. Kunci Jawaban Tes Formatif**

1. C.
2. A.
3. E.
4. D.
5. B

## **BAB 4**

### **PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

#### **4. 1. Pendahuluan**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang dari awal, dipraktikkan setiap saat, di mana pun, dan kepada setiap orang. Seluruh aspek yang terikat dengan HAM harus diterima serta secara mutlak setiap orang memilikinya terlepas dari variasinya. Perlu diingat, setiap manusia memiliki tujuan, khususnya pilihan untuk melakukan yang benar dan yang jahat. Jauh sekali pilihan untuk berbuat jahat yang berdampak pada pelanggaran HAM, yang meliputi pembunuhan, perampasan harta milik orang lain, penjarahan, dan lain sebagainya. Untuk mencegah keinginan untuk melakukan kejahatan, sangat penting untuk menerapkan dan menyelamatkan Anda. Dengan begitu, pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi.

Hak asasi manusia perlu dimuliakan dan dihormati karena HAM ialah dasar yang tertanam dalam diri manusia

yang dapat dijunjung tinggi sepanjang masa. Akibatnya itu harus diselimuti, terkemuka, serta tidak boleh tercampakkan, mengecilkan / diambil bagi semua orang secara mutlak. Upaya penegakan HAM adalah segala cara yang menyangkut maksud agar hak asasi manusia bereputasi dan diakui. Upaya penegakan hak dan kewajiban seseorang biasanya dilengkapi dengan perlindungan.

### **A. Deskripsi Singkat**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang dari awal, dipraktikkan setiap saat, di mana pun, dan kepada setiap orang. Seluruh aspek yang terikat dengan HAM harus diterima serta secara mutlak setiap orang memilikinya terlepas dari variasinya. Perlu diingat, setiap manusia memiliki tujuan, khususnya pilihan untuk melakukan yang benar dan yang jahat. Jauh sekali pilihan untuk berbuat jahat yang berdampak pada pelanggaran HAM, yang meliputi pembunuhan, perampasan harta milik orang lain, penjarahan, dan lain sebagainya. Untuk mencegah keinginan untuk

melakukan kejahatan, sangat penting untuk menerapkan dan menyelamatkan Anda. Dengan begitu, pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi.

Hak asasi manusia perlu dimuliakan dan dihormati karena HAM ialah dasar yang tertanam dalam diri manusia yang dapat dijunjung tinggi sepanjang masa. Akibatnya itu harus diselimuti, terkemuka, serta tidak boleh tercampakkan, mengecilkan / diambil bagi semua orang secara mutlak. Upaya penegakan HAM adalah segala cara yang menyangkut maksud agar hak asasi manusia bereputasi dan diakui. Upaya penegakan hak dan kewajiban seseorang biasanya dilengkapi dengan perlindungan.

Penegakan HAM merupakan kewajiban dan tidak ada penekanan dari pihak yang melakukannya. Pembentukan negara serta bangsa pada umumnya bertujuan untuk menikmati hak asasi warganya. Dibutuhkan dorongan hati dan cita-cita yang sungguh-sungguh atas pihak penguasa, penegak regulasi, serta

elite politik supaya penegakan hak asasi manusia terarah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan menjamin HAM warganya bisa terealisasi secara baik.

## **B. Relevansi**

Penyimpangan hak asasi manusia dianggap beresiko termasuk di Indonesia, hal ini karena terdapat banyak perbedaan dalam kehidupan seperti tempat, keyakinan, suku, dan cita-cita. Variasi itulah rentan menyebabkan masalah yang berakibat untuk melakukan tindakan penyimpangan hak asasi manusia. Untuk itu pembahasan materi tentang penegakan HAM di Indonesia menjadi bagian yang penting, supaya siswa mampu memahami penegakan HAM dan penerapannya dalam kehidupannya.

## **C. Capaian Pembelajaran**

### **C.1. Capaian Pembelajaran**

Melalui pembahasan ini diharapkan siswa dapat memahami pentingnya penegakan HAM, mampu mengidentifikasi upaya penegakan HAM di

Indonesia, serta mengetahui tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM.

### C.2. Sub Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bahan ajar ini, siswa dapat menguasai mengenai upaya penegakan HAM di Indonesia, upaya penegakan, serta tantangan serta hambatan yang terjadi.

### D. Petunjuk Belajar

1. Untuk memahami materi pada bahan ajar ini bacalah dengan teliti dan pahami isi dari tiap sub bab yang ada dalam bahan ajar ini.
2. Pahami keseluruhan bahan ajar ini agar dapat memahami tiap bagian-bagian modul ini.
3. Kerjakan latihan soal dan tes informatif.
4. Refleksikan materi yang dipelajari dalam bahan ajar ini dalam kehidupan sehari-hari.



## 4. 2. Penyajian

### A. Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia

Secara umum HAM meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak mendapat keadilan, kesejahteraan, kebebasan pribadi, keamanan, serta hak anak dimana semuanya dilindungi oleh UU Nomor 39 Tahun 1999, yang juga menjamin hak asasi manusia. Guna mencegah penyimpangan, penegakan hak asasi manusia harus dilindungi secara efektif. Seluruh masyarakat dapat bekerja sama untuk mengendalikan penyimpangan HAM dengan tim penegak hak asasi manusia (Winataputra, 2020).

Sebanyak 525 pengaduan pelanggaran HAM di kepolisian, dunia usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan institusi pendidikan telah dikirim kepada Komnas HAM (Kompas, 2020). Beragamnya kasus yang muncul menjadi bukti bahwa fokus publik terhadap signifikansi HAM belum sepenuhnya terbentuk. Situasi ini tidak boleh diabaikan begitu saja, harus dengan tekad

untuk membantu dari semua acara untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.

Pihak berwenang sudah menyelesaikan upaya untuk memahami HAM dengan menegakkan penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dapat dilaksanakan lebih tinggi, melalui aturan hukum yang tegas. Untuk menegakkan hukum yang kita ada harus selalu dilaksanakan. Penegakan HAM di Indonesia sangat penting karena dengan cara menegakkan HAM, itu adalah bentuk gerakan preventif terhadap penyimpangan dari semua aturan masyarakat yang diberlakukan yang meliputi agama, hukum, etika, dan sosial budaya.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut hukumnya secara yang terbaik, kedudukan yang sama, serta penjaminan HAM. Dalam membuat pedoman peraturan Indonesia melakukan secara bersama melalui upaya demokratisasi serta konstitusional. Karena dalam penegakan HAM mampu dilaksanakan dengan

baik apabila seluruh masyarakat bisa mengenali demokrasi serta hukum yang berlangsung. Di sisi lain, apabila masyarakat hendak mematuhi peraturan serta demokrasi, hingga peraturan perlu memberi jaminan perlindungan hak asasi manusia yang tertanam dalam diri masyarakat.

Masyarakat masih banyak dijumpai yang belum memahami esensial dari HAM, sehingga demokrasi susah untuk melangkah kedepan. Dampaknya, hal itu menjerumuskan ke perbuatan yang menyimpang dalam HAM. Berbagai gerakan yang merugikan demokrasi, seperti vandalisme serta anarkis. Itulah penyebab pentingnya kehidupan serta penegakan HAM di Indonesia.

Pertahanan hak asasi manusia yang sudah diciptakan, melalui pemerintah ataupun rakyat perlu didorong dengan jaringan yang utuh. karena melalui tubuh kita inilah setiap jenis pelanggaran hak asasi manusia dapat dilaporkan untuk pemeliharaan,

keselamatan serta pengembangan HAM.

Berikut ini merupakan dasar pentingnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, sebagai berikut :

1) Searah dengan Pancasila

Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan pedoman di Indonesia, yakin bahwasannya Tuhan YME menciptakan manusia atas 2 unsur, yakni laki-laki atau perempuan (pribadi) dan faktor sosial (masyarakat). Akibatnya, setiap orang wajib hormat serta memahami hak-hak seseorang. Seluruh derajat seseorang akan dimuliakan dan dihormati sebab mereka merupakan ciptaan Tuhan.

2) Amanat Undang-Undang 1945

Pengakuan serta penjaminan dalam HAM bisa kita lihat didalam pembukaan UUD NRI 1945 alenia satu sampai empat, berikut:

- a. Alenia satu menjelaskan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak

segala bangsa...” Penjelasan ini tidak diragukan lagi membuktikan atas tiap negara umumnya mempunyai hak yang sama dalam kebebasan keberadaan. Umumnya seseorang hendak lepas atas seluruh penahanan serta tekanan hidup.

- b. Alenia dua menjelaskan, “...menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.” Melalui penegasan diatas ada penjaminan hak-hak kita di berbagai bidang.
- c. Alenia tiga menjelaskan, “ Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa... supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” Penjelasan inilah menyiratkan bahwa popularitas yang layak untuk tetap mandiri adalah hadiah dari Tuhan. Akibatnya, tidak ada yang bisa menyangkalnya.

d. Alenia empat menjelaskan, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” Penjelasan itulah menyiratkan bahwasannya tiap rakyat memiliki hak untuk menjamin keberadaan yang kaya, kehidupan yang aman, sekolah, kemandirian, kehidupan yang tidak kejam, serta pemulihan yang jujur.

### 3) Negara Hukum

Indonesia dituntut untuk senantiasa melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Seperti, undang-undang mengenai penegakan hak asasi manusia yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan No. 39 Tahun 1999. Selain itu, pengadilan pelanggaran hak

asasi manusia juga dibentuk berdasarkan aturan pada UU No. 26 Tahun 2000. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia ini tidak hanya memenuhi keinginan seluruh negeri, tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat global. konsekuensinya, Indonesia harus terus berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia sebagai bentuk kepatuhan kepada hukum.

- 4) Demi menjaga solidaritas serta kerukunan Masyarakat yang tinggal didaerah yang unik, suku, agama, dan hobi sangat rentan terhadap perang. Gesekan sekecil apapun yang muncul dimasyarakat dapat memicu keresahan yang lebih luas. Kasus yang terjadi di Ambon, Sampit, serta Poso merupakan contoh tragedy yang menggambarkan kerentanan ini. Karenanya penegakan hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan gaya hidup masyarakat Indonesia yang majemuk.

## **B. Upaya Penegakan HAM di Lingkup Keluarga, Masyarakat, dan Sekolah**

Perkembangan penegakan HAM yang terjadi didunia, salah satunya di Asia dimana tempat negara kita yaitu Indonesia. Kemajuan HAM di Asia belum lagi memiliki konstitusi HAM bersama dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Amerika. Kekuatan budaya serta keyakinan yang paling penting di negara-negara Asia terbesar adalah bukti tidak ada piagam, kecuali dampak iman serta budaya yang mempengaruhi sikap/pola gerak dan juga sikap maksimum negara-negara internasional. Tindakan hukum yang dilakukan guna meningkatkan penghargaan terhadap HAM, khususnya New Delhi tahun 1928 diadakan diskusi Teknik HAM di Asia yang diubah jadi disiapkan oleh United Country College-Tokyo, Unesco-Paris dan Center for Pelatihan dan Kajian HAM New Delhi, pada diskusi ini mengambil hasil kira-kira yakni, kaitan antara HAM dan kemiskinan antara lain menekankan posisi kerajaan dan institusi sosial dalam memantau



pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di masyarakat kurang mampu masyarakat pada segi dalam negeri dan dunia, serta kaitan dari kemerdekaan serta hak untuk menetapkan nasib pada penegakan HAM. Kesimpulan berikut merupakan kaitan antara HAM, gaya hidup, serta budaya spiritual dimana kaitannya yaitu bagaimana cita-cita atau pemikiran agama, subkultur, gaya hidup pada prinsip-prinsip yang terikat atas HAM serta solidaritas yang berhubungan untuk menumbuhkan kelompok tradisi ataupun keyakinan sehingga Anda dapat mengagumi hak-hak mereka. Simpulan selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam kerangka sistem agama Asia yang memasukkan, apa fungsi pengetahuan teknologi dan teknologi dalam menanggapi hak asasi manusia agar dapat dijamin dengan baik, membaca metode militerisasi dan otokrasi dalam Asia, mengembangkan keterkaitan antara regulasi HAM dan regulasi kemanusiaan untuk dapat memajukan HAM, menyusun beberapa petunjuk, masing-masing terbukti

ke UNESCO.

Cara yang kedua adalah *Singapore White Paper on Values* pada 1991. Situasi ini dikarenakan pandangan atas para pemuda di Singapura membutuhkan pandangan hidup untuk pedoman yang mungkin khas dengan menggunakan semua korporasi manusia seperti yang tidak dilakukan sekarang. berperang dengan iman dan tradisi setiap kelompok. *Singapore White Paper on Shared Values* berubah menjadi biasa pada Januari 1991, ada 5 aspek yang termuat didalamnya, seperti hiburan anak bangsa diatas kebutuhan komunitas diatas hobi non-publik, lingkaran kerabat sebagai unit dasar masyarakat, bantuan masyarakat dan mengagumi individu, konsensus tidak lagi masalah, serta kerukunan. Cara berikutnya menjadi, pada tanggal 26 – 28 Januari 1993 diadakan kegiatan karya mengenai HAM di Asia Pasifik, di bulan April 1993 konvensi Hak Asasi Manusia untuk Asia Pasifik diadakan di Bangkok serta sukses mengatur pengumuman, yang ternyata menjadi bernama

pengumuman Bangkok. Upaya terakhir adalah tatanan kerangka HAM ASEAN yang mapan.

Penegakan peraturan merupakan sistem yang dilakukan guna menegakkan serta memfungsikan norma-norma kejahatan yang sebenarnya sebagai pedoman tindakan dalam pengujung atau hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Hukum perlu ditegaskan sebab nilai keadilan yang terkandung didalamnya itu sangatlah penting untuk kesejahteraan jaringan.

Dalam masyarakat global ini, setiap laki-laki atau perempuan pasti memiliki hak dasar untuk hidup, dan hak-hak dasar tersebut telah ada sejak manusia lahir. Selain itu, hak-hak dasar ini umumnya didiagnosis. Hak asasi manusia (HAM) ini yang disebut hak-hak dasar. Dalam gaya hidup hak asasi manusia, setiap laki-laki atau perempuan memiliki perlindungan etis dan kriminal sehingga orang dapat dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perampasan, penganiayaan, dll. Orang yang

terlindungi dari segala bentuk merugikan diri sendiri (perampasan, penganiayaan, dll.) hidup lebih bebas dan merasa lebih sedikit tekanan. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa akan menjalani kehidupan yang lebih layak karena hak asasinya.

Dalam banyak peristiwa yang menyebabkan pelanggaran HAM, manusia Indonesia (jaringan, perangkat negara, aparat penegak hukum) memahami apa yang secara jelas tersirat dalam HAM mereka (terdiri dari tanggung jawab dasar mereka). menunjukkan bahwa peraturan dan pedoman Hak Asasi Manusia tidak lengkap dan tepat, tetapi paling berharga bila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pedoman perundang-undangan harus dan harus dilaksanakan dan ditegakkan. Sistem hukum yang tidak memihak yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang sesuai, dan mengikuti taktik kriminal yang ideal. Hak asasi manusia berjalan dengan baik Ketika setiap manusia atau warga negara mengingat

tanggung jawabnya dan aktivitas fisik haknya. Hak asasi manusia bekerja dengan sangat baik ketika semua orang mengakui bahwa ada manusia berbeda yang memiliki hak yang sama dengan mereka. Sederhananya, hak asasi manusia itu efektif sementara hak asasi kita dilanggar melalui hak orang lain. Hukum merupakan alat penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia Indonesia. Hak orang dapat melukis lebih tinggi atau lebih baik ditegakkan dalam kehidupan demokrasi, karena demokrasi biasanya menetapkan pedoman hukum dalam praktek negara dan terus menghormati hak-hak warga negaranya. Bangsa dan warga mengambil bagian dalam membentuk kebijakan publik.

Mengutip modul pelatihan Pancasila dan Kewarganegaraan karya yusnawan L. dan Moh. sodeli, semua lokasi internasional didunia menyetujui apresiasi kepada aspek-aspek generik HAM melalui berbagai upaya penegakan HAM. namun, implementasi di setiap amerika serikat berbeda satu sama lain. Unsur-unsur

yang mempengaruhi variasi dalam penegakan hak asasi manusia diberbagai negara didunia antara lain pedoman bangsa, tradisi, dan kekhasan nilai suatu negara.

Misalnya lokasi internasional lainnya didunia global, indonesia mempunyai pedoman bangsa, budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Melalui cara menegakkan hak asasi manusia, Indonesia berdasar kepada UUD NRI 1945 dan aturan undang-undang lain. Lewat skema ini, Indonesia tidak selalu mengarah pada pengetahuan HAM yang liberal serta sekuler. Itu diperhitungkan sebab ada ketidaksesuaian dengan sarana prinsip utama itu, khususnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecuali berpedoman pada pedoman dan aturan hukum nasional, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga mengacu dalam ketentuan peraturan internasional. Konsisten dengan Idrus dan Karim Suryadi di Lubis dan Moh. Sodeli, penegakan hak asasi manusia memperhatikan 2 hal mendasar, diantaranya:

1. Tingkatan bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat hukum, politik, dan sosial perlu dipertahankan di situasi apapun searah dengan konsep yang terkandung dalam Piagam PBB.
2. Pemerintah harus terus berkonsultasi dengan ketentuan hukum di seluruh dunia mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian ada upaya untuk mengadaptasi dan memasukkannya ke dalam perangkat penjara di seluruh negeri dan menempatkannya dengan cara apa pun. Oleh karena itu, ketentuan pidana itu jadi bagian yang tidak akan terpisah dari perangkat hukum nasional.

Berikut ini merupakan langkah yang diambil pemerintah guna menegakkan HAM diantaranya :

- a. Membentuk Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah badan yang tidak memihak yang mempunyai ciri untuk penelitian perilaku, kajian,

penyuluhan, pelacakan, serta mediasi hak asasi manusia. Komisi Nasional HAM dibentuk tanggal 7 Juni tahun 1993 atas Keppres No. 50 Tahun 1993. Dalam penerapannya, tiap masyarakat yang dilanggar hak asasinya bisa melaporkan penyimpangan hak asasi manusia pada Komisi Nasional HAM. Organisasi ini mempunyai banyak kekuasaan, bersama-sama dengan:

1. melakukan pelatihan dan penyuluhan mengenai HAM
2. melakukan pemantauan serta penelitian penyimpangan HAM
3. studi perilaku dan studi tentang hak asasi manusia
4. menjernihkan masalah dalam konsultasi dan negosiasi
5. mengajukan usulan kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah.



## b. Membentuk Instrumen HAM

Perangkat hak asasi manusia adalah peralatan yang dipergunakan guna menjamin keamanan serta penegakan hak asasi manusia. Perangkat ini seperti undang-undang serta kebijakan dan aparat penegak HAM, termasuk biaya HAM (Komnas HAM) diseluruh negeri serta berkas pengadilan HAM. Tujuan satuan HAM yaitu untuk memastikan kebenaran kejahatan dan memberi pengarahannya yang bersih pada penegakan hak asasi manusia. Dikutip pada situs Komnas HAM, dibawah ini referensi perangkat yang terikat dengan HAM:

1. Piagam 1945 dan amandemennya
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM
4. Peraturan No. 26 Tahun 2000 mengenai

## Pengadilan Hak Asasi Manusia

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghilangan Diskriminasi Etnis dan Ras
  6. UU Nomor 7 Tahun 2012 mengenai Masalah Sosial
  7. UUD 1945 Persatuan lokasi internasional
  8. Pernyataan Hak Asasi Manusia tahun 1948
  9. Kovenan di seluruh dunia mengenai Hak Politik dan Sipil
  10. Konvensi di seluruh dunia mengenai hak Sosial, Budaya, dan Ekonomi.
- c. Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Dokumen pengadilan HAM adalah dokumen pengadilan yang dipasang terutama guna menindak penyimpangan hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hadir berdasar

Peraturan NRI No. 26/2000. Alasannya berkas pengadilan hak asasi manusia adalah untuk memberi perlindungan HAM. Sekarang, penetapan pengadilan bisa jadi dasar bagi penegakan, kepastian hukum, keadilan, serta rasa aman bagi diri sendiri dan masyarakat.

## **Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Berbagai Lingkungan**

Supaya penegakan hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal, maka diperlukan peran warga untuk memandu pengenalan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Berbagai tindakan yang membantu upaya penegakan HAM bisa diamati dilingkungan kita. Misalnya dalam lingkungan kerabat, di sekolah, dan di lingkup masyarakat, di sini adalah contoh masing-masing:

### **1. Lingkup Keluarga**

- a. Menghargai serta mencintai anggota keluarganya.

- b. Jangan menuntut keinginan anggota keluarga yang berbeda, apalagi orangtua.
- c. Patuhi nasehat serta mandat orangtua.
- d. Tidak lagi mengganggu ketenangan dan kenyamanan anggota keluarga.
- e. Menghargai pemikiran dan evaluasi semua anggota keluarga.
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkaran kerabat.
- g. Yang tepat untuk mendapatkan cinta dari lingkaran kerabat.
- h. Hak untuk makan dan minum sesuai dengan vitamin dan zat gizi yang dibutuhkan.
- i. Kepatutan dan perlunya menghargai waktu bagi setiap anggota keluarga untuk beribadah.
- j. Hak atas kebebasan berpendapat dan rasa moral, artinya semua kontributor keluarga memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya tanpa batas.

Setiap anggota keluarga mendapatkan hak ini secara otomatis sejak melahirkan, tetapi juga penting dan wajib mengakui hak asasi setiap anggota keluarga. Kita perlu melaksanakan kewajiban, sebab kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan serta tidak boleh diabaikan. Apabila kita tidak menjalankan tugas kita, itu tidak hanya akan membebani kita sendiri tetapi orang lain juga.

## **2. Lingkup Sekolah**

Lingkup sekolah selaku pusat pendidikan adalah wilayah dimana hak asasi manusia harus dijalankan. Berikut adalah contoh penegakan HAM dilingkungan sekolah:

- a. Jangan pilih-pilih dalam pertemanan.
- b. Patuhi aturan yang ada di lingkungan sekolah.
- c. Jangan lagi menuntut keinginan kepada warga sekolah serta teman.
- d. Jangan mem-bully secara fisik dan verbal kepada teman

- e. Simpati untuk teman yang sedang berduka
- f. Jujur kepada semua teman tanpa membeda-bedakan
- g. Jadilah orang yang menyenangkan
- h. Memberikan kebebasan berpendapat kepada siswa selama mereka sopan dan bertanggung jawab
- i. Jangan menekan diri sendiri
- j. Jangan membeda-bedakan sesama teman

Hak asasi manusia merupakan hal yang vital untuk ditanamkan dalam pelatihan atau di lingkungan sekolah. Karena dengan menanamkan HAM di lingkungan sekolah, selain menghindari kerusuhan di lingkungan sekolah, agar lingkungan belajar tertib dan berjalan dengan baik, kita akan lebih menghargai penilaian orang lain. Sekolah merupakan pusat ilmu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah merupakan kesadaran prinsip untuk pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya

memenuhi hak pendidikan warga negara, selain itu juga merupakan amanat konstitusi, sekolah juga merupakan komponen pemenuhan hak asasi manusia. Alasan sekolah bukan untuk mendidik anak-anak untuk memperebutkan raport yang diinginkan, tetapi untuk membentuk karakter mahasiswa yang akan berpartisipasi dalam keberadaan yang demokratis (tidak memihak). Dengan demikian, anak-anak harus siap dengan persepsi toleransi yang membuat mereka menghargai berbagai nilai dalam sekolah dan juga sekitarnya.

### **3. Lingkup Masyarakat**

- a. Ikut menjaga ketertiban umum
- b. Berpartisipasi dalam olahraga kemanusiaan.
- c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- d. Berkomunikasi secara baik serta sopan.
- e. Mengakui serta membela martabat dan nilai setiap orang lain.
- f. Membantu terselenggaranya masyarakat yang

- aman, tentram dan tentram.
- g. Mengembangkan sikap toleransi.
  - h. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  - i. Menjauhi segala gaya gerak yang berhubungan dengan tindak kekerasan.
  - j. Tidak membeda-bedakan manusia terutama berdasarkan keanggunan dan sebagainya.

Perilaku upaya penegakan hak asasi manusia yang terbentuk dalam masyarakat, jelas, apabila dilakukan secara lembut tetapi secara virtual akan menciptakan rasa damai, tentram, serta aman hingga gerakan-gerakan yang menyimpang dari kenyataan tidak akan bangkit. saling mendukung alias saling membantu akan diperlukan disini apabila terdapat kenalan disekitar yang mengalami kesusahan ataupun tertimpa musibah kami akan bantu menghibur mereka serta mengurangi beban mereka melalui tangan kanan kita, dari mata mereka bantuan dari kita tidak banyak tapi akan ternilai serta kebersamaan disini mungkin terikat dengan hangat.



tangguh, dan puas. Guna menciptakan lingkup jaringan yang aman serta tanpa kekerasan, dimungkinkan untuk mengatur aplikasi siskamling dan dapat melestarikan olahraga pembersihan jalan di dalam jaringan.

Semakin erat kebersamaan maka secara otomatis persatuan akan semakin kuat tertancap. Sebab perlu diketahui, energi tidak akan muncul apabila dari individu, tapi melalui semangat yang satu, dapat menolong orang lain dan menjaga tali silaturahmi agar tetap baik. Setiap orang juga harus mengenal masing-masing, karena kita menyadari bahwa seseorang adalah siap dengan hak asasi manusia dan kami berkewajiban untuk mencapai itu. Mengagumi dan mengakuinya karena hak ini tentu telah diberikan melalui Tuhan YME.

Maka dari itu, posisi kita sangat diharapkan dalam upaya penegakan HAM. Partisipasi di kehidupan yang normal untuk mewujudkan atau melakukan HAM yang baik dapat dicapai dalam lingkungan keluarga sendiri, lingkungan sekolah, atau lingkungan jaringan.

Partisipasi dalam penegakan hak asasi manusia sangat penting dan harus siap dengan keberanian dan kesopanan.

### **C. Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan HAM**

Upaya pembelaan HAM di era reformasi demokrasi seperti sekarang ini belumlah benar-benar komprehensif dan holistik, padahal era ini menawarkan kebebasan yang luar biasa dalam segala hal. Kebebasan itu sendiri merupakan belenggu bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Demokrasi, termasuk kebebasan ini, justru merosot menjadi mabokrasi, situasi di mana hukum ditentukan oleh massa. Akibatnya, terjadi pelanggaran HAM di kalangan warga negara. Ini memanifestasikan dirinya dalam bentuknya yang paling anarkis, mulai dari penganiayaan, kabar *hoax* serta ajakan kebencian di medsos, hingga konflik horizontal yang merenggut nyawa manusia.

Upaya penegakan HAM di Indonesia, baik

secara kolektif maupun individual, masih menyisakan sisi kelam masa lalu, yakni pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi PKI 1965 dan berbagai pelanggaran HAM seputar tumbangnya Suharto di Indonesia. tersandung pada penyelidikan yang belum selesai Tentang sengketa pertanian 1998 antara petani. Dengan investor dan pemerintah di berbagai bagian negara. Bukannya menyelesaikan konflik-konflik tersebut, justru menjadi diskusi dan perdebatan panjang dalam merumuskan solusi. Upaya pembelaan HAM menuju demokrasi saat ini oleh karena itu menitikberatkan pada kitta HAM itu sendiri, hak yang tertanam pada seseorang sebagai ciptaan Tuhan YME, serta hak untuk dihormati, didukung, dan dilindungi. Harus terkait dengan hadiah yang seharusnya. Menurut hukum negara, dan pemerintah, dan kehormatan, dan untuk melindungi martabat manusia.

Definisi dan konsep ini harus dipatuhi oleh pemerintah, khususnya melalui lembaganya. Hal ini

guna meyakinkan bahwasannya pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di antara warga negara tidak meluas ke pejabat pemerintah yang bertanggungjawab untuk melindungi hak asasinya. Para pemimpin nasional perlu memiliki kejelian untuk memperbaiki tata kelola demokrasi nasional agar era demokrasi yang diharapkan menjadi kuda pacu hak asasi manusia tidak menjadi penghambat pengembangan diri hak asasi manusia. Masuknya Indonesia ke era demokrasi seharusnya menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan dan penguatan sikap dalam membela HAM, semestinya diatur pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi jadi katalisator untuk mewujudkan kebebasan sipil, baik hak maupun kebebasan, karena keterbukaan dan peningkatan partisipasi sipil diberbagai aspek kehidupan. Di bidang politik serta hukum, hak sosial budaya. Namun dalam implementasinya, kondisi ideal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, setidaknya untuk kondisi saat ini.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, demokrasi saat ini belum sepenuhnya demokratis. Demokrasi bergerak dengan berbagai penyimpangan, dari mobokrasi hingga anarki, yang berujung pada terganggunya tatanan sosial yang ideal. Kedua, persoalan filosofis empat konsensus nasional, seperti Pancasila, UUD NRI 1945, serta Bhineka Tunggal Ika NKRI, mengakui bahwa belum secara konsisten ditegakkan oleh semua elemen negara. Memastikan pelaksanaan penuh hak asasi manusia termasuk dalam empat konsensus nasional.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi kontradiksi dalam penegakan HAM dinegeri ini. Pelanggaran hak asasi manusia antar saudara, kemunafikan penegakan HAM oleh pilar-pilar demokrasi negara bantrol di kalangan anak-anak negara dalam menyikapi serta menuntaskan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Rapuhnya ketahanan nasional dalam menghadapi tekanan global,

ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas dan kemandirian lembaga-lembaga negara yang menjalankan kewajibannya sebagai penegak hak asasi manusia. Merujuk pada situasi tersebut, cara reponnya medical scripting kali ini memunculkan pertanyaan esensial, "Bagaimana Menjawab Tantangan Penegakan HAM Individu dan Sosial di Era Demokrasi?"

### **Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Dalam membedah fenomena penegakan HAM dalam teknologi demokrasi yang menjadi topik kajian, menggunakan teori atau perspektif yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pandangan demokrasi, yang kedua adalah pandangan ontologis hak asasi manusia. Menurut Joseph Schemer, demokrasi merupakan rencana kelembagaan guna meraih pilihan politik di mana orang memanfaatkan energi untuk menentukan cara bersaing secara kompetitif untuk suara manusia.

Sementara itu, sesuai dengan Schmitter dan Terry Karl,

demokrasi dalam perangkat presidensi dimana pemerintahan bertanggungjawab atas gerakan didalam ruang publik melalui masyarakat, yang bertindak tidak langsung melalui oposisi serta kerjasama di negara. Hak Asasi Manusia (HAM) secara konseptual mempunyai hubungan yang erat dengan demokrasi. Maka dari itu dapat ditelaah secara nyata dalam definisi yang diberikan melalui sarana Austin Ranney bahwa hak asasi manusia merupakan wilayah kebebasan laki-laki atau perempuan yang sebenarnya dirumuskan dalam piagam dan dijamin untuk dilaksanakan melalui sarana pemerintah.

Segmen dialog ini akan mengkaji secara elemen permasalahan yang muncul mengenai situasi tuntutan penegakan hak laki-laki atau perempuan dan hak-hak sosial manusia dalam teknologi demokrasi modern. Peluang jawaban yang disajikan akan memeriksa dengan situasi otentik di samping teori sebagaimana didefinisikan pada landasan teori, sebagai berikut:

- a) Penguatan Rukun Demokrasi karena Landasan

Dasar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Demokrasi sebagai perangkat selain falsafah kepresidenan memiliki syarat agar item yang akan diselesaikan dapat terpenuhi dengan baik. Prasyaratnya terletak pada kompetensi dan integritas pilar-pilar konstituen yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers atau lembaga fakta dan percakapan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sulit untuk mengandaikan keyakinan akan sebuah pengecualian demokrasi yang sangat baik jika pilar-pilar itu kini tidak lagi melukis seperti yang seharusnya sudah diputuskan. Penegakan HAM yang berisiko di Amerika Serikat, meskipun telah dilepaskan dari belenggu otoritarianisme Orde Baru, sedikit banyak diputuskan melalui cara-cara kekecualian pilar-pilar demokrasi. Meski demikian, banyak pejabat negara yang menjalankan Trias Politika bangsa namun terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa individu



legislatif, misalnya, yang menentang penyusunan aturan pro-hak asasi manusia, ternyata menggunakan kuda untuk pembeli dan terlibat dalam peristiwa penyusunan aturan yang menghilangkan hak-hak sipil, politik, dan sosial budaya masyarakat. masyarakat.

Pers serta lembaga penyiaran yang di dalam teknologi pasca orde baru diharapkan sebagai pilar demokrasi sebagai mekanisme penyeimbang Trias Politica, sebagai opini ke-2 bagi masyarakat umum, telah terjebak dalam hobi masyarakat. elit yang menungganginya. Tidaklah tiba-tiba bahwa hari-hari ini manusia melahap fakta-fakta yang tidak memihak dan bebas nilai, namun lengkap dengan hobi peristiwa yang disusupi dalam fakta dan informasi yang disiarkan. Ini adalah patologi penegakan HAM yang sebenarnya di Indonesia.

- b) Komitmen Penyelesaian Masalah Penyimpangan Hak Asasi Manusia

Masa Lalu Indonesia akan sulit bergerak menuju demokrasi yang kuat jika masih ada masalah pelanggaran hak asasi manusia berat di masalalu. Masalah ini, jika tidak diselesaikan dengan baik, tidak hanya akan menjadi bara api di sekam dan luka anak bangsa, tetapi juga menjadi komodifikasi pihak asing yang tidak ingin Indonesia tampil di kancah internasional. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang mengemuka dan belum terselesaikan hingga saat ini antara lain tragedi pembantaian anggota PKI tahun 1965, kasus Trisakti dan Semanggi 1998 seputar jatuhnya rezim Orde Baru, dan konflik terfokus seperti Tragedi Tanjung Priok, Wasior dan Wamena, Kedung Ombo, hingga penculikan hingga pembunuhan aktivis HAM dan demokrasi seperti Wiji Thukul, Marsinah dan Munir yang hingga kini belum terungkap.

Namun, poin penting dari perlunya mengungkapserta menuntaskan penyimpangan hak

asasi manusia dimasa lalu adalah pemahaman dasar HAM itu sendiri yang merupakan hak dasar yang tertanam pada seseorang dan tidak boleh dikurangi ataupun dilanggar oleh siapapun, termasuk negara. Apalagi negara diberi amanah untuk menjamin hak-hak warga negara sebagaimana tercantum pada UUD NRI 1945.

- c) Pemahaman yang mendalam tentang konsensus nasional sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan tugasnya

Faktor-faktor yang mengancam keutuhan NKRI. Pendapat ini sebagian benar dan sebagian salah. Pemerintah pada waktu itu adalah kediktatoran yang jauh dari kekuasaan rakyat, dan dianggap melanggar Konstitusi.

Sebagian salah karena ada mekanisme lain yang lebih masuk akal untuk menghakimi penjahat komunis tanpa menumpahkan darah. Ini bukan hanya bekas luka bagi anak negeri, tapi juga tanda

hitam jejak demokrasi Indonesia dimata dunia. Maka sebab itu, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara oleh lembaga serta rezim negara, diperlukan kajian yang bersih dan tulus, pemahaman dan kemauan untuk melaksanakan kesepakatan keempat kekuasaan tersebut. Beberapa kekuatan partai politik dan kepentingan sektoral.

Era Demokrasi merupakan saat bagi masyarakat Indonesia untuk mendamaikan anak-anak bangsa dengan pelanggaran HAM masa lalu, menciptakan lembaga HAM yang kuat dan jujur, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap pelaksanaan hak-hak dasar yang relevan. Sudah saatnya dijadikan sebagai motor penggerak Berbagai tantangan HAM dapat diselesaikan secara memadai dan memuaskan jika modal dasar realisasinya terpenuhi secara memadai, seperti: B. Pilar demokrasi yang kuat dan kredibel, penyelesaian kasus-kasus masa lalu pelanggaran

hak asasi manusia tanpa menjadi duri dalam daging, dan pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia. Amanat Konsensus Empat Pihak Rakyat dan Negara Indonesia.

Semakin maraknya kasus pelanggaran HAM yang muncul merupakan tugas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa masalah pelanggaran HAM sudah dituntaskan, pada saat yang sama yang lain tetap diproses. Meski banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, namun kini tidak lagi menunjukkan bahwa sulitnya penegakan HAM dikatakan rentan atau mungkin tidak ada penegakan regulasi. Namun demikian, masih banyak persoalan yang menimbulkan situasi yang menuntut pada pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Situasi yang menuntut penegakan hak asasi manusia antara lain:

1. Kurangnya kesetujuan warga negara terhadap lembaga penegak hukum.

2. Terdapat kejadian-kejadian yang mencoba menghasut diskriminasi kepada wanita atau jaringan perusahaan yang minoritas.
3. Gaya hidup kekerasan kerap menjadi pilihan bagi jaringan korporasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi diantara mereka.
4. Tidak ada dedikasi otoritas pada upaya penegakan hak asasi manusia serta keahlian untuk menerapkan pedoman hak asasi manusia dengan sukses sebagaimana diamanatkan melalui sarana konstitusi;
5. Komersialisasi media telah menyebabkan hilangnya partisipasi media pada buku pemeriksaan HAM dan pembentukan ulasan untuk menjual HAM.
6. Kerentanan warga negara sipil yang dapat menindas penguasa secara demokrasi hingga cenderung ke khawatir serta kritis dalam menjalankan penegakan hak asasi manusia;

7. Desentralisasi yang tidak dibarengi dengan sarana penguatan profesionalisme birokrasi serta manipulasi jaringan didalam daerah berpotensi menimbulkan dorongan ke atas terhadap penyimpangan hak asasi manusia.
8. Gaya hidup feodal serta motif korupsi lembaga kepolisian tidak dapat mengambil langkah perusahaan dalam mengatasi berbagai penyimpangan hak asasi manusia yang dilakukan melalui cara aparat ataupun pimpinan jaringan.
9. Kepentingan publik serta media terlalu diarahkan dalam masalah KKN dibandingkan dengan pengelolaan kasus hak asasi manusia.
10. Masih ada segelintir individu jaringan dan aparat yang tetap berpandangan bahwa hak asasi manusia dibuat dari gaya hidup individualistis dan tidak sesuai dengan gaya hidup indonesia.

11. Ketidakadilan di luar sudah membawa kekecewaan serta kebencian di antara perusahaan jaringan tanpa rekonsiliasi yang tepat terjadi.

Secara umum upaya penegakan hak asasi manusia dicapai melalui prosedur, khususnya penindakan serta pencegahan. Cara untuk menciptakan situasi yang lebih aman untuk menghargai hak asasi manusia dikenal sebagai pencegahan, dicapai lewat upaya persuasif.

Upaya penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum yang ada dikenal dengan istilah penuntutan.

1. Penegakan HAM dengan pencegahan

Penegakan hak asasi manusia dengan pencegahan berupa inisiatif seperti:

- a. Pemberlakuan hukum serta penegakan keadilan HAM.



- b. Pembentukan badan-badan untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan hak asasi manusia. Badan-badan ini dapat berupa badan-badan nasional yang independen seperti Komnas HAM atau badan-badan yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat (lembaga swadaya masyarakat/LSM yang menangani peninjauan hak asasi manusia).
  - c. Melaksanakan sosialisasi hak asasi manusia di masyarakat dan sekolah. Media sosial, serta humas lembaga swadaya masyarakat dan LSM, berperan penting dalam ini.
  - d. Pemberlakuan undang-undang hak asasi manusia yang lebih komprehensif, termasuk ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
2. Tindakan demi tindakan

Hak asasi manusia dengan tindakan berupa:

- a. Perdamaian, negosiasi, mediasi, mediasi dan penyelesaian kasus dengan pendapat ahli.
- b. Komnas HAM menginstruksikan dan memungkinkan proses ini untuk berjalan.
- c. Pelayanan, nasehat, dukungan dan advokasi bagi orang-orang yang menghadapi masalah hak asasi manusia.
- d. Investigasi, yaitu penyelidikan terhadap informasi data dan fakta yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia. Survei ini termasuk tugas Komnas HAM. Tetapi secara umum, lembaga swadaya masyarakat dan media melaksanakan sendiri.
- e. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan hak asasi manusia.

f. Menerima laporan dari korban penyimpangan HAM. Komnath HAM, lembaga bantuan hukum dan LSM HAM memainkan peran penting dalam hal ini.

### **Hambatan Penegakan HAM di Indonesia**

Keterbatasan utama dan situasi tuntutan pada penegakan hak asasi manusia di Indonesia merupakan kasus keamanan serta ketertiban nasional, kurangnya kesadaran HAM, dan rendahnya peraturan pidana serta instrumen perundang-undangan. Mengakui dan melaksanakan HAM di Indonesia tidak semulus merumuskan dan mengucapkannya. Hal itu dikarenakan banyaknya hambatan dan tuntutan situasi yang kini bukan hanya sekedar teori, namun telah berkembang menjadi suatu kebenaran yang tidak dapat dicegah, apalagi ditunda.

Kendala pada pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan masalah hak asasi manusia
- Beberapa manusia yang memahami pengertian hak asasi manusia dari bagian konsep formal belaka. Hak asasi manusia paling efektif terlihat seperti yang termuat pada “pernyataan Hak Asasi Manusia” ataupun yang termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Tetapi, esensi pengetahuan hak asasi manusia perlu ditinjau sebagai konsep multidimensi. Karena, didalam ilmu HAM tertanam didalamnya prinsip-prinsip sederhana yaitu “Politik, regulasi, sosiologi, filsafat, ekonomi dan kebenaran masyarakat kontemporer, jadwal global, yurisprudensi analitis, estetika, dan normative”. Apabila makna ini bisa ditangkap dengan cara teknik pemahaman, pembelajaran, apresiasi serta cepat atau lambat diyakini, maka kita mampu mengalir ke cara untuk mengakhiri hak asasi manusia sebagai bagian dari persepsi luas negara. bagian dari kebijakan nasional, menjadikan hak

asasi manusia sebagai metode, program dan konsistensi di seluruh negara.

b. Kurangnya pengalaman

Apakah kita mengakuinya atau tidak lagi, kita harus mengakui bahwa hak asasi manusia sebagai konsep formal tetap baru dalam masyarakat kita. Situasi ini mendorong kami untuk membangun kerjasama dengan berbagai lokasi internasional untuk mengulik ide, membentuk situasi yang aman, serta menawarkan perlindungan untuk perlindungan hak asasi manusia. direkomendasikan serta ditegakkan. Tetapi, perlu berhati-hati, terutama dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara. Itu karena forum kerjasama, konsultasi, dan berbagai aturan biasanya dipatuhi melalui pengejaran pasti yang sering kali tidak merasakan bahwa tujuan yang ingin dicapai telah melenceng jauh dari impian yang dicita-citakan sebelumnya.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suplai kebodohan, karenanya perlu dimusuhi serta dihilangkan. Masalah pengentasan kemiskinan telah banyak dibicarakan dewan nasional, lokal serta global, namun sampai sekarang belum ada solusi.

d. Keterbelakangan

Keterbelakangan ini merupakan gangguan baik secara kultural maupun struktural. Budaya karena seringkali kelompok orang yang pasti dalam budaya yang sama mempunyai kebiasaan yang identik serta cara bertanya yang identik. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memiliki sistem pendidikan dan ketergantungan penggunaan pertanyaan logis.

e. Pemahaman HAM yang masih sangat terbatas

Untuk membangun hak asasi manusia di masyarakat guna menjaga perlindungan nasional penting: (1) kehadiran aparat pemerintah yang bersertifikat, (2) pejabat otoritas yang bermodal serta bertanggungjawab; (3) terciptanya sumber

informasi yang akurat, (4) pembentukan lembaga media yang berani dalam mempertahankan keutuhan negara, (5) hukuman kepada pejabat yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, (6) terdapat bantuan hukum dimana saja, (7) pembentukan komunitas pejabat kepresidenan yang mudah dan berwibawa agar bisa bersinergi.

Ada banyak kendala dalam pelaksanaan hak asasi manusia di negeri ini. Ada 4 jenis unsur yang menggunakan prevalensi pelanggaran HAM di Indonesia menurut Prof. Baharuddin Lopa, S.H., khususnya :

- a. Mungkin ada ketergantungan yang mempunyai kekuasaan serta kekuatan untuk kecurangan kekuasaan serta kekuatan;
- b. Terdapat tradisi *ewuh perkewuh* yang kokoh yang kemungkinan terjadi penyimpangan ham menyebabkan penegakan terganggu;
- c. Penegakan peraturan masih rentan serta selalu diskriminatif;

- d. Mungkin ada kecenderungan untuk peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya orang-orang dengan otoritas dan kekuatan, untuk tidak dapat menahan setiap perbedaan.

Perkembangan ini diperparah melalui sarana unsur-unsur berikutnya atau batas-batas dari dalam negeri.

- (1) Kondisi geografis Indonesia yang besar serta keragaman penduduk yang besar menimbulkan keterbatasan dalam pembicaraan dan sosialisasi tindak pidana dan produk hukum. Sosialisasi dalam jangka waktu yang sangat lama diperlukan melalui sarana produk kejahatan positif dalam skala nasional.
- (2) Gaya hidup serta HAM yang kini sudah tidak terintegrasi lagi. Dalam kasus kejahatan positif, persepsi unik tetap mewarnai kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena persebaran besaran pelatihan dan pengembangan sosial budaya di Indonesia sangat bervariasi.



Misalnya, ada perspektif unik tentang cara berzina yang sesuai dengan KUHP dan peraturan Islam. Dalam KUHP, pengaturan zina paling baik dikenakan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah yang melakukan zina. Sementara itu, aturan Islam menyerukan agar aturan yang sama digunakan untuk pelaku, laki-laki dan perempuan, yang belum menikah.

- (3) Besarnya pedoman dan kebijakan hukum kini sudah tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat. Hal ini karena karakter penguasa selama berlakunya pedoman hukum positif (misalnya, berlakunya Undang-undang Nomor sebelas PNPS/1963 tentang Subversi melalui cara penguasa Orde Lama) dan gadget kejahatan di seluruh negeri yang juga berlaku. peraturan kolonial waris atau pedoman hukum waris.

- (4) Penegakan hukum ini hilang sebab sangat bertolak belakang dengan aspirasi jaringan. Contohnya, hak untuk menggunakan tanah yang penguasaannya diatur melalui cara pengaturan dibuktikan dengan cara sertifikat kepemilikan tanah. Namun, hak-hak yang perlu tetap bersifat sosial itu digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan emosi regulasi dan keadilan jaringan.
- (5) Hilangnya penguasaan tindak pidana dari beberapa aparat penegak peraturan, masing-masing dalam gagasan dan pelaksanaan. Tingkat keseriusan dalam menangani kasus bisa jadi rendah jika kehebatan aparat penegak peraturan rendah dan teknik yang digunakan seringkali bertentangan dengan peraturan itu sendiri. Misalnya, penangkapan terhadap aktivis spiritual dilakukan dengan cara yang tidak sopan dan tidak lagi mengakui hak asasi

manusia, meskipun bertentangan dengan pedoman dan etika.

- (6) Rendahnya kesadaran hukum karena SDM minim. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran kejahatan dari beberapa kontributor jaringan berdampak pada ketidakpedulian dan beragam pelanggaran hak asasi manusia orang lain. Misalnya, ketika ada pengunjung situs yang bernasib sial dimana pemilik sepeda mengayuh karena dia tidak selalu waspada, dia menabrak kendaraan yang diparkir dipinggir jalan. Rusak sepedanya serta pemilik sepedanya mengalami luka parah. Pemilik mobil selalu dianggap sebagai pelanggaran yang salah di benak manusia biasa sehingga sangat wajib untuk membimbing korbannya, meskipun dia dalam posisi yang tepat. Selain itu dengan tindakan main hakim sendiri, yang dianggap sebagai tindakan herbal dan hanya

gerombolan, kini tidak lagi bertentangan dengan aturan, apalagi HAM.

- (7) Mekanisme kelompok penegak peraturan bersifat fragmentaris hingga menyebabkan disparitas penegakan peraturan di masalah yang sama. Perangkat penegakan regulasi serta upaya mencari keadilan di Indonesia memahami tingkatan keadilan yang belum dipahami melalui sarana publik.

Contohnya suatu kasus yang divonis dengan hukuman berat ditingkat pengadilan negeri diubah menjadi hukuman yang paling ringan ditingkat banding (pengadilan berlebih), bahkan mungkin dibebaskan. Masyarakat trendi mungkin sangat sulit untuk mengenali hal ini. Padahal, peraturan penipu kain (KUHP) di Indonesia memberlakukan hukuman paling banyak pada sistem hukum.

## LATIHAN

1. Jelaskan alasan yang mendasari pentingnya penegakan HAM!
2. Jelaskan secara singkat mengenai perkembangan penegakan HAM di Asia!
3. Sebutkan upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah!
4. Bagaimana upaya Indonesia dalam menegakan HAM?
5. Sebutkan kendala atau hambatan yang terjadi dalam penegakan HAM!

### 4. 3. Penutup

#### A. Rangkuman

1. Dasar pentingnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu sejalan dengan Pancasila, Amanat UUD NRI 1945, Indonesia sebagai negara hukum, dan demi menjaga solidaritas dan kerukunan.
2. Penegakan HAM merupakan suatu kewajiban serta tidak ada penekanan dari pihak yang melakukannya. Penegakan di Indonesia dilakukan dengan

pembentukan Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, serta membentuk pengadilan HAM. Upaya penegakan HAM bisa dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.

3. Rendahnya kesadaran HAM, kurangnya instrumen pidana dan peraturan perundang-undangan , dan masalah ketertiban serta keamanan nasional menjadi tuntutan tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM.

## **B. Tes Informatif**

1. Negara adalah badan perlindungan HAM yang penting disebutkan dalam tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI 1945 dalam alenia ke ....
  - a. 1
  - b. 2
  - c. 3
  - d. 4
2. Berikut ini adalah fungsi Komnas HAM, kecuali ...
  - a. Pemantauan

- b. Penyuluhan
  - c. Pengkajian dan penelitian
  - d. Penjatuhan sanksi kepada pelanggar
3. Segala perbuatan yang tidak menghormati hak orang lain akan menyebabkan ...
  - a. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud
  - b. Kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi
  - c. Kedamaian masyarakat akan terganggu
  - d. Kebutuhan masyarakat tidak menentu
4. UU No. 39 Tahun 1999 pasal 8 menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan “perlindungan” yaitu termasuk ...
  - a. Pembelaan RAS
  - b. Pembelaan HAM
  - c. Pembelaan kelompok
  - d. Pembelaan perorangan
5. Berikut ini adalah hambatan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu ...
  - a. Kurangnya pengetahuan

- b. Sudah berpengalaman
- c. Kemajuan
- d. Kekayaan

### **A. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah mengerjakan tes informatif, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir bab ini. Jika dapat menjawab dengan benar minimal 80% pertanyaan dalam tes informatif tersebut, maka Anda dinyatakan berhasil dengan baik, selamat untuk Anda. Namun, apabila jawaban yang benar kurang dari 80% silahkan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam bab selanjutnya, termasuk pada bagian yang belum dikuasai dengan baik.

### **C. Kunci Jawaban**

- 1. D
- 2. D
- 3. C
- 4. B
- 5. A



## GLOSARIUM

**Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia.** Deklarasi Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa semua manusia, bisa secara individu maupun kolektif, berhak untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

**Diskriminasi.** Kekerasan, perusakan, atau pengucilan berdasarkan diskriminasi manusia berdasarkan golongan, suku, agama, ras, Bahasa, keyakinan, dll.

**Hak anak-anak.** Ini adalah Hak Asasi Manusia, yang diakui secara hukum serta dilindungi hak-hak anak sejak pembuahan. Misalnya: Hak orang tua, perlindungan keluarga, sosial dan negara, ibadah keagamaan, ekspresi, perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas, eskploitasi ekonomi, ketenagakerjaan, penghancuran seksual, perdagangan anak, penyitaan obat-obatan psikiatri dan zat narkotika lainnya.

**Hak untuk mengembangkan diri.** Ini merupakan hak setiap manusia untuk terpenuhinya kebutuhan dasarnya agar dapat berkembang dan juga tumbuh dengan sangat baik. Misalnya: Hak untuk memperoleh Pendidikan, hak untuk dididik, hak untuk meningkatkan taraf hidup dan menjadi orang bertaqwa.

**Tugas dasar manusia.** Ini merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat dipenuhi kecuali jika dipatuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Misalnya: Kami akan bertindak adil (tanpa diskriminasi)

terhadap orang lain dan dapat menghormati hak asasi manusia orang disekitar kita.

**Kejahatan terhadap kemanusiaan.** Ini merupakan tindakan yang terjadi dalam konteks serangan terhadap warga sipil.

**Kejahatan pembunuhan.** Pemusnahan, keadilan, deportasi, penyiksaan, pemerkosaan, peaniayaan, penghilangan paksa dan apatheid.

**Pelanggaran Hak Asasi Manusia.** Perbuatan melawan hukum, membatasi, merintang, atau mencabut hak asasi manusia.

**Kejahatan genosida.** Perbuatan menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok atau ras, etnik atau agama secara seluruh atau Sebagian.

**Badan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).** Lembaga independent yang berada satu tingkat dengan komnas untuk dapat meningkatkan efektifitas praktik perlindungan anak di Indonesia.

**Konvensi Internasional.** Kesepakatan antar negara mengenai isu-isu tertentu (Hak Asasi Manusia) yang mengikat para penandatangan.

**Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.** Bukan pengadilan HAM, tapi cara penyelesaian pelanggaran HAM dengan mengungkap kebenaran dan mendamaikan anantara korban atau ahli warisnya dengan pelaku.

**Pokok pikiran pencantuman Hak Asasi Manusia.** Dalam UUD 1945 merupakan pokok pikiran atau dasar pemikiran pencantuman Klausul Hak Asasi Manusia dalam UUS 1945. Artinya untuk mencegah munculnya otoritarianisme atau “negara-negara kekuasaan”. Orang-orang yang menentang secara sewenang-wenang dapat bertindak.

**Pengadilan HAM Ad Hoc.** Badan peradilan yang diberi wewenang untuk dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat secara retroaktif sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

**Pelanggaran HAM berat.** Pelanggaran yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti namun tidak terbatas pada pembunuhan yang bertujuan menghancurkan kelompok etnis tertentu (genosida), teroris, dan kejahatan perang.

**Advokat.** Orang yang berprofesi memberikan jasa huku, didalam dan diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan UU.

**Kebiasaan.** Seluruh hukum dan tradisi sudah sangat tua.

**Memboikot.** Pengucilan.

**BW (Burgerlijk Wetboek).** Hukum perdata.

**Nilai-nilai dasar.** Nilai inti.

**Yurisprudensi.** Pendapat dari para ahli atau pakar hukum terkemuka/terkemuka.

**Etika.** Menunjukkan sifat kesopanan, adat istiadat, pengetahuan tentang benar atau salah, hak dan kewajiban moral (akhlak).

**Hakim.** Aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang berwenang untuk meninjau/memutus perkara.

**Harmoni.** Damai.

**Jus Constituendum.** Hak yang diinginkan.

**Konstitusi jazz.** hukum positif, hukum yang berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu.

**Ius Naturale/Hukum dasar.** Hukum yang berlaku untuk semua orang di dunia, kapan saja, dimana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan... Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)
- Asplund, Knut D, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Aswanto. 1999. Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan...HAM di Indonesia, Disertasi. Makassar: Perpustakaan FH-Unai Besar. Pelaksanaan Dan Penegakkan...Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia: Jurnal Humaniora Vol.2 No.1. 2011.
- Datunsolang, Akbar, 2013, Perlindungan ..Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan. Manado
- Davidson, Scott. 1993. Hak Asasi Manusia “Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan..Internasional”. PT Temprint : Jakarta
- Dewa Gede Atmadja,, Hukum Konstitusi..Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD1945, Malang: Setara Press, 2010
- Dwi Cahyati AW, Warsito Adnan. 2011. Pelajaran Kewarganegaraan

1. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian..Pendidikan Nasional Kaelan, H, Dr. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Gramedia
- Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005 Dahlan Taib. 2008. Teori dan..Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja
- Grafndo Persada. 119 Dasril Radjab. 2005. Hukum..Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, prasetyo dan Savitri Wisnuwadhani. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi. Jakarta : Komisi..Nasional Hak Asasi Manusia. 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008),
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum..Tata Negara (Jakarta: Raja Grafndo, 2014
- Jimly Asshiddiqie,. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:Konstitusi Press
- Latief, M, Syihabuddin. 1999. Jalan Kemanusiaan..Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia, Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama
- Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak..Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40

Muhammad Amin Putra. 2015. Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak 118 Asasi..Manusia DiIndonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015

Muhammd Arrifky Komaruddiansyah. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan..Sekolah. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Februari Tahun 2021

Ristianto, Cristoforus. 2020. Komnas HAM Terima 525 Pengaduan terkait Pelanggaran HAM. Diakses dimasional.kompas.com tanggal 2 November 2022 pukul 18:51 WIB.

Sumantri M, Prof. Dr. Sri. S.H.,Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni, 1922.

Surbakti, K. (2018). Fostering Of Female Prisoners In Tanjung Gusta Penitentiary Of Medan.Proceeding: The Dream Of^..Millenial Generation To Grow, 216-225.

Surbakti, K., & Si, M. (2019). Kajian Mengenai Pentingnya Basis Data Bagi Sekolah Saat Ini. Jurnal Curere, 2(2).

Winataputra, Udin S. 2020. Pembelajaran PKn di SD. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Yusnawan Lubis, Mohamad Sodeli. 2018. Buku Guru...Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan SMA/MA/SMK/MAK KELAS XII. Jakarta : Kemendikbud

## Profil Penulis



### **Dian Wahyuni**

Dian Wahyuni lahir di Gubug Duwur, Dsn. KD. Paron, RT/RW 001/003, Des. Getas, Kec.Kradenan, Kab. Blora pada tanggal 17 februari 2002. Dian mempunyai hobi Membaca, Dan Menulis Novel. Dian adalah Seorang yang senang belajar hal hal baru, entah itu akademik ataupun yang lainnya. Dia sangat menyukai, menuangkan segala yang menjadi kreativitas nya lewat tulisan. Entah melalui kata kata bijak yang sering Dia post di sosial media nya, atau menuangkan segala imajinasi nya melalui Tulisan Novel nya. Selain itu, Dia juga seorang yang sangat suka membaca, terutama Cerpen,





dan Novel. Dian Wahyuni sering mengembangkan hobi menulisnya ini melalui segala Event yang Dia ikuti, Seperti sering mengikuti Event Menulis Esai, dan mengembangkan hobi nya dengan menulis Novel di Web Aplikasi Sosial Media seperti Fizzo.

**Dr. Anita Trisiana, S.Pd, M.H.**

Anita Trisiana, lahir pada tanggal 22 April 1980, di Tegal. Lulusan Sarjana (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kemudian melanjutkan Sarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dan lulus S3 Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sekarang berprofesi sebagai Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Serta Aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi, dan telah menghasilkan karya inovatif yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Bidang Ilmu yang dikembangkan pada Pendidikan Kewarganegaraan.



### **Amelia Febrian Prameswari**

Amelia Febrian Prameswari lahir pada 12 Februari 2003. Dia lahir di Jambeyan, Slogo, Tanon, Sragen. Memiliki hobby menyanyi. Amel lahir dan tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai salah satu pegawai pabrik swasta dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Memiliki ketertarikan hobby menyanyi karena dapat merelaksikan apabila sedang rumit, misalnya ketika mempunyai banyak tugas yang membuat otak merasa pusing, jenuh ataupun masalah lainnya tentunya kita akan melampiaskan permasalahan itu dengan melakukan hal yang kita sukai.





### **Anisa Fatmawati**

Anisa Fatmawati lahir di Brati, Macanan, Kebakkramat, Karanganyar. Anisa fatmawati adalah pemudi yang memiliki sifat rajin dalam melakukan suatu hal. Anisa mulai menulis saat dia menjadi seorang mahasiswa semester 1 yang diawali dengan menulis jurnal, hingga buku. Anisa fatmawati memiliki hobi design ilustrasi , yang sering dikembangkan melalui berbagai kesempatan dalam berbagai event yang dia ikuti.



### **Ester Ningsih**

Ester Ningsih lahir di Wonowoso Rt 05 Rw 12 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Ester adalah pemudi yang rajin, dan aktif dalam kegiatan social yang ada di lingkungannya. Selain itu, ester memiliki hobi dalam design ilustrasi yang dikembangkan melalui berbagai event di lingkungannya. Ester mulai menulis saat dia menjadi seorang mahasiswa semester 1 yang diawali dengan menulis jurnal, hingga buku.



### **Islah Yulia**

Islah yulia lahir di Manggal, Simo, Simo, Boyolali. Islah yulia adalah pemudi dengan karakter yang rajin dan pekerja keras dalam menjalankan suatu hal. Islah mulai menulis saat dia menjadi seorang mahasiswa semester 1 yang diawali dengan menulis jurnal, hingga buku. Selain itu dia adalah pemudi yang aktif dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya.

# Memahami Macam Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia



Hak asasi manusia adalah suatu hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang mana, hak ini menyangkut pada beberapa aspek seperti hak untuk hidup, dll nya. Di Indonesia, tercatat banyak sekali fenomena yang menggambarkan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita. Kasus-kasus ini tentunya adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Baik faktor dari dalam diri manusia itu sendiri (faktor internal) dan juga faktor dari luar diri manusia itu (faktor eksternal). Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia ringan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Mengingat hak asasi manusia adalah suatu hal yang penting yang harus di hargai keberadaannya, dan perlu di junjung tinggi oleh sesama manusia. Oleh karena ini, penegakan hak asasi manusia harus dilakukan. Sebagai warga negara yang baik, terutama generasi muda harus memahami apa itu hak asasi manusia, Apa saja dasar hukumnya, dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan hal-hal lain yang perlu di pelajari terkait hak asasi manusia.

Buku ini berjudul "Memahami Macam Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia" membahas mengenai pengertian hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, penegakkan hak asasi manusia sebagai bentuk dari penegakan hukum di Indonesia, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Di harapkan dengan adanya buku ajar ini, dapat meningkatkan pengetahuan siswa terkait berbagai hal mengenai hak asasi manusia di Indonesia.

ISBN 978-623-5859-43-9 (PDF)



UNISRI Press  
Jalan Sumpah Pemuda No.18.  
Joglo, Banjarsari, Surakarta  
unisripress@gmail.com/  
press.unisri.ac.id  
Anggota APPTI